



Universitas Indonesia

**ANALISIS ELEMEN-ELEMEN PRAKONDISI
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAN DAYA
SAING INVESTASI DAERAH OTONOM BARU
(STUDI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

SKRIPSI

**DEDE INDRAWATI
0806396840**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
2012**



Universitas Indonesia

**ANALISIS ELEMEN-ELEMEN PRAKONDISI
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAN DAYA
SAING INVESTASI DAERAH OTONOM BARU
(STUDI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**DEDE INDRAWATI
0806396840**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI REGIONAL
DEPOK
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan
benar.**

Nama : Dede Indrawati

NPM : 0806396840

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dede Indrawati
NPM : 0806396840
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru Dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi Di Kabupaten Bandung Barat)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratannya yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
Defny Holidin S.Sos., M.P.M. (.....)

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum M.Si. (.....)

Ketua Sidang :
Lisman Manurung M.Si., Ph.D. (.....)

Sekretaris Sidang :
Nidaan Khafian S.Sos. (.....)

Di tetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkat petunjuk-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru Dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi Di Kabupaten Bandung Barat)” ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI juga selaku penguji ahli dalam sidang skripsi.
3. Defny Holidin, M.P.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. Luar Biasa, Mas Defny!!
4. Lisman Manurung, Ph.D. selaku ketua sidang skripsi.
5. Nidaan Khafian selaku sekretaris sidang skripsi.
6. Dr. Riduansyah, M.Si, selaku Pembimbing Akademis.
7. Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
8. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dengan ramah membantu penulis selama melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian.
9. Orang tua tercinta, Bapak Mubasyir dan Ibu Sariah, juga adik terlucu, Alfian, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Defny Holiday, Desy Hariyati, Siladia, Intan, Rilyan, Dinar, Vany, sebagai rekan terbaik di LoGoWa.
11. Teman sebaya dan seperjuangan, Dewi Nurzalita, Kartika Putri, Hesti Pratiwi, Ratna Pertiwi, Risna Sari, Dini Hariyani, Silvany Yohana, Maulida Tamami, Debie Puspasari, Albert, Harrison, Ramadhani, Dwi Nuri, Chacha, Yaya Madjid, Maharani Raesa, Yeti, Noralia, dan semua teman administrasi Negara khususnya kelas parallel.
12. Seluruh teman yang selalu menginspirasi penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya sebagai masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pembentukan daerah otonom baru.

Depok, 2012



Dede Indrawati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Indrawati
NPM : 0806396840
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru Dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi Di Kabupaten Bandung Barat),”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Dede Indrawati)

ABSTRAK

Nama : Dede Indrawati
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru Dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi Di Kabupaten Bandung Barat)

Daerah otonom baru dibentuk sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Daerah otonom baru yang dibentuk harus memenuhi sejumlah prakondisi yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Prakondisi tersebut merupakan sumber bagi daerah otonom untuk dapat mencapai tujuannya yang salah satunya adalah daya saing daerah. Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom baru, dalam perjalanannya menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran prakondisi pembentukan daerah otonom baru tersebut dan daya saing investasi kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitik pada variabel prakondisi dan variabel daya saing investasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa elemen prakondisi Kabupaten Bandung Barat sudah memadai dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan dari segi produk regional domestik bruto (PDRB) dan pendapatan daerah sendiri (PDS) masih kurang. Hasil daya saing investasi kabupaten Bandung Barat termasuk tinggi dilihat dari peningkatan investasi setiap tahunnya.

Kata kunci: Prakondisi Daerah Otonom Baru, Daya Saing Daerah, dan Daya Saing Investasi.

ABSTRACT

Name : Dede Indrawati
Major : Public Administration
Title : Elements Analysis of Establishment Preconditions New Autonomous Region and Investment Competitiveness of New Autonomous Region (Studies in West Bandung regency)

Newly established autonomous regions as a manifestation of the aspirations of the community in order to bring public services, improved public welfare, and increase regional competitiveness. Newly established autonomous regions must meet a number of preconditions set out in government regulations. Precondition is a source for the autonomous region to be able to achieve its objectives, one of which is the region's competitiveness. West Bandung regency as one of the new autonomous region, along the way showed a significant increase in investment in the last three years. Departing from this, the purpose of this study was to describe the preconditions formation of new autonomous regions and investment competitiveness of West Bandung regency. This study uses a quantitative approach to data collection techniques in quantitative and qualitative. The techniques of data analysis using descriptive-analytic analysis of the preconditions of variables and variable investment competitiveness. The results of this study indicate that the element precondition West Bandung regency had seen enough of the population, economic growth and human development index. In terms of regional gross domestic product (GDP) and its own revenues (PDS) is still lacking. The results of the competitiveness of the West Bandung regency investments include high seen from an increase in investment each year.

Keywords: New Autonomous Region Establishment Preconditions, Region Competitiveness, and Investment Competitiveness.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Signifikansi Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.2 Konstruksi Model Teoritis	24
2.2.1 Desentralisasi	24
2.2.2 Pemekaran Daerah	28
2.2.3 Pembangunan Ekonomi Daerah	34
2.2.4 Daya Saing Daerah	39
2.2.4.1 Penciptaan Daya Saing Daerah	43
2.2.4.2 Daya Saing Investasi Daerah	51
2.3 Operasionalisasi Konsep	53
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	59
3.2 Jenis Penelitian	59
3.3 Teknik Pengumpulan Data	60
3.4 Populasi dan Sampel	64
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	68
3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	68
3.7 Keterbatasan Penelitian	71
BAB 4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	
4.1 Sejarah	73
4.2 Visi dan Misi	75
4.3 Geografi	77

4.4	Demografi	79
4.5	Pendidikan	81
4.6	Indeks Pembangunan Manusia	84
4.7	Kesehatan	86
4.8	Ekonomi Daerah	87

BAB 5 PEMBAHASAN

5.1	Prakondisi Kabupaten Bandung Barat	94
5.1.1	Kependudukan	95
5.1.2	Kemampuan Ekonomi	97
5.1.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	97
5.1.2.2	Pertumbuhan Ekonomi	100
5.1.3	Kemampuan Keuangan	103
5.1.4	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	106
5.1.5	Rentang Kendali Akses Pelayanan	109
5.2	Daya Saing Kabupaten Bandung Barat	113
5.2.1	Factor Condition	114
5.2.2	Institutional Factor	122
5.2.3	Ekonomi Lokal	127
5.2.4	Sosial, politik, budaya, dan keamanan	135

BAB 6 PENUTUP

6.1	Simpulan	146
6.2	Rekomendasi	146

DAFTAR PUSTAKA	148
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Daerah Otonom di Indonesia	2
Tabel 1.2	Perbandingan Daya Saing Daerah otonom baru Berdasarkan Usia dan Level Pemerintahan	9
Tabel 1.3	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru yang Berusia 4 tahun dan 3 tahun	10
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian	21
Tabel 2.2	Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	38
Tabel 2.3	Operasionalisasi Konsep	55
Tabel 3.1	Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012	64
Tabel 3.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 3.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	66
Tabel 3.4	Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir	67
Tabel 3.5	Karakteristik responden berdasarkan usia usaha	67
Tabel 3.6	Dimensi Factor Condition	69
Tabel 3.7	Dimensi Institusional Factor	69
Tabel 3.8	Dimensi Ekonomi Lokal	70
Tabel 3.9	Dimensi sosial, budaya, keamanan	71
Tabel 4.1	Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Bandung Barat	78
Tabel 4.2	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha	80
Tabel 4.3	Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas	82
Tabel 4.4	Ijazah Tertinggi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas	83
Tabel 4.5	Jumlah Unit Sekolah	84
Tabel 4.6	Capaian Indeks Pembangunan Manusia PerKecamatan Tahun 2003-2007	85
Tabel 4.7	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat	90
Tabel 4.8	PDRB KBB Tahun 2004 – 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku	87
Tabel 4.9	Proporsi (%) masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB KBB Tahun 2004 – 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	88
Tabel 4.10	Pemusatan dan Jumlah Industri	92
Tabel 4.11	Klasifikasi Potensi Obyek Wisata Dan Daya Tarik Wisata	93
Tabel 5.1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2008-2010	95
Tabel 5.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah)	99

Tabel 5.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelompok Sektor dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2010	102
Tabel 5.4	Realisasi PAD Bandung Barat tahun 2008-2011	104
Tabel 5.5	IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2008-2010	107
Tabel 5.6	Biaya Perjalanan Dinas dari Kecamatan Batujajar (Pusat Pemerintahan Saat Ini) Ke Seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung Barat	110
Tabel 5.7	Waktu Tempuh Perjalanan Angkutan Kota pada Lintasan Trayek di Kabupaten Bandung Barat	111
Tabel 5.8	Rekapitulasi Perkembangan Koperasi Per-Kecamatan Tahun 2007-2009	117
Tabel 5.9	Lintasan Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Bandung Barat	121
Tabel 5.10	Perkembangan Nilai Investasi Pma Dan Pmdn Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2011	141

DAFTAR GRAFIK

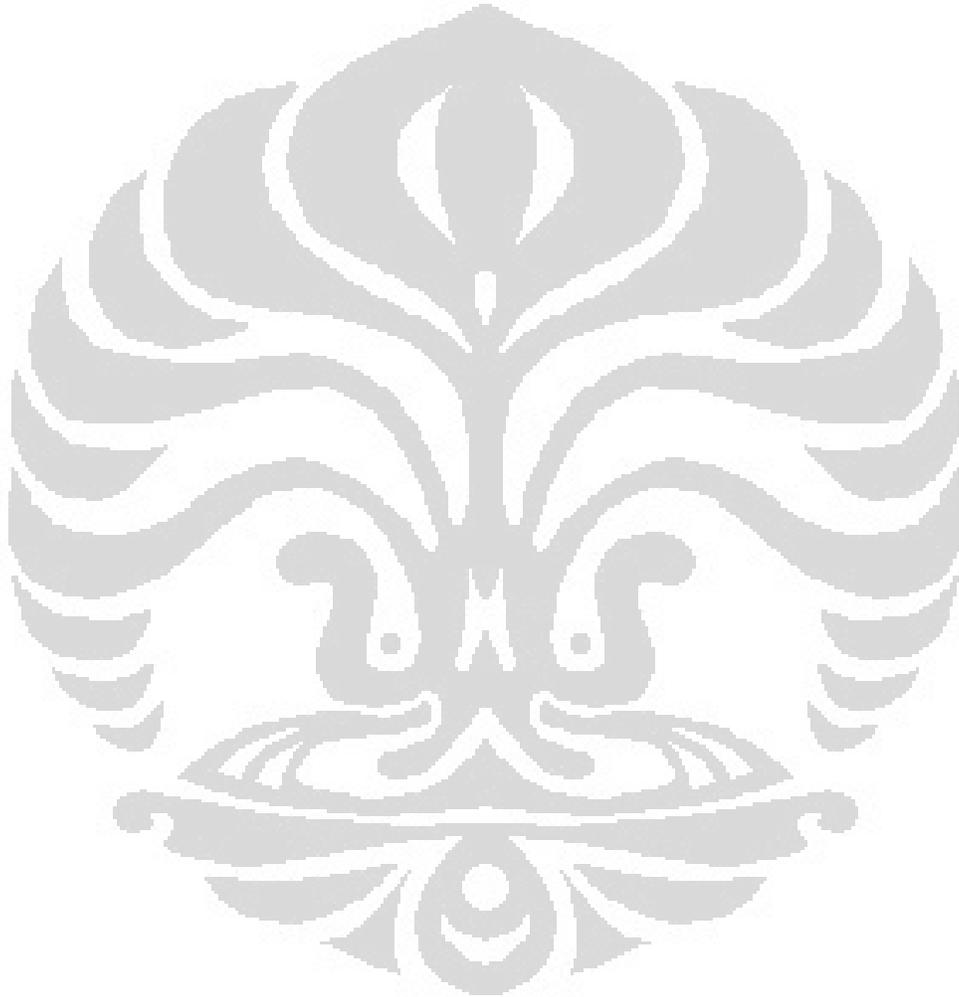
Grafik 1.1	Faktor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tingkat Provinsi	7
Grafik 1.2	Faktor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tingkat Kabupaten	8
Grafik 1.3	Faktor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tingkat	8
Grafik 5.1	Jenjang Pendidikan PNS	114
Grafik 5.2	Kualitas PNS	115
Grafik 5.3	Kemudahan Akses Permodalan	118
Grafik 5.4	Kualitas Jalan	120
Grafik 5.5	Kualitas Lembaga/Badan/Kantor yang Memberikan Pelayanan Kepada Dunia Usaha	125
Grafik 5.6	Ada perhatian dan komitmen dari pemimpin daerah terhadap dunia usaha	126
Grafik 5.7	Penggunaan Teknologi pada Usaha	128
Grafik 5.8	Usaha Memperluas Pasar Interlokal, Nasional, Internasional	129
Grafik 5.9	Pemerintah Membantu Mengembangkan Pusat Pasar	130
Grafik 5.10	Usaha Melakukan Penelitian Terhadap Pasar	131
Grafik 5.11	Jaringan Pasar Yang Memberi Akses Informasi	132
Grafik 5.12	Jaringan Kerja Antara Pemerintah Dan Pelaku Usaha	133
Grafik 5.13	Pemerintah Menciptakan Lingkungan Yang Aman Bagi Dunia Usaha	135
Grafik 5.14	Adanya Kesepakatan Bisnis Dalam Dunia Usaha	138
Grafik 5.15	Usaha Memiliki Kesiapan Bersaing	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Karakteristik Ekonomi Negara Berkembang Dan Persaingan Global	42
Gambar 2.2	<i>The Determinan Of National Advantage</i>	47
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Bandung Barat	77
Gambar 4.2	Peta Potensi Kabupaten Bandung Barat	89
Gambar 5.1	LPE Kabupaten Bandung Barat dan Sektor-sektor Dominan Tahun 2008-2010 (dalam persentase)	98
Gambar 5.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Kelompok Sektor Tahun 2008-2010 (dalam persentase)	101
Gambar 5.3	Laju Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Bandung Barat Selama Periode 2008-2010	108

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Hirarki Faktor dan Variabel Daya Saing Investasi Daerah 52



BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi dan sistematika penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang diterapkan di Indonesia dalam pengalamannya tidak cukup baik dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pada momen Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1999, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dan kewenangan dari lokus pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi yang mulai digalakkan ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang (UU) sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam kurun waktu 12 tahun sejak diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia pasca reformasi, terjadi beberapa perubahan dalam pemerintahan daerah. Perubahan yang kentara adalah pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur dan mengurus daerahnya (otonomi daerah). Selain itu dalam bidang politik pun telah terdesentralisasi dengan sistem pemilihan kepala daerah yang secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Perubahan yang terjadi juga adalah penambahan jumlah daerah otonom di Indonesia melalui pemekaran daerah.

Seiring dengan diterapkannya desentralisasi yang merujuk pada UU nomor 22 tahun 1999 pemekaran daerah mulai banyak terjadi. Jumlah daerah yang memekarkan diri setelah adanya UU nomor 22 tahun 1999 terhitung sebanyak 146 daerah otonom yang terdiri dari 140 kabupaten/kota dan 6 Provinsi baru.

Kemudian UU nomor 22 tahun 1999 disempurnakan menjadi UU nomor 32 tahun 2004 karena UU sebelumnya terdapat banyak persoalan yang tidak bisa diakomodir oleh UU 22 tahun 1999 tersebut seperti terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang dikarenakan kurangnya koordinasi antar pemerintahan daerah. Pemekaran daerah mulai marak kembali seiring berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 yang didalamnya diatur mengenai Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Jumlah daerah otonom baru (DOB) pasca berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 adalah 59 Daerah otonom baru yang terdiri dari 1 provinsi dan 58 kabupaten/kota baru.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Daerah Otonom di Indonesia

Tahun	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota
1996	27	287
1997	27	291
1998 (awal)	27	293
1998 (akhir)	27	314
1999	26	341
2000	32	341
2001	30	353
2002 (Juni)	30	377
2002 (Desember)	31	391
2003 (Juni)	31	416
2003 (Desember)	30	440
2004	33	440
2005 (Juni)	33	440
2005 (Desember)	33	440
2006	33	450
2007	33	475
2008 (Juni)	33	483
2008 (Oktober)	33	489

Sumber: BPS & Litbang KOMPAS

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia. Dari tahun 1996-1998 terjadi stagnasi jumlah provinsi dan terjadi penambahan yang tidak signifikan pada kabupaten dan kota baru. Penambahan jumlah daerah otonom baru signifikan terjadi di tahun 1998 akhir hingga tahun

1999. Hal tersebut terjadi sejak diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang membuka peluang besar bagi terciptanya daerah otonom baru bila dibandingkan dengan UU sebelumnya, yakni UU Nomor 57 Tahun 1994. Pada tahun-tahun selanjutnya pun *trend* penambahan daerah otonom baru terus terjadi hingga pada tahun 2008 jumlah daerah otonom di Indonesia adalah sebanyak 33 Provinsi dan 489 Kabupaten/Kota.

Dengan bertambahnya daerah otonom baru maka yang diharapkan adalah semakin efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat terutama dalam bidang pelayanan. Secara umum ditegaskan dalam UU No. 32 tahun 2004, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3). Dalam pasal lain disebutkan pula bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g).

Untuk membentuk suatu daerah otonom baru, suatu daerah wajib memenuhi syarat-syarat pembentukan daerah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, pada Bab II dinyatakan bahwa syarat pembentukan daerah otonom baru mencakup syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif didasarkan pada aspirasi masyarakat berupa persetujuan dari DPRD, keputusan kepala Daerah, keputusan Gubernur, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat teknis dalam pasal 6 dinyatakan bahwa pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria: Kependudukan, Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Kemampuan keuangan, Sosial budaya, Sosial politik, Luas daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat kesejahteraan masyarakat, dan Rentang kendali. Bobot untuk kemampuan ekonomi adalah 15, potensi daerah adalah 15, sosial budaya adalah 5, sosial politik adalah 5, jumlah penduduk adalah 20, kemampuan keuangan adalah 15, luas daerah adalah 5, dan pertimbangan lain-lainnya adalah 5. Adapun total seluruh bobot adalah 100. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana

pemerintahan. Daerah dengan kategori mampu atau sangat mampu akan mendapatkan rekomendasi pembentukan daerah otonom baru.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam peraturan pemerintah yang mengatur persyaratan pembentukan daerah otonom baru, yakni antara PP Nomor 129 Tahun 2000 dan PP Nomor 78 Tahun 2007. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endarto, beliau salah satu tokoh dari Kementerian Dalam Negeri yang juga menangani lahirnya PP 78 tahun 2007 ini, terdapat fitur yang berbeda dengan PP sebelumnya,

“nah, yang di PP 78 ini yang faktanya yah, dari 4 indikator itu tidak dapat untuk dikumulatiskan, harus sendiri-sendiri. Luas wilayah, jumlah penduduk, ekonomi, keuangan, itu harus berdiri sendiri...”
(Endarto,2012).

Lebih lanjut, untuk pemenuhan persyaratan dari 11 faktor dan 35 indikator pak Endarto menjelaskan,

“...harus terpenuhi, diatas nilai 75. Dibawah 70 jelas tidak akan lulus. Contohnya, kemarin DPR RI menginisiasikan pemekaran sebanyak 17 daerah otonom. Kita sidangkan melalui sidang DPOD dan kita berikan pemahaman PP 78 dari 17 daerah usulan itu hanya satu pun tidak ada yang memenuhi syarat PP 78. Contoh Tangsel, PDRBnya gila-gilaan, PADnya gila-gilaan, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan PP 78 kalau dikumulasikan. Kenapa? Karena presentasi penduduk lebih gila perbandingannya mbak. Penduduknya gila banget, banyak banget, makanya dibagi rata-rata penduduk jadinya kecil sekali. Tapi, pertanyaan mba kenapa itu Tangsel tetap mekar? Karena itu inisiatif DPR RI, lobi-lobi politik” (Endarto, 2012).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa setelah dilakukan kajian oleh tim teknis, hasil dari kajian dikembalikan kembali pada forum rapat pemerintah dan DPR. Namun, disinilah, dalam rapat ini proses politik yang berjalan. Meskipun dari pemerintah telah memperlihatkan hasil kajian bahwa hanya sebagian kecil

saja calon daerah otonom baru yang layak mekar, kenyataannya sampai sekarang telah ada 205 daerah otonom baru hasil pemekaran.

Bertolak dari kenyataan yang terjadi di DPR mengenai pembahasan pembentukan daerah otonom baru, memang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan daerah otonom baru memiliki dua jalur. Yang pertama adalah melalui proses teknokrasi, kedua adalah melalui proses politik. Menyambung konsep ini, Bapak Endarto selaku pihak dari kementerian dalam negeri berargumen, *“Ini tidak dapat disambungkan antara politik dan administrative. Yak, politik untuk menuju kesana, tetapi politik kan harus melalui administrative. Sekarang tidak. Ketatanegaraan kita amburadul sekarang. Jujur saya katakan.”* (Endarto, 2012). Karena DPR sendiri adalah lembaga politik, tentu yang akan dominan adalah proses politik dalam pembahasan pembentukan daerah otonom baru. Sedangkan dari peraturan yang ada, telah jelas bahwa pembentukan daerah otonom baru harus memiliki sejumlah persyaratan yang harus dimiliki. Hal inilah, yang seringkali absen ketika pembahasana pembentukan daerah otonom baru di DPR. Sehingga, calon daerah otonom yang tidak memiliki kualifikasi pun akhirnya turut dibahas pula dalam proses politik. Hal ini menunjukkan dalam penggunaan hak inisiatif pembentukan daerah otonom baru DPR memiliki kualitas yang buruk dikarenakan calon daerah otonom yang diajukan tidak berpotensi.

Bila dikaitkan dengan logika menurut Kaloh (2007: 189-190), selama ini sebagian besar daerah otonom merupakan pemekaran dari logika Undang-Undang dan logika politik. Logika Undang-Undang tentu saja merupakan sesuatu yang substansial dalam pembentukan daerah otonom baru, tak lain adalah karena daerah otonom baru tentunya dibentuk dengan Undang-Undang. Kemudian, dari logika politik inilah yang lebih dominan untuk membentuk daerah otonom baru. Bila Kaloh (2007: 189-190) melihat politik disini lebih kepada politik lokal di daerah yang mengusung etnisitas daerah sebagai pemicu pemekaran daerah, berbeda dengan motivasi pemekaran daerah yang disebutkan oleh Fitriani et.al. Fitriani sendiri memisahkan antara motivasi etnisitas dan motivasi politik *rent seeking*. Motivasi etnisitas lebih kepada urgensi di tingkat lokal dilihat dari kesenjangan dari segi sosial ekonomi, perbedaan yang signifikan dalam hal etnis

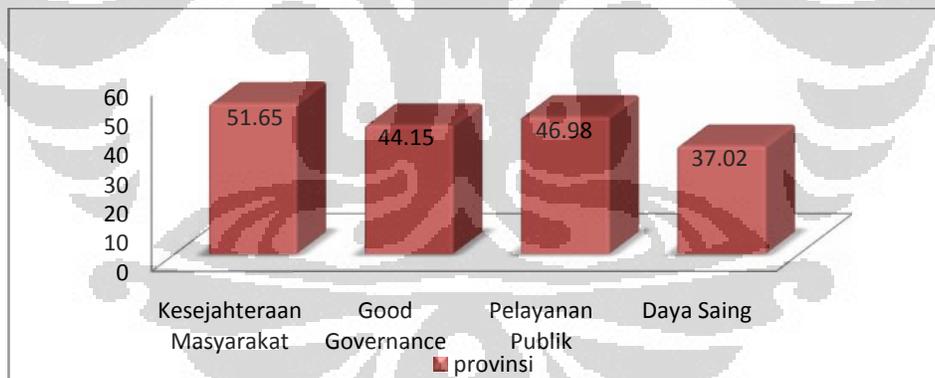
dan agama yang dikhawatirkan bila dibiarkan akan menjadi konflik laten yang mengancam bagi keutuhan NKRI, dan terakhir adalah dilihat dari indikator kekayaan (*wealth*) dan pendidikan. Sedangkan faktor politik lebih kepada dominasi partai politik yang ada di daerah. Hal ini yang mendorong pemekaran daerah lebih disukai diajukan oleh DPR karena masalah partai tentunya merupakan kepentingan mereka juga sebagai orang partai yang tentunya mengamankan basis suara mereka atau malah dapat memperluas basis suara mereka.

Selama persyaratan-persyaratan pemekaran daerah otonom terpenuhi, diasumsikan daerah otonom baru tersebut memiliki sumber daya yang memungkinkan untuk menjalankan otonomi daerah dan mewujudkan tujuan desentralisasi yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Namun umumnya pasca dimekarkan, daerah otonom baru lebih berfokus pada transisi pemerintahan dibandingkan dengan upaya mencapai tujuan desentralisasi. Hal ini ternyata disebabkan pemerintah daerah otonom baru pada tahun-tahun awal memprioritaskan pembenahan kelembagaan, infrastruktur kelembagaan, personil dan keuangan daerahnya yang pada akhirnya membuat kinerja daerah otonom baru umumnya lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya (Bappenas, 2008). Litbang Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2005 melakukan penelitian terhadap efektivitas pemekaran daerah dan disimpulkan bahwa secara umum tidak ada satu pun daerah otonom baru yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu, meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Penyebabnya adalah pemerintahan daerah otonom baru kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan kondisi, karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan laporan terbaru Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di tahun 2011 terkait hasil evaluasi terhadap 205 DOHP (Daerah Otonom Hasil Pemekaran) ditunjukkan bahwa mayoritas dari daerah otonom baru tersebut berkinerja rendah. Hasil evaluasi provinsi hasil pemekaran, Maluku Utara berada di peringkat pertama dengan skor 55,88, kemudian disusul Gorontalo (51,31),

Kepulauan Bangka Belitung (49,64), Sulawesi Barat (46,73), Kepulauan Riau (46,64), Banten (44,57) dan Papua Barat dengan skor 24,99 berada di posisi juru kunci.

Dari hasil evaluasi di atas secara garis besar dapat disimpulkan rata-rata daerah otonom baru memiliki permasalahan yang pada akhirnya membuat kinerja pemerintahan daerah otonom baru menjadi rendah. Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) ini sifatnya ad hoc, yakni evaluasi dilakukan terkait dengan pernyataan Presiden yang mengambil kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Jadi Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) ini hanya dilakukan sekali sejak awal maraknya pemekaran pasca reformasi. Evaluasi DOHP ini menggunakan empat faktor dalam mengukur penyelenggaraan daerah otonom baru, yakni tiga faktor dari PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni kesejahteraan masyarakat, ketersediaan pelayanan publik, daya saing daerah, kemudian ditambahkan satu faktor lagi yakni tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Adapun evaluasi DOHP dilakukan pada level provinsi, kabupaten dan kota yang termasuk pada 205 daerah otonom baru.



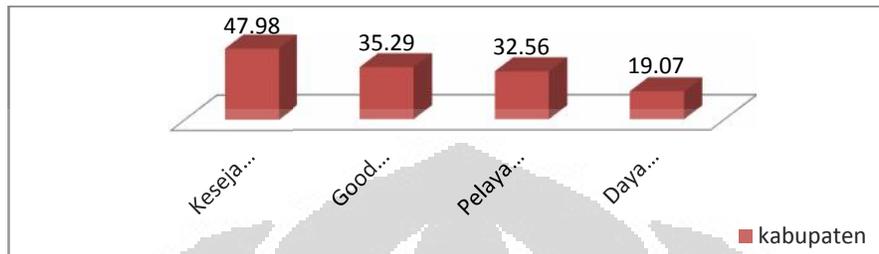
Grafik 1.1

Faktor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tingkat Provinsi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2012

Dari grafik 1.1 terlihat bahwa faktor yang paling signifikan adalah faktor kesejahteraan umum yakni dengan indeks rata-rata sebesar 51,65. Kemudian menyusul pelayanan publik dengan indeks 46,98, *Good Governance* dengan

indeks 44,15 dan diurutan terakhir daya saing daerah dengan indeks 37,02. Kemudian berikut akan disajikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 sampai dengan 2000 tingkat kabupaten.

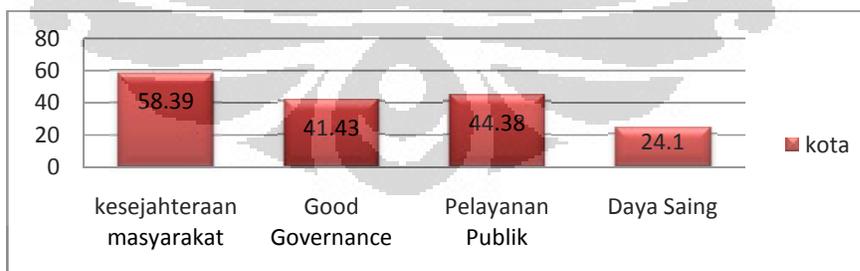


Grafik 1.2

Faktor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tingkat Kabupaten

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2012

Dari grafik 1.2 kentara sekali perbedaan dari faktor penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran. Faktor yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran di tingkat kabupaten adalah faktor kesejahteraan masyarakat dengan indeks sebesar 47,98. Kemudian disusul dengan faktor *Good Governance* dengan indeks 35,29, pelayanan publik dengan indeks 32,56, dan terakhir faktor daya saing dengan indeks 19,07. Selanjutnya disajikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 sampai dengan 2000 tingkat kota.



Grafik 1.3

Faktor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tingkat Kota

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2012

Dari grafik 1.3 terlihat bahwa faktor yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tingkat kota adalah faktor kesejahteraan masyarakat dengan indeks 58,39. Kemudian disusul dengan Pelayanan publik dengan indeks 44,38, Good Governance dengan indeks 41,43, dan terakhir faktor daya saing dengan indeks 24,1. Keseluruhan hasil evaluasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja daerah otonom baru menempatkan faktor daya saing daerah sebagai faktor yang menduduki posisi paling rendah dari yang baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daya saing dalam EDOHP yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diukur berdasarkan variabel kebijakan daerah, kelembagaan daerah, fasilitas investasi, dan realisasi investasi. Daya saing yang tinggi umumnya dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi.

Dalam konteks daya saing pada daerah otonom baru, lazim dihubungkan semakin lama daerah otonom baru yang dibentuk menjalankan otonominya, maka semakin baik kinerja daerahnya, termasuk daya saing daerahnya. Daerah otonom baru yang memiliki usia lebih lama diasumsikan tidak lagi berfokus pada transisi pemerintahan melainkan fokus pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan termasuk fokus pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karenanya, berikut akan diperlihatkan data daerah otonom baru berdasarkan usia beserta kinerja pencapaian daya saingnya.

Tabel 1.2
Perbandingan Daya Saing Daerah otonom baru Berdasarkan Usia dan Level Pemerintahan

Daerah	UU pembentukan	Usia daerah	Daya saing daerah berdasarkan EDOHP
Kabupaten Bandung Barat	UU No. 12 Tahun 2007	4 tahun	8,63
Kota Cimahi	UU No.9 Tahun 2001	10 tahun	7,79
Kota Depok	UU No. 15 Tahun 1999	12 tahun	6,58
Kota Tasikmalaya	UU No. 10 Tahun 2001	10 tahun	5,46
Kota Banjar	UU No. 27 Tahun 2002	9 tahun	7,51
Kota Cilegon	UU No. 15 Tahun 1999	12 tahun	5,14
Kota Serang	UU No. 32 Tahun 2007	4 tahun	5,00
Kota Tangerang Selatan	UU No. 51 Tahun 2008	3 tahun	4,00

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2011

Perbandingan daerah hasil pemekaran pada tabel 1.3 didasarkan pada kedekatan lokasi daerah secara geografis, yakni daerah Jawa Barat dan Banten. Secara umum hampir seluruh daerah yang memekarkan diri di Pulau Jawa adalah level pemerintahan Kota. Satu-satunya daerah otonom baru yang merupakan level Kabupaten di Pulau Jawa adalah Kabupaten Bandung Barat. Dari perbandingan diatas terlihat bahwa usia dari daerah otonom baru tidak menjamin pencapaian kinerja daya saing yang tinggi. Kabupaten Bandung Barat yang berusia jauh dibawah Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cilegon memiliki indeks daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang rata-rata berusia diatas 10 tahun. Bila dibandingkan dengan Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan yang usianya hampir sama pun daya saing Kabupaten Bandung Barat juga memiliki indeks yang lebih tinggi. Dari perbandingan tersebut dapat dipastikan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki pola yang berbeda dibanding dengan daerah lainnya. Daerah lain dengan usia pemerintahan yang cukup lama memiliki pola yang sama, yakni nilai daya saing daerahnya berada di kisaran 5-7. Sedangkan Kabupaten Bandung Barat memiliki nilai daya saing lebih tinggi dibanding daerah lainnya dengan nilai 8,63. Dengan justifikasi bahwa umur kabupaten Bandung Barat yang lebih muda namun memiliki poin daya saing yang lebih tinggi, maka peneliti tertarik untuk menjadikan daerah kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi/site penelitian.

Alasan lebih lanjut mengapa kabupaten Bandung Barat yang menarik untuk diteliti adalah dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap 57 daerah otonom baru sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru yang Berusia 4 tahun dan 3 tahun

No	Tahun	Daerah Otonom Baru	Nilai Akhir	Kategori
1.	2007	Kota Serang	76,0	Sedang
2.	2007	Kabupaten Bandung Barat	70,7	Sedang
3.	2008	Kota Tangerang Selatan	67,0	Sedang

Sumber: Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam hal penyelenggaraan daerah, kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori sedang, sama dengan dua daerah lainnya yang berada pada umur yang tidak jauh berbeda dengan kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari segi penyelenggaraan daerah, kota Serang mengungguli kabupaten Bandung Barat dari segi skor. Kemudian perbandingan dengan pencapaian skor penyelenggaraan daerah oleh kota Tangerang Selatan, kabupaten Bandung Barat masih lebih unggul. Dalam hal penyelenggaraan daerah kabupaten Bandung Barat menempati kategori “sedang”, sama dengan kota Serang dan Kota Tangerang. Artinya tidak ada perbedaan yang cukup berarti dalam hal penyelenggaraan daerah sebagai suatu daerah otonom baru yang artinya juga bahwa dalam umur yang hampir sama, akselerasi pencapaian penyelenggaraan daerah berada pada level yang sama. Berbeda dengan hasil penyelenggaraan daerah yang berada dalam satu kategori yang sama, pada hal lain, yakni daya saing daerah, kabupaten Bandung Barat memiliki pencapaian yang lebih unggul. Dari hal tersebut didapatkan sebuah *curiosity* bahwasannya kabupaten Bandung Barat lebih unggul dalam hal daya saing daerah dibandingkan dengan dua daerah yang dari segi umur tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan kabupaten Bandung Barat merupakan pengecualian (*exceptional*) dalam hal kondisi daya saing daerah sehingga kabupaten Bandung Barat layak dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk menggali ada apa dengan daya saing di sana yang membuat kabupaten Bandung tampil sebagai daerah yang menjadi pengecualian dalam hal daya saing daerah otonom baru.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah otonom baru yang berusia empat tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Bandung Barat berwenang untuk membuat keputusan bagi daerahnya, termasuk kewenangan untuk mempengaruhi operasi bisnis dan iklim investasi, pemungutan pajak, perijinan. Pelaksanaan kewenangan tersebut berkenaan dengan upaya peningkatan pencapaian daya saing daerah. Salah satu pencapaian daya saing Kabupaten Bandung Barat adalah peningkatan daya saing dalam investasi daerah.

Jumlah investasi di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan signifikan selama dua tahun terakhir. Sepanjang 2010, jumlah investasi

penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 4,04 triliun, meningkat 237 persen dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yakni Rp 1,67 triliun. Sementara itu, jumlah penanaman modal asing (PMA) pada 2010 mencapai 5,6 triliun meningkat 420 persen dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,4 triliun. Dampak positif dari hal tersebut adalah terjadinya penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja yang terserap investor PMA mencapai 7.823 orang terdiri atas 7.768 tenaga kerja lokal dan 55 tenaga kerja asing. Sementara itu, investor PMDN mampu menyerap 11.831 tenaga kerja, terdiri atas 11.809 tenaga kerja lokal dan 22 tenaga kerja asing (bataviase.co.id, 2011).

Persaingan yang semakin tajam menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2003). Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Bandung Barat harus lebih ekstra dalam upaya peningkatan daya saing di bidang investasi. Hal ini dikarenakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas yang tinggi idealnya akan merefleksikan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Bandung Barat.

Daya saing investasi daerah dinilai cukup penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dalam bidang ekonomi. Selain berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi juga bisa menambah lapangan pekerjaan baru di suatu daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2005) juga menyebutkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya bisa tercapai bila didukung oleh investasi. Karena investasi sangat bernilai ekonomis bagi suatu daerah, maka hal yang perlu dilakukan oleh daerah adalah menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik investor. Pada dasarnya terdapat lima kategori pendukung iklim investasi daerah, yaitu institusi (kelembagaan), ekonomi daerah, sosial budaya politik keamanan (sosbudpolkam), infrastruktur fisik, dan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2010).

Pencapaian daya saing dalam bidang investasi di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah otonom baru. Oleh karenanya, penting untuk melihat kilas balik proses dalam memekarkan Kabupaten Bandung Barat. Isu pemekaran daerah Bandung Barat mulai mengemuka sejak tahun 1999, yakni dengan adanya permohonan dari Bupati Kabupaten Bandung yang ingin membagi Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Namun ketua DPRD Bandung memutuskan untuk menanggukuhkan permohonan pemekaran.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM²) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2002, yakni sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat dan puncaknya berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) pada tahun 2003 membacakan naskah deklarasi yang ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat (infobandungbarat.blogspot.com, 2010).

Dari aspirasi masyarakat yang besar, kemudian proses administratif berupa keputusan DPRD Kabupaten Bandung, keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, Persetujuan Gubernur Jawa Barat, sampai ke tingkat pusat, yakni rekomendasi Menteri Dalam Negeri, dan puncaknya persetujuan Presiden dan DPRD. Akhirnya Kabupaten Bandung Barat resmi memekarkan diri dari Kabupaten Bandung dengan adanya UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Bandung Barat selain dari segi aspirasi masyarakat dan segi administratif juga ada beberapa persyaratan/kriteria dasar yang harus dimiliki oleh daerah Bandung Barat untuk bisa mandiri setelah dimekarkan. Persyaratan tersebut adalah persyaratan teknis

yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah terdiri dari faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Rumusan Permasalahan

Kabupaten Bandung Barat, dalam hal daya saing daerah justru menampakkan hasil yang cukup baik meski umur Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru masih cenderung muda. Bertolak dari data peningkatan investasi di Kabupaten Bandung Barat, dapat dikatakan Kabupaten Bandung Barat tergolong daerah otonom baru yang cukup progresif dalam mencapai daya saing investasi daerah. Oleh karenanya, sangat menarik untuk dikaji bagaimana persyaratan awal pembentukan daerah otonom baru yang merupakan prakondisi yang dimiliki oleh kabupaten Bandung Barat dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah sebagai sumber daya yang menunjang bagi pencapaian tujuan desentralisasi, terutama daya saing daerah dalam bidang investasi. Sehingga dari sintesis latar belakang serta dari rumusan permasalahan diatas, pertanyaan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana elemen-elemen prakondisi pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana daya saing investasi daerah di Kabupaten Bandung Barat?

Prakondisi pembentukan daerah otonom yang dimaksud adalah pemenuhan persyaratan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan daya saing disini berfokus pada daya saing investasi daerah.

1.3. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan elemen-elemen prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah di Kabupaten Bandung.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi serta menjadi salah satu alternatif literatur bagi peneliti lain dalam memberikan gambaran prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah otonom baru.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Pusat dan lembaga pemerintah yang terkait. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai informasi perkembangan persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang ada selama ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi gambaran mengenai daya saing investasi daerah otonom baru di Kabupaten Bandung Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian penelitian terdiri dari:

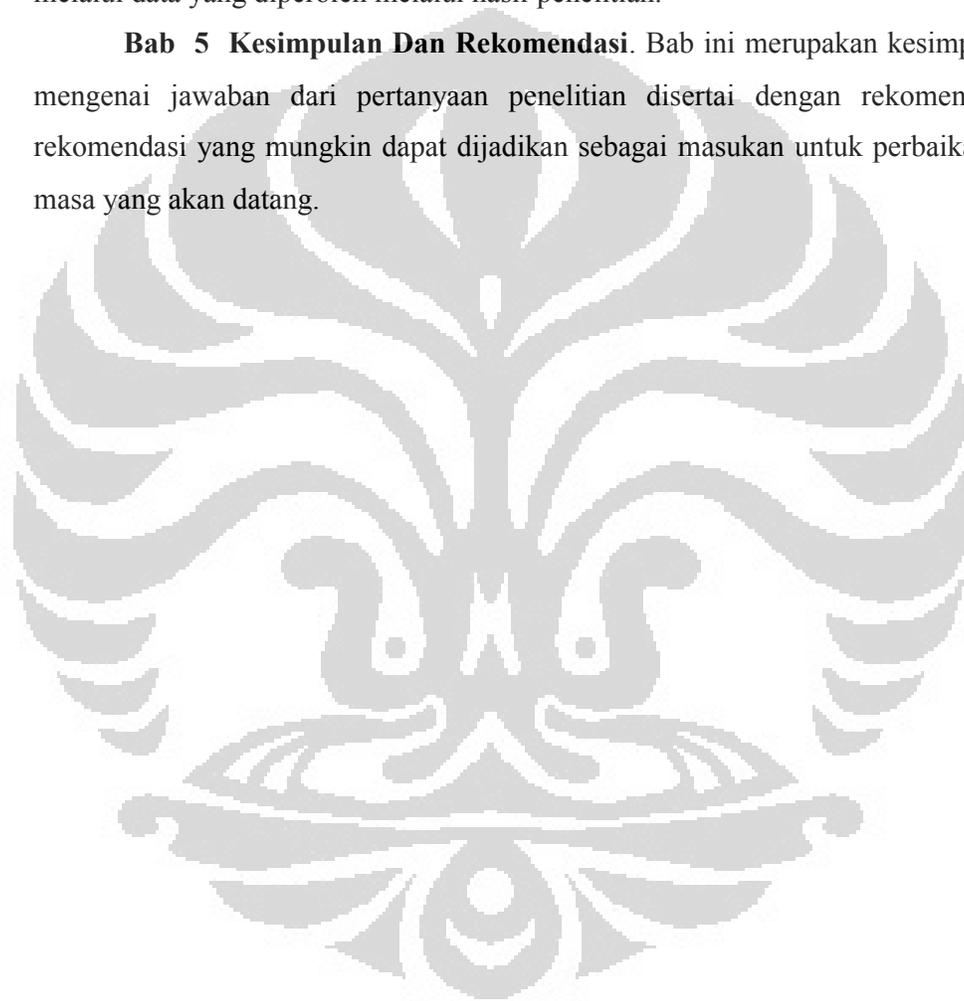
Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, dan signifikansi penelitian.

Bab 2 Kerangka Teori. Bab ini berisi tinjauan pustaka, berupa perbandingan dan referensi dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Konstruksi model teoritis yang mendiskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hipotesis serta operasionalisasi konsep.

Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini berisi uraian tentang disain penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data populasi dan sampel penelitian serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab 4 Analisis Penelitian. Bab ini berisikan gambaran Kabupaten Bandung Barat. Pada bab ini peneliti menggambarkan prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah Kabupaten Bandung Barat melalui data yang diperoleh melalui hasil penelitian.

Bab 5 Kesimpulan Dan Rekomendasi. Bab ini merupakan kesimpulan mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian disertai dengan rekomendasi-rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.



BAB 2

KERANGKA TEORI

Dalam bab 2 ini dipaparkan tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya terkait dengan studi daerah otonom baru dan daya saing daerah. dipaparkan juga teori-teori yang menjadi dasar penelitian yakni teori desentralisasi, pemekaran daerah, pembangunan ekonomi daerah, daya saing daerah dan daya saing investasi daerah. kemudian dari teor-teori tersebut dielaborasikan ke dalam operasionalisasi konsep.

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memperkaya penelitian ini, maka penting untuk mengetahui dan mengkomparasi dengan penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Tinjauan pustaka yang diambil diharapkan dapat memberikan suatu perspektif umum bagi rencana penelitian ini, baik dari segi teori maupun dari hasil penelitiannya. Adapun tinjauan pustaka yang disajikan adalah penelitian yang berkaitan dengan Pemekaran Daerah Otonom Baru, daya saing daerah, dan daya saing investasi daerah.

Tinjauan pustaka pertama adalah jurnal penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Era Desentralisasi” karya Suahasil Nazara dan Nurkholis pada tahun 2006. Tujuan peneliti adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk melakukan pemekaran. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam permodelan adalah variabel-variabel yang terdapat dalam persyaratan teknis dilakukannya pemekaran daerah sesuai UU No. 32/2004 yang secara rinci diuraikan dalam PP No. 129/2000. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan binary model yaitu logit dan probit.

Hasil analisis dengan menggunakan model probit menunjukkan bahwa suatu wilayah Kabupaten/Kota akan memiliki peluang besar/kecenderungan untuk

dimekarkan selama ini adalah apabila daerah tersebut (berdasarkan urutan bobot pertimbangan dari yang terbesar sampai terkecil): a. terletak di luar Jawa dan Bali; b. daerah berstatus Kabupaten; c. memiliki rasio penerimaan daerah sendiri (PDS) terhadap pengeluaran total yang besar; d. bukan daerah baru hasil pemekaran; e. memiliki PDRB yang berkontribusi besar terhadap PDRB total (atas dasar harga yang berlaku) seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; f. mempunyai jumlah penduduk yang besar; g. mempunyai wilayah yang cukup luas; h. mendapatkan alokasi DAU yang besar; dan i. memiliki PDRB yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan PDRB Kabupaten/Kota lain secara nasional.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah dari pendekatan kualitatif dan juga variabel yang digunakan yakni variabel dri persyaratan teknis dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan daerah otonom baru. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan beberapa variabel persyaratan pada PP 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Perbedaan lainnya adalah peneliti menghubungkan variabel pembentukan daerah otonom baru dan daya saingnya sedangkan penelitian Nurkholis lebih mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dilakukannya pemekaran daerah.

Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya adalah tesis Agus Supriadi Harahap tahun 2003 yang berjudul Pengaruh Pemekaran Kabupaten Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan sebelum dan setelah pemekaran, dan menganalisis kaitan antara pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan dengan ketahanan wilayah dan ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian analisis data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah jenis data time series, yakni data yang dikumpulkan dari beberapa kantor atau pelaku ekonomi di daerah lokasi penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan disebabkan oleh faktor sejarah, faktor politik etnis, dan faktor luas wilayah. Hasil

berikutnya adalah setelah dilaksanakannya pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan semakin turun dan pemerataan pendapatan semakin buruk atau semakin senjang. Artinya adalah pemekaran kabupaten dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kabupaten Tapanuli Selatan kurang mengembangkan potensi ekonominya, berbeda dengan Kabupaten Mandailing Natal yang juga kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan yang memanfaatkan pemekaran dengan banyak membangun infrastruktur perhubungan yang akhirnya meningkatkan kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang terakhir adalah bahwa pemekaran kabupaten memiliki hubungan yang erat terhadap pembangunan ketahanan wilayah bila memperhatikan aspek-aspek pemekaran dalam peraturan pemerintah.

Persamaan penelitian tesis ini dengan peneliti adalah pengumpulan data variabel prakondisi adalah menggunakan jenis data time series, juga persamaan salah satu pemilihan variabel indikator yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah perbandingan fokus kajian. Penelitian ini lebih membandingkan hubungan pemekaran dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta untuk memeringkatkan faktor penentu pemekaran dan menghubungkannya dengan ketahanan nasional. Sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan prakondisi daerah hasil pemekaran terutama yang berkaitan dengan indikator ekonomi dan jangkauan pelayanan dengan daya saing investasi daerah.

Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah hasil penelitian yang berjudul “Analisis Daya Saing Investasi Kota Batu”, oleh Ida Nuraini. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis data skalogram dan analisis daya saing. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeteksi Potensi ekonomi dan peluang investasi, 2) mengukur daya saing dan daya dukung masing-masing kecamatan terhadap peluang investasi dan 3) mengetahui daya saing dan daya dukung Kota Batu dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Kota Batu merupakan kota hasil pemekaran dari Kabupaten Malang.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Kota Batu memiliki potensi di sektor pertanian khususnya sayur dan buah-buahan, sektor industri yang potensial adalah industri pariwisata dan industri rumah tangga. Berdasar fasilitas non fisik

Kota Batu berada pada peringkat 8 (terakhir dibanding wilayah kabupaten dan kota disekitarnya). Kelemahan dari Kota Batu dalam hal daya saing antara lain: Kondisi makro ekonomi, pendapatan daerah, industrialisasi, pangan, dan kinerja aparatur. Dalam pelayanan dan penyediaan fasilitas fisik Kota Batu sendiri hanya menduduki peringkat ke 7. Sedangkan Kota Batu mempunyai kelemahan yang paling mendasar pada fasilitas kesehatan dan ekonomi.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah penggambaran daya saing investasi pada daerah hasil pemekaran. Perbedaannya adalah peneliti menghubungkan daya saing investasi tersebut dan kondisi dari kabupaten Bandung Barat.

Tinjauan pustaka yang terakhir adalah penelitian yang berjudul “Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY” karya Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi sejauh mana rejim saat ini telah mengubah daya tarik investasi dan pungutan liar dalam melakukan bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan metode *quick count* terhadap pengusaha/pelaku usaha. Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (KPPOD) dalam penelitiannya mengenai daya tarik investasi daerah tahun 2002,2003. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

Berdasarkan hasil temuan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa menurut persepsi pelaku usaha di DIY, faktor Kelembagaan memiliki bobot terbesar dalam menentukan daya tarik investasi/kegiatan berusaha di DIY. Kemudian diikuti oleh faktor Infrastruktur Fisik, yang ketiga adalah faktor Sosial Politik. Berikutnya adalah faktor Ekonomi Daerah dan yang terakhir adalah faktor Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi/kegiatan berusaha di DIY relatif lebih dipengaruhi oleh faktor nonekonominya terutama Kelembagaan, Infrastruktur Fisik dan Sosial Politik, dibandingkan dengan faktor ekonomi yaitu Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja. Menurut persepsi pelaku usaha di DIY, faktor ekonomi cenderung lebih “*controllable*” dibandingkan dengan faktor nonekonomi.

Persamaan penelitian ini dan peneliti adalah faktor dan variabel yang digunakan dalam menentukan daya tarik investasi daerah yang dikeluarkan oleh KPPOD. Sedangkan perbedaan penelitian terlihat dari pendekatan penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian.

Penelitian yang dilakukan mengenai gambaran Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Daya Saing Investasi Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran prakondisi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat dengan daya saing Bandung Barat dalam investasi daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode analisis data peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

Apek	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3	Peneliti 4	Peneliti 5
Nama	Suahasil Nazara dan Nurkholis	Agus Supriadi Harahap	Ida Nuraini	Mudrajat Kuncoro dan Anggi Rahajeng.	Dede Indrawati
Judul	Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Era Desentralisasi	Pengaruh Pemekaran Kabupaten Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan	Analisis Daya Saing Investasi Kota Batu	Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY	Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru Dan Daya Saing Investasi Daerah (Studi Kab. Bandung Barat)
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif

T ujuan Peneliti an	Mengiden tifikasi faktor- faktor yang menjadi pertimbangan untuk melakukan pemekaran	1. Menganalisis faktor-faktor pendorong pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan 2. Membandingkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan sebelum dan setelah pemekaran, dan 3. Menganalisis kaitan antara pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan dengan ketahanan wilayah dan ketahanan nasional.	1) mendeteksi Potensi ekonomi dan peluang investasi, 2) mengukur daya saing dan daya dukung masing- masing kecamatan terhadap peluang investasi dan 3) mengetahui daya saing dan daya dukung Kota Batu dibandingkan dengan wilayah sekitarnya	menge ksplorasi sejauh mana rejim saat ini telah mengubah daya tarik investasi dan pungutan liar dalam melakukan bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Membe rikan gambaran prakondisi pembentukan DOB dan daya saing investasi Kabupaten Bandung Barat
M etode/T eknik Analisis Data	binary model yaitu logit dan probit.	Deskriptif analitik dengan jenis data time series	Data sekunder, dokumentasi.	Survey, AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>).	Deskri ptif analitik
K esimpul an	Kecender ungan suatu Kota/daerah dimekarkan adalah bila: a. terletak di luar Jawa dan Bali; b. daerah berstatus Kabupaten; c. memiliki rasio penerimaan	1 pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan disebabkan oleh faktor sejarah, faktor politik etnis, dan faktor luas wilayah. 2. adalah setelah dilaksanakanny	1.Kota Batu memiliki potensi di sektor pertanian, industri pariwisata dan industri rumah tangga. 2. Berdasar fasilitas non fisik Kota	Faktor Kelembagaan memiliki bobot terbesar dalam menentukan daya tarik investasi/kegi atan berusaha di DIY. Kemudian diikuti oleh	Prakon disi pembentukan daerah otonom baru yang terdiri dari jumlah penduduk, PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan

Universitas Indonesia

	<p>daerah sendiri (PDS) terhadap pengeluaran total yang besar; d. bukan daerah baru hasil pemekaran; e. memiliki PDRB yang berkontribusi besar terhadap PDRB total (atas dasar harga yang berlaku) seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; f. mempunyai jumlah penduduk yang besar; g. mempunyai wilayah yang cukup luas; h. mendapatkan alokasi DAU yang besar; dan i. memiliki PDRB yang relative lebih kecil dibandingkan dengan PDRB Kabupaten/Kota lain secara nasional.</p>	<p>a pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan semakin turun dan pemerataan pendapatan semakin buruk atau semakin senjang. 3. Pemekaran kabupaten memiliki hubungan yang erat terhadap pembangunan ketahanan wilayah</p>	<p>Batu berada pada peringkat terakhir di wilayah kabupaten dan kota disekitarnya). 3.Kelemahan dari Kota Batu dalam hal daya saing antara lain: Kondisi makro ekonomi, pendapatan daerah, industriasi, pangan, dan kinerja aparatur. kelemahan yang paling mendasar pada fasilitas kesehatan dan ekonomi</p>	<p>faktor Infrastruktur Fisik, yang ketiga adalah faktor Sosial Politik. Berikutnya adalah faktor Ekonomi Daerah dan yang terakhir adalah faktor Tenaga Kerja.</p>	<p>daerah sendiri, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sudah memadai. Daya saing investasi kabupaten Bandung Barat tinggi.</p>
--	---	--	---	--	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2012

2.2 Konstruksi Model Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teori besar yakni teori desentralisasi, pemekaran daerah, pembangunan ekonomi regional, dan teori daya saing daerah. Teori ini digunakan sebagai acuan dasar dalam pendekatan penelitian.

2.2.1 Desentralisasi

Bhenyamin Hoessein (1993:12) menjelaskan desentralisasi sebagai pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Dari definisi ini terkandung dua pengertian. Pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom. Kedua, daerah otonom yang dibentuk itu disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat. Melalui desentralisasi terbentuklah *local self government* (pemerintahan daerah sendiri) yang selalu dimulai dengan pembentukan daerah otonom melalui undang-undang. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang meliputi pemerintahan daerah dalam pengertian organ, pemerintahan daerah dalam pengertian aktivitas atau kegiatan, dan teritori pemerintahan daerah (Prasojo dkk, 2006).

Berbeda dengan sentralisasi, desentralisasi dirancang untuk mencerminkan karakteristik, masalah dan kebutuhan daerah dalam region yang berbeda (Smith, 1985). Desentralisasi atau otonomi daerah selalu merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritori). Desentralisasi selalu berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan dan kewenangan dipancarkan melalui hierarki geografis. Makna otonomi lebih pada sejauhmana kewenangan dilimpahkan pada masyarakat lokal dalam menentukan arah kebijakan publik pada suatu region.

C.V. Vander Pot dalam Koesoemahatmadja (1979:15) berpendapat bahwa desentralisasi dapat dibagi dalam dua macam: pertama, desentralisasi territorial (*Teritoriale Decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dari daerah masing-masing. Dari pengertian inilah terbentuk Daerah Otonom, sedangkan pengertian yang kedua, Desentralisasi Fungsional (*Fungsionale Decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk

mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. Dalam konsep desentralisasi fungsional, Oleh Hulme dan Turner (dalam Maksum, 2007), golongan-golongan yang bersangkutan sendiri (*interest group representation*) berciri (1) unsur lokalitas; (2) unsur kemandirian atau otonomi, dan (3) unsur non profit.

Pada prinsipnya terdapat dua tujuan utama dari desentralisasi, yaitu tujuan-tujuan yang bersifat politis dan tujuan-tujuan yang bersifat administratif. Tujuan-tujuan yang bersifat politis terkait erat dengan perwujudan demokrasi lokal dan penguatan partisipasi, sedangkan tujuan-tujuan yang bersifat administrative terkait dengan penciptaan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan. Namun yang paling penting juga adalah tujuan ekonomi dan fiskal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rondinelli (1980;134-137) mengemukakan bahwa penerapan desentralisasi terutama di Negara dunia ketiga, adalah untuk mempercepat laju dan penyebaran manfaat pertumbuhan, mengintegrasikan daerah yang beragam di negara-negara heterogen dan menggunakan sumber daya yang langka secara lebih efisien untuk mempromosikan pembangunan di daerah miskin atau daerah yang secara ekonomi tertinggal. Lebih lanjut, Rondinelli mengkompilasi manfaat dari diterapkannya sistem menyerahkan tanggung jawab yang lebih besar dalam manajemen perencanaan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke administrasi dibawahnya atau organisasi lain atau disebut juga sebagai manfaat dari desentralisasi. Manfaat dari desentralisasi adalah untuk menanggulangi keterbatasan kontrol pemerintah pusat dalam perencanaan nasional, memutus benang merah dari berbelitnya struktur dan prosedur dari manajemen dan perencanaan pusat sebagai eksese dari terlalu terkonsentrasinya kekuasaan, kewenangan, dan sumber daya di pusat. Dengan fungsi desentralisasi dan penugasan kembali perwakilan pemerintah pusat di daerah, pengetahuan dan sensitifitas atas masalah dan permintaan lokal mereka bisa bertambah. Desentralisasi juga memungkinkan lebih besar penetrasi politik dan administrasi dari kebijakan nasional pemerintah ke daerah-daerah terpencil dari ibukota Negara. Desentralisasi akan memungkinkan representasi yang lebih besar untuk berbagai kelompok politik, agama, etnis, dan suku dalam pembuatan

keputusan. Desentralisasi akan mengarahkan pada pembangunan kemampuan administrasi yang lebih besar antara pemerintah daerah dan lembaga swasta di daerah dan provinsi. Desentralisasi akan mengarah pada pembangunan dari peningkatan kemampuan administrasi yang lebih besar antara pemerintah daerah dan lembaga swasta di daerah. Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur dimana pembangunan dapat dikoordinasikan lebih efektif satu sama lain. Sebuah struktur pemerintahan yang terdesentralisasi diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan dan manajemen. Desentralisasi dapat menciptakan administrasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif dengan menciptakan cara alternatif pengambilan keputusan. Penciptaan regional, Provinsi, atau struktur lokal pemerintahan melalui desentralisasi perencanaan pembangunan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin lokal untuk mencari layanan dan memfasilitasi secara lebih efektif dalam masyarakat. Desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan persatuan nasional. Di masyarakat, desentralisasi bisa mengurangi skala disekonomis yang melekat pada pengambilan keputusan terpusat.

Keseluruhan manfaat yang seharusnya bisa didapat dari penerapan desentralisasi memang tidak bisa terpenuhi secara instan. Pada kenyataannya justru desentralisasi yang diterapkan di negara-negara berkembang berjalan dengan mengecewakan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Remy Prud'homme (1995: 202-218) dalam analisisnya yang berjudul "*The Danger of Decentralization*". Disebutkan bahwa desentralisasi tidak selalu sejalan dengan manfaat awal yang diusungnya, masih banyak kekurangan pada desain desentralisasi yang malah akan berbahaya bagi kelanjutan desentralisasi itu sendiri. Disebutkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan disparitas. Alasan pertama adalah adanya kesenjangan antar daerah di sebagian besar wilayah negara, terutama negara berkembang, dan hal ini bertentangan dengan teori ekonomi standar. Kedua adalah pengurangan disparitas pendapatan tidak selalu berkorelasi dengan penurunan pendapatan daerah yang berbeda-beda. Hal ini terlihat bilamana tingkat pendapatan di wilayah miskin lebih merata daripada didaerah yang berpenghasilan tinggi, transfer warga miskin akan menguntungkan daerah yang kaya dan hal ini akan semakin meningkatkan kesenjangan daerah. Ketiga, orang-orang miskin yang

tinggal di daerah berpenghasilan rendah akan tetap miskin dengan alasan tempat tinggal menawarkan kesempatan ekonomi yang kecil dan sedikit infrastruktur juga tidak ada aglomerasi ekonomi dan eksternalitas dari lokasi yang lebih spesifik. Lebih jauh lagi, masing-masing daerah adalah entitas sosial dan politik diluar individu. Dalam menilai kesejahteraan mereka warga di suatu daerah tidak hanya menjadikan pendapatan sebagai pertimbangan, tetapi juga mempertimbangkan pendapatan dengan warga negara yang lain. Oleh karenanya kesenjangan antar daerah tidak hanya bersifat artefak statistik, persepsi mereka adalah realitas sosiologis. Terdapat permintaan politik bagi tindakan untuk mengurangi kesenjangan antar yuridiksi, dan sistem desentralisasi nampaknya tidak efektif untuk mengurangi kesenjangan antar yuridiksi.

Desentralisasi juga ditengarai bisa membahayakan bagi stabilitas. Telah diketahui bahwa pemerintah pusat memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, yakni instrumen moneter dan instrumen fiskal. Instrumen fiskal digunakan untuk mengontrol jumlah dan struktur pajak dan manajemen anggaran. Desentralisasi memberi dampak dari adanya aktifitas pemerintah daerah yang mempengaruhi perekonomian di luar yuridiksinya. Selain itu, desentralisasi juga bisa mengurangi efisiensi dilihat dengan dari alokasi dan produktifitas ditambah dengan adanya peluang korupsi yang besar.

Melihat sejumlah masalah yang ada dalam penerapan desentralisasi, lebih lanjut Rondinelli (1982;142-143) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah untuk menerapkan desentralisasi secara efektif perlu dukungan dari sejumlah kondisi yakni berbagai politik, administrasi, organisasi dan kondisi perilaku, dan ketersediaan sumber daya di tingkat lokal. Kondisi politik dan administrasi meliputi komitmen dan dukungan politik yang kuat, penerimaan partisipasi dalam perencanaan dari pemimpin politik, dukungan dan komitmen dari birokrasi itu sendiri, administrasi yang kuat dan memiliki kapasitas teknis, dan ada saluran partisipasi yang efektif dan representatif. Faktor kondisi organisasi meliputi fungsi administrasi antar tingkat pemerintahan, ringkasan dan hukum yang definitif, pengaturan yang fleksibel, perencanaan yang jelas, komunikasi yang baik, dan adanya lembaga pendukung pelengkap. Sedangkan dari segi perilaku perlu perubahan perilaku dari moderat ke arah yang mendukung, mengurangi resistensi,

menciptakan kepercayaan, dan memelihara kepemimpinan yang kuat. Terakhir adalah kondisi dari sumber daya berupa transfer kewenangan, infrastruktur fisik yang memadai, dan artikulasi dan integrasi sistem ekonomi, sosial, politik, dan administrasi.

2.2.2 Pemekaran Daerah

Sebutan daerah dan wilayah masih bersifat ambigu sehingga penting untuk membedakan istilah daerah dan wilayah. Sabari Hadi (2000) dalam (Kaloh, 2007:194) menyebutkan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula dengan kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, sosial, cultural, fisik, geografis, dan sebagainya. Desentralisasi yang membawa perubahan signifikan dalam jumlah dan komposisi dari yuridiksi di tiap level pemerintahan disebut sebagai pemekaran daerah. Argumentasi dari pembentukan daerah baru ini merupakan salah satu proses demokratisasi, membawa pemimpin politik lebih dekat ke masyarakat dan konstituen mereka. Dari segi administrasi, pemekaran bisa meningkatkan pelayanan publik secara lebih dekat kepada masyarakat.

Secara teoritis, pemekaran wilayah pertama kali diungkapkan oleh Charles Tibout (1956) dalam Nurkholis (2005) dengan pendekatan *public choice school*. Dalam artikelnya "*A Pure Theory of Local Expenditure*", ia mengemukakan bahwa pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan "*vote with their feet*". Selain itu, Swianiewicz (2002) dalam Nurkholis (2005) juga mengungkapkan bahwa komunitas lokal yang kecil lebih homogen, dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya.

Pemekaran daerah juga berkaitan dengan penataan daerah. Penataan daerah merupakan upaya untuk menata kembali daerah otonom yang ada atau membentuk

daerah otonom baru berdasarkan parameter tertentu. Tujuan penataan daerah mencakup pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing. Kerangka pikir penataan daerah otonom baru dibangun dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar menuju daerah otonom yang maju dan mandiri, yaitu : pertama, dimensi geografis, bersifat relatif tetap, mencakup luas dan karakteristik (kualitas) wilayahnya; kedua, dimensi demografi, bersifat dinamis, yakni manusia yang menjadi subjek dan objek dari daerah otonom, yang mencakup jumlah dan kualitasnya; ketiga, dimensi sistem, yang bersifat sangat dinamis, terdiri dari sistem pertahanan dan keamanan, sistem sosial politik, sistem sosial ekonomi, sistem keuangan, sistem administrasi publik, serta sistem manajemen pemerintahan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia , 2010 : 18).

Terkait dengan pemekaran daerah sebagai bagian dari penataan daerah, Tarigan (2007:54) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tujuh elemen utama yang membentuk pemerintah daerah yang otonom. Pertama adalah urusan otonomi, yakni daerah memiliki urusan otonomi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kedua adalah kelembagaan yang merupakan konsekuensi dari distribusi urusan daerah. lembaga akan mewadahi urusan tersebut yang akhirnya akan terbentuk struktur organisasi dan tata kerjanya. Ketiga adalah personil, yakni adanya pegawai yang akan menjalankan kelembagaan tersebut. Keempat adalah sumber keuangan untuk membiayai otonominya. Kelima adalah perwakilan, yakni keberadaan DPRD yang menciptakan *check and balance* terhadap eksekutif daerah dan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Keenam adalah manajemen urusan daerah, yakni adanya paradigma baru pengelolaan sektor publik untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, keekonomisan, dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerahnya. Dan ketujuh adalah adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan baik dari internal daerah, pusat, masyarakat, maupun media massa.

Setelah ketujuh elemen tersebut maka pemerintah daerah dapat menjalankan otonominya. Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Terdapat lima elemen yang merupakan prakondisi bagi terselenggaranya pembangunan daerah (Syaukani, Gaffar, Rasyid, 2009 : 218-222). Pertama adalah

fasilitas, yakni fungsi pemerintah daerah yang esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Pemerintah daerah melalui birokrasinya mempermudah perijinan bagi pengusaha dan investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Selain itu juga mempermudah dari segi fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal. Kedua adalah *pemerintah daerah harus kreatif*. Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas dari para penyelenggara pemerintahan. Kreatifitas tersebut menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, apakah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) ataukah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara tepat dan proporsional. Kreatifitas juga menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya, sehingga kalangan pemilik modal akan beramai-ramai menanamkan modal di daerah tersebut. Ketiga adalah *politik lokal yang stabil*. Masyarakat dan pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Selain itu, pejabat eksekutif harus bekerja dengan suasana tenang sehingga merangsang kreatifitas. Keempat adalah *pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha*. Pemerintah daerah tidak seharusnya mengotak-atik perjanjian usaha (kontrak) yang telah ada dan berlaku karena hal tersebut mengganggu bagi kalangan pengusaha asing dan domestik. Karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatnya, khususnya yang berhubungan dengan bisnis internasional dan hukum bisnis agar dunia usaha merasa terlindungi dalam kesinambungan usaha. Kelima adalah *pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup*. Pemerintah daerah sekarang dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi yang berkembang di kalangan perburuhan. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya menjadi jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh. Kelima elemen tersebut merupakan prakondisi bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Dengan kebijaksanaan otonomi yang luas maka peluang bagi daerah menjadi sangat luas pula dan semuanya bergantung pada daerah itu sendiri.

Pemekaran daerah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilihat dari dua sisi logika (Kaloh, 2007: 189-190):

1. Logika formal (legislasi), memandang bahwa terjadinya pemekaran disebabkan adanya dukungan formal UU, sekaligus dengan UU ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini.
2. Logika realitas, memandang bahwa pembentukan daerah merupakan sesuatu yang benar-benar urgen secara realitas. Bahwa untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternatif pilihan terbaiknya hanyalah pembentukan dan atau pemekaran daerah.
3. Logika politik, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan sosial politik kemasyarakatan di tingkat lokal dengan ide pemekaran daerah, dan pada saat bersamaan dengan membawa dan mengusung etnisitas daerah sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran.

Untuk membentuk daerah otonom baru terdapat dua cara pembentukan. Pertama melalui cara administratif yang memerlukan persetujuan dari daerah asal terlebih dahulu (baik kepala daerah maupun DPRD), evaluasi teknis berdasarkan proposal oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan persetujuan dari presiden sebelum diajukan ke parlemen untuk dijadikan sebagai kebijakan nasional. Kedua, daerah dapat secara resmi menjadi daerah baru melalui inisiatif dari parlemen, sebuah proses yang muncul untuk melewati pertentangan dari daerah induk dan eksekutif. Proses ini seiring dengan adanya ketentuan parlemen memiliki kewenangan menjadikan RUU sebagai UU otomatis setelah 60 hari RUU terlepas dari persetujuan dari Presiden (Fitriani, 2005). Dengan kata lain pengajuan pembentukan daerah otonom baru bisa dilakukan dengan proses teknokrasi dan atau proses politik.

Merujuk pada Fitriani et. al (2005), terdapat empat faktor yang memotivasi daerah untuk melakukan pemekaran. Pertama adalah penyebaran administrasi. Yuridiksi yang terlalu besar dan penyebaran penduduk yang terlalu tersebar juga membuat masyarakat sulit untuk mengakses secara efektif yang juga diperburuk oleh infrastruktur. Kedua adalah preferensi homogenitas, orang akan lebih memilih untuk tinggal di daerah yang homogen secara etnis, bahasa, agama, karakteristik desa-kota, bahkan level pendapatan. Ketiga, rampasan fiskal (*fiscal*

spoil), pemekaran bisa membawa sumber daya fiskal tambahan, dalam bentuk transfer umum, pendapatan bagi hasil (pembagian hasil sumber daya alam) atau pendapatan daerah (PAD), terutama di daerah perkotaan. Keempat adalah motif birokrasi dan politik perburuan rente (*rent seeking*). Birokrat lokal dan kepentingan lain dapat manfaat langsung dari pembentukan pemerintah lokal baru, terutama jika tambahan pendapatan fiskal akan terhutang kepada pemerintahan baru. Yuridiksi baru membutuhkan pekerjaan manajemen baru (dikenal dalam struktur PNS sebagai posisi eselon), proyek-proyek konstruksi baru (kesempatan untuk rente), dan kemungkinan mempekerjakan pegawai baru (peluang nepotisme).

Pemekaran daerah salah satunya juga dilakukan atas dasar motivasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan, sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus dilayaninya, atau daerah belakangnya (*hinterland*). Sebuah pusat yang kecil akan memberikan penawaran pelayanan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang lebih besar. Jarak wilayah yang dilayaninya pun relatif lebih dekat dengan luasan yang kecil (Knox, 1994). Oleh karenanya, dibentuknya daerah otonom baru membuat pusat pemerintahan akan semakin dekat dengan masyarakat yang ada di daerah otonom baru tersebut.

Untuk menjadi sebuah daerah otonom baru tentu saja daerah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahannya. Sadu Wasistiono (2002:14) mengemukakan kapasitas yang harus dimiliki oleh daerah yang meliputi: “(a) Kapasitas sumber daya (alam, manusia, buatan) yang dimiliki dan mampu didayagunakan secara optimal; (b) Kapasitas kewenangan yang mampu dijalankannya; (c) Kapasitas pelayanan yang mampu diberikan kepada masyarakat; (d) Kapasitas akuntabilitas yang mampu diberikan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.”

Selama ini untuk membentuk suatu daerah otonom baru, calon daerah diwajibkan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam instrumen regulasi pembentukan daerah otonom baru yang mencakup faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali. Jumlah penduduk memang perlu menjadi

pertimbangan dalam pemekaran daerah. Dalam konteks pemerintahan umum, tugas-tugas pemerintahan lebih difokuskan pada pembinaan dan pengembangan wilayah. Kelak setelah wilayah berkembang, jumlah penduduk akan bertambah sebagai akibat dari migrasi antar wilayah. Namun demikian, bagi pengembangan dan prospek pertumbuhan ekonomi jumlah penduduk sangat menentukan. Dengan demikian pertimbangan jumlah penduduk masih layak diperhatikan agar daerah yang baru memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Dan juga penduduk sebagai pembayar pajak, merupakan sumber penadapat asli daerah guna membiayai pembangunan dan roda pemerintahan daerah (Rasyid dalam Harahap, 2003).

Terbentuknya sebuah daerah otonom baru juga tentu harus memperhatikan aspek-aspek yang dimiliki oleh daerah tersebut yang bisa juga disebut sebagai prakondisi dari daerah. Ryaas Rasyid dalam Harahap (2003) mengatakan bahwa pengembangan (pemekaran) wilayah pemerintahan hendaknya bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan-kewenangan yang akan diletakkan pada pemerintah baru itu. Analisis tentang pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan perluasan lapangan pekerjaan perlu dilakukan. Bahkan lebih baik lagi jika analisis itu juga menjangkau pada prospek pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah sekitarnya, sebagai dampak dari pembentukan wilayah baru itu.

Menurut Ramses (2009:133) dalam perspektif demokrasi, urgensi pembentukan daerah otonom baru tidak hanya ditentukan oleh syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan lingkup pelayanan. Dimensi politik pembentukan daerah otonom baru lebih mempertimbangkan aspek-aspek geografis, demografi, sosial budaya yang membentuk identitas dari suatu komunitas. Senada dengan Ramses, Imawan (2009:149) juga mengkritisi syarat teknis pembentukan daerah otonom baru yang dinilainya tidak luput dari kerancuan politik. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan pembentukan daerah baru, yakni: “kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”, dinilai mencampuradukkan ketentuan yang sifatnya kualitatif dengan kuantitatif.

Menurut I Made Suwandi (2009:164) dalam membentuk daerah otonom baru seyogyanya ada persyaratan yang bersifat mutlak atau wajib yang harus dipenuhi sebelum suatu daerah dapat dimekarkan. Pada prinsipnya daerah yang dimekarkan tersebut harus mampu sedikitnya membiayai belanja aparatur, baik pejabat politik maupun pejabat karir yang ada di daerah tersebut. Untuk itu, maka syarat potensi ekonominya harus riil yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut.

2.2.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan, menurut literatur-literatur ekonomi pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari konteks pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak pendapat ahli ekonomi mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Adapun yang menjadi ciri pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets adalah laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita, peningkatan produktivitas, laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, ekspansi Negara maju, dan arus barang, modal, dan orang antar bangsa” (Jhingan, 1999: 57-64).

Kemudian berkembang teori pertumbuhan ekonomi modern yang intinya adalah menekankan pentingnya akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital*). Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang berlanjuri hingga sekarang adalah model pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan Domar dalam Kartasasmita (1997:11). Menurut Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas capital (*capital output ratio*). Agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, masyarakat dalam suatu

perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, makin besar investasi, dan makin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1997:198-203). Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labour force) secara tradisional dianggap faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Dan kemajuan teknologi merupakan faktor yang penting karena teknologi bisa bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal dan juga bisa memperluas tenaga kerja atau perluasan modal.

Namun pengalaman menunjukkan pertumbuhan masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat pada lapisan paling bawah. Bahkan di beberapa Negara terjadi kesenjangan yang makin melebar. Oleh karena itu, berkembang pemikiran untuk mencari alternatif lain terhadap paradigma yang semata-mata memberi penekanan terhadap pertumbuhan, antara lain paradigma yang disebut sebagai paradigma pembangunan sosial yang tujuannya adalah menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mempelajari distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan berdasarkan kelas-kelas pendapatan dapat diukur dalam kurva Lorentz atau indeks *Gini*. Namun meski pembangunan harus berkeadilan, namun disadari bahwa pertumbuhan tetap penting. Akhirnya dikembangkan model yang disebut sebagai pemerataan dengan pertumbuhan atau *redistribution wealth grow* yang dikembangkan oleh Bank Dunia pada tahun 1974. Ide dasarnya adalah pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah (yang di banyak Negara berlokasi di pedesaan dan produsen kecil di perkotaan) akan mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan dan secara simultan menerima sumber ekonomi yang diperlukan.

Teori pembangunan selanjutnya mencoba menemukan faktor-faktor lain di luar modal dan tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Akhirnya teori ini berujung pada penemuan baru pada paradigma pembangunan ekonomi, yakni paradigma yang tidak hanya memandang pembangunan dari segi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, namun lebih lanjut menjadikan manusia sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan manusia ini menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan berumur panjang. Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik ini mempunyai empat unsur penting, yakni : (1) Peningkatan produktivitas, (2) pemerataan kesempatan, (3) kesinambungan pembangunan, dan (4) pemberdayaan manusia (Kartasasmita, 1997:18). Kemudian konsep ini ditunjang oleh United Nation Development Program (UNDP) untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan indikator komposit/gabungan yang terdiri dari tiga ukuran yakni kesehatan (*longevity*), pendidikan (*knowledge*), dan tingkat pendapatan riil (*living standards*).

Ada dua perspektif pembangunan perekonomian, yaitu responsive terhadap kebutuhan eksternal dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Blakely, 1989:81). Responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktik perencanaan yang banyak dianut. Responsive terhadap kebutuhan masyarakat lokal merupakan pendekatan baru yang baru naik daun. Adapun pengertian dari pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1997:274) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Adapun tujuan pembangunan

ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Sampai saat ini tidak ada satu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun, ringkasan dari teori-teori yang ada berusaha menyajikan bahwa pembangunan daerah dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, *entrepreneurship*, transportasi, komunikasi, struktur industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan (Arsyad, 1997:276).

Kemudian pengembangan teori mengenai pembangunan ekonomi daerah dimulai dari teori ekonomi Neo klasik yang memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

Teori selanjutnya adalah teori basis ekonomi yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Kemudian para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah, yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi. Pernyataan ini dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri yang cenderung meminimumkan biaya dengan memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya mendekati pasar. Namun keterbatasan dari teori ini adalah sekarang teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

Kemudian teori yang berkembang lagi adalah teori tempat sentral (*central place theory*) yang menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori ini bisa diterapkan dalam pembangunan ekonomi daerah. Beberapa daerah bisa

menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan yang lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

Kemudian dari teori-teori mengenai pembangunan ekonomi daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan sintesa dari perumusan kembali dari konsep-konsep pembangunan ekonomi daerah yang telah ada:

Tabel 2.2

Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep lama	Konsep baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan “kondisi penduduk daerah”
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Asset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya penegtahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Lincoln Arsyad, 1997

Dari teori mengenai pembangunan, sebelumnya masih ada perdebatan mengenai perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian khususnya perekonomian daerah. Akhirnya para ahli sependapat bahwa campur tangan pemerintah (terutama dalam perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi disamping mencegah jurang kemakmuran antardaerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Akhirnya, ahli merumuskan bahwa terdapat empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.

Dalam perannya sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Asset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis akan menguntungkan. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai *koordinator* untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Kemudian dalam peran pemerintah daerah sebagai *fasilitator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* di daerahnya. Hal ini mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik. Kemudian terakhir adalah peran pemerintah daerah sebagai *stimulator*, yakni pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah tidak akan terlepas dari peran pemerintah daerah itu sendiri yang pada kelanjutannya akan berkaitan dengan daya saing daerah.

2.2.4 Daya Saing Daerah

Dalam tinjauan literatur masih belum disepakati definisi daya saing baik tingkat nasional maupun regional dikarenakan adanya ambiguitas dalam penurunan konsep dari skala mikro ke skala makro. Sebagian besar orang memahami daya saing nasional sebagai fenomena makroekonomi yang dapat dilihat dari variabel kurs pertukaran, tingkat bunga, dan defisit pemerintah. Ada yang memahami daya saing sebagai fungsi dari tenaga kerja yang murah dan melimpah. Pandangan lain mengatakan bahwa daya saing bergantung pada sumber daya alam. Sementara sebagian besar berargumentasi bahwa daya saing sangat kuat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Adapun penjelasan yang cukup populer untuk arti daya

saing nasional adalah perbedaan dalam praktek manajemen. Sementara, Porter (1990) lebih mengartikan konsep daya saing nasional tidak lain adalah produktivitas nasional itu sendiri. Produktivitas sebagai nilai dari output yang diproduksi oleh unit kerja dan unit modal. Produktivitas merupakan akar dari pendapatan perkapita yang akan menentukan standar kehidupan suatu Negara/daerah.

Menurut Boltho (1996) dalam Tirtosuharto (2009), Konsep daya saing dalam tingkatan makro adalah kemampuan nasional atau daerah untuk memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa dalam ekonomi internasional, mencapai level pertumbuhan produktivitas tertinggi, dan meningkatkan pendapatan perkapita, menaikkan standar kehidupan, mencapai *equal distribution*, dan *economic sustainability*. Sedangkan dari perspektif mikro, Conti and Giaccaria (2001) mengatakan bahwa konsep daya saing mengarah pada kedinamisan tuntutan pasar global dan aspek kritis dari restrukturisasi perusahaan-perusahaan dan industri. Untuk menggerakkan barang dan jasa agar mampu bersaing di pasar internasional diperlukan kapasitas untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersedia pada tingkatan yang paling maksimum dan dengan dukungan dari inovasi dan dukungan teknologi. Hal yang ingin dibangun dari istilah kata daya saing ini adalah daya bersaing dan kekuatan melakukan persaingan, tetapi bukan diartikan sebagai persaingan atau rivalitas yang dimaknai sebagai untuk saling mengalahkan, menjatuhkan, atau menghancurkan.

Dari beberapa kata kunci mengenai daya saing diatas, Tirtosuharto dalam disertasinya yang berjudul *Regional Competitiveness in Indonesia: The Incentives of Fiscal Decentralization on State Efficiency and Economic Growth*, mendefinisikan daya saing daerah sebagai; *“The role of the state government in supporting firms and industries within its territory to gain success in global market competition through specific development policies or strategies, which lead to greater capacity to sustain growth and improve standards of living.”* (Daya saing daerah adalah peran pemerintah daerah dalam mendukung perusahaan-perusahaan dan industri-industri dalam suatu teritori untuk memperoleh kesuksesan di persaingan pasar global dengan sejumlah strategi dan kebijakan pembangunan yang spesifik, yang akan meningkatkan kapasitas bagi keberlanjutan pertumbuhan dan

peningkatan standar hidup). Sedangkan Franches (2011 : 62) merumuskan definisi daya saing dalam perspektif ekonomi internal daerah dan dimensi persaingan global dan mengartikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk dan atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk dan atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Secara makro, potensi ekonomi daerah biasanya juga menjadi salah satu indikator daya saing daerah tersebut. Hal itu karena potensi ekonomi suatu daerah akan ikut membentuk kompleksitas daya saing daerah. Daya saing daerah sendiri mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekadar potensi ekonomi, karena dalam konsep daya saing daerah juga termasuk aspek kelembagaan, iklim sosial, iklim politik, kebijakan pemerintah, manajemen dan sebagainya (Balitbang Kabupaten Riau, 2011).

Persaingan ini kini berkaitan dengan masalah ekonomi, khususnya bidang perdagangan, investasi, keuangan, dan teknologi. Karakteristik dari Negara berkembang dalam persaingan global memiliki posisi yang lemah dengan struktur ekonomi nasional yang masih lemah karena sebagian besar berbasis pada sektor pertanian dan perkebunan atau perikanan yang sifatnya *labour intensive* yang mempunyai nilai tambah yang rendah. Kemudian dari berbagai indikator ekonomi makro nasional seperti angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, utang, pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Kualitas SDM di negar berkembang juga masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menengah dan tinggi serta HDI (Indeks Pembangunan Manusia) internasional. Pertumbuhan dan proses industrialisasi Negara-negara sedang berkembang berjalan lambat, dan hal ini dapat dilihat dengan ; a). sangat sedikitnya jumlah wirausaha (dalam berbagai skala); dan b). sedikitnya jumlah pembayar pajak pribadi dan korporat untuk menambah sektor pendapatan nasional. Proses industrialisasi yang berjalan lambat diperparah dengan rendahnya penciptaan lapangan usaha dan

terbatasnya investasi asing yang masuk untuk membantu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Negara berkembang sering diliputi ketidakpastian hukum, berkembangnya perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan juga sering diikuti oleh ketidakstabilan sosial dan politik.



Gambar 2.1

Karakteristik Ekonomi Negara Berkembang Dan Persaingan Global

Sumber : Frinces, 2011

Sementara aspek diatas berjalan secara simultan, secara bersamaan, tuntutan publik akan kebebasan berdemokrasi, mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah, tuntutan ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik, dan jalannya roda pemerintahan memperparah kondisi internal Negara-negara berkembang untuk membangun ekonomi nasional dalam kondisi perubahan dan persaingan global.

Keunggulan daya saing daerah penting karena dua alasan. Pertama, untuk menyadari bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi tidak sepenuhnya tergantung pada kemampuan internal masing-masing organisasi. Ada tempat-tempat di mana orang atau organisasi lebih mudah menciptakan usaha yang kompetitif dibanding tempat lain. Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga berlaku untuk wilayah dalam suatu negara. Kedua, ada dua tipe keunggulan kompetitif yang harus dikenali, yaitu keunggulan kompetitif statis dan keunggulan kompetitif dinamis. Keunggulan kompetitif statis merujuk pada faktor lokasi geografis, sedangkan keunggulan kompetitif dinamis merujuk pada permasalahan

Universitas Indonesia

tenaga kerja (seperti upah, kualitas, kedisiplinan, dan produktivitas), iklim usaha, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap industri di daerah itu. Lokasi geografis merupakan faktor daya saing yang penting, tetapi hal tersebut juga dimiliki banyak daerah lain. Di samping itu ke depan kemajuan teknologi dan globalisasi lambat laun akan mengurangi signifikansi faktor lokasi. Dalam kondisi demikian, faktor-faktor lain seperti kualitas tenaga kerja dan iklim usaha akan menjadi keunggulan kompetitif yang penting terutama ketika di daerah lain hal itu merupakan masalah (Bappenas, 2004).

2.2.4.1 Penciptaan Daya Saing Daerah

Keunggulan bersaing tercipta karena adanya beberapa keunggulan komparatif. Oleh karena konsep daya saing awalnya ada pada sektor bisnis, maka berikut penciptaan daya saing dari perspektif bisnis. Adapun aspek-aspek yang mendorong lahirnya keunggulan komparatif menurut Frinces (2011, 73-77) adalah *pertama* dari manajemen dan kepemimpinan. Langkah awal untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi adalah melihat hasil yang telah dicapai organisasi bersangkutan. Kepemimpinan yang tangguh sangat penting karena dia merupakan motor penggerak utama organisasi untuk meningkatkan perbaikan kinerja organisasi perusahaan. *Kedua* adalah perencanaan. Keunggulan persaingan juga ditentukan oleh ketepatan dalam membuat perencanaan. Konsepsi *strategic planning* yang dikembangkan ilmu manajemen merupakan aspek penting dalam menyusun ketepatan perencanaan. Perlu diketahui bahwa perencanaan harus segera dimodifikasi atau dirubah sesuai dengan perubahan lingkungan yang membuat adanya terobosan atau rekayasa baru di berbagai hal, terutama menyangkut prioritas, strategi dan kebijakan serta pola organisasi. *Ketiga* adalah *entrepreneurship* SDM. Usaha melakukan perubahan dan perbaikan di dalam kinerja dan daya saing, organisasi bisnis perusahaan memerlukan personil yang dalam kesehariannya tertanam jiwa dan semangat kewirausahaan.

Penciptaan keunggulan kompartaif yang *keempat* adalah teknologi, kualitas, dan proses produksi. Dalam persaingan global, keunggulan suatu perusahaan akan langgeng bila terdapat muatan teknologi dalam proses produksinya untuk

menghasilkan produk yang berkualitas. *Kelima* adalah Porter's model yakni ; biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Porter mengajukan suatu konsepsi keunggulan biaya rendah secara keseluruhan, dan perlunya diferensiasi produk dan pasar dalam usaha meningkatkan kinerja bisnis, serta perlunya fokus pada konsumen, pasar, dan produk tertentu. *Keenam* adalah strategi bisnis yang jitu dan restrukturisasi organisasi. *Ketujuh* adalah perubahan inovatif. *Kedelapan* adalah kondisi lokal bisnis yang kondusif. *Kesembilan* adalah aliansi strategis. *Kesepuluh* adalah tersedianya suplai bahan baku yang cukup. *Kesebelas* adalah waktu yang tepat, dan ; *kedua belas* adalah proses inovasi.

Dari kajian proses penciptaan daya saing diatas dapat dicatat dua hal, yakni daya saing dapat diciptakan secara langsung dalam proses secara bertahap/gradual dengan waktu yang cukup panjang; daya saing juga dapat diciptakan secara tidak langsung oleh adanya perubahan sistem kemauan, kemampuan, dan keberanian dalam melakukan perubahan strategis. Adapun beberapa inisiatif dari langkah strategis untuk menciptakan daya saing daerah menurut Frinces (2011, 179-181) adalah :

1. Adanya kemauan politik yang kuat dari pimpinan dan pemerintahannya untuk menciptakan dan memperkuat daya saing. Kemauan politik ini sangat penting karena pemimpin merupakan aktor yang berpengaruh secara langsung untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk dapat meningkatkan daya saing daerah. Pemimpin juga berperan untuk meletakkan visi dan misi bagi terciptanya daerah yang berdaya saing.
2. Adanya kajian yang komprehensif tentang kondisi obyektif potensi dan kekuatan daerah dan kekuatan daya saing daerah.
3. Membuat tim kerja yang dapat memberikan masukan melaksanakan secara teknis koordinasi tentang penciptaan dan penguatan daya saing daerah.
4. Dibuatnya perencanaan strategis daerah yang secara jelas membangun berbagai keunggulan dan daya saing daerah. Perencanaan strategis pada dasarnya adalah perencanaan proaktif dan membentuk sistem masyarakat yang responsif dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah. Perencanaan strategis berorientasi ke depan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah. Disebut

strategis karena mengandung elemen kunci berupa penggunaan semua sumber daya daerah dengan perencanaan jangka panjang dan berskala besar (Kuncoro, 2012:21). Dalam membuat rencana strategis daerah harus memikirkan dua hal yang penting. Pertama adalah membuat rencana yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan masyarakat luas dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua adalah membuat rencana yang secara rasional mampu menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

5. Membuat anggaran yang cukup tinggi untuk membiayai program penciptaan dan penguatan daya saing daerah. Anggaran yang tinggi diperlukan karena penciptaan daya saing daerah merupakan proses kompleks yang melibatkan seluruh pihak, yakni pemda, masyarakat, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu didukung anggaran yang tinggi untuk tercapainya daya saing daerah.
6. Tersedianya dana pembangunan yang cukup. Setelah dibuat anggaran terkait dengan upaya penciptaan daya saing daerah, hal yang perlu dipastikan adalah tersedianya dana tersebut. Pendanaan pembangunan merupakan aspek penting untuk memenangkan persaingan. Selain dari dana pembangunan yang telah dianggarkan, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak swasta juga dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Mereposisi posisi strategis unit-unit organisasi dan memilih mereka yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun daya saing daerah dan memiliki kewirausahaan yang tinggi.
8. Secara sistematis meningkatkan kualitas SDM pemerintah daerah, (khususnya PNS) untuk berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi daerah dan secara khusus mendukung penguatan daya saing daerah lewat organisasi dimana mereka bekerja dan bertugas. Sumber daya manusia yang berkualitas secara umum dapat diciptakan oleh kondisi yang *favorable* bagi terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan yang unggul.
9. Melakukan berbagai perubahan strategis di dalam dan luar organisasi pemerintahan daerah untuk mendukung terciptanya daya saing daerah.

10. Meningkatkan keluaran (*output*) pendidikan yang kualitasnya setaraf dengan kualitas SDM dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia.
11. Membuat unit organisasi khusus yang menangani program penciptaan dan penguatan daya saing.
12. Melakukan koordinasi dan membangun sinergitas antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dalam membuat rumusan dan mengembangkan konsep penciptaan dan penguatan daya saing daerah.

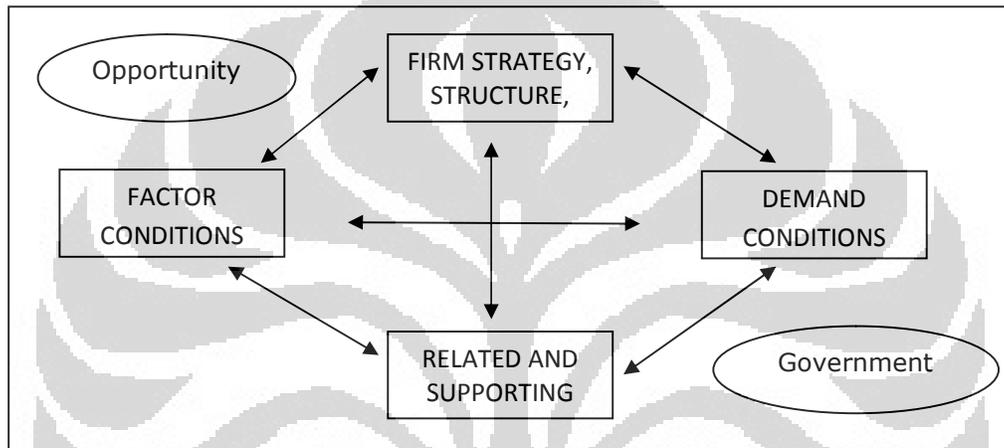
Pemerintah membangun berbagai keunggulan diantaranya yang berkaitan dengan menyediakan bahan baku, biaya produksi yang rendah, meningkatkan produksi yang menghasilkan nilai lebih yang lebih tinggi dengan membantu besarnya muatan teknologi dalam proses produksi, menghilangkan praktek – praktek KKN dan pungutan liar. Kemudian membangun infrastruktur yang mendukung , seperti kualitas dan jalur infratraktur yang bagus, lancarnya transportasi dan komunikasi, tersedianya energy (minyak, gas, listrik, dan batu bara) dengan baik dan lancar. Pemerintah juga perlu memperhatikan kinerja internal dalam pelayanan seperti cepatnya keputusan yang diambil pemerintah daerah, Pelayanan pemerintah yang cepat, baik, dan memuaskan.

Dalam menciptakan daya saing daerah pemerintah daerah tentu tidak terlepas dari hubungannya dengan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga mendukung bagi kelangsungan dunia usaha dengan melakukan beberapa upaya, seperti menyediakan lahan untuk produksi, mudah, dan murah, menyediakan suplai bahan kebutuhan konsumsi sehari-hari dengan cukup dan relatif murah serta mudah diperoleh. Selain itu, pemerintah daerah juga menciptakan daerah yang aman, tenang, dan dinamis dengan tingkat inflasi yang rendah.

Selain dukungan dalam ranah ekonomi, pemerintah daerah juga perlu menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Perlu adanya penegakan hukum dan perundang-undangan secara baik dan transparan serta adanya kepastian hukum, lingkungan yang bersih dan teratur. Para pengusaha diberikan kesempatan yang sama, adil, dan berimbang dan diajak untuk sama-

sama bertugas dalam membangun berbagai keunggulan daerah dan daya saing daerah.

Menurut Porter (1990) dalam bukunya yang berjudul *The Competitive Advantage Of Nations*, kesuksesan daya saing dari sebuah negara/daerah tidak terlepas dari peran industri. Lebih lanjut, Porter membuat konsep yang disebut “Diamond” yakni empat determinan yang menentukan daya saing yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.2

The Determinan Of National Advantage

Sumber: Porter, 1990

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa empat faktor penentu daya saing dan dua faktor penting yang mempengaruhi faktor penentu ialah faktor pemerintah dan peluang. Determinan pertama, *Factor Condition* adalah input yang penting untuk bisa bersaing. Suatu Negara atau bisa juga dalam lingkup daerah, memiliki faktor anugrah (*endowment*) seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya pengetahuan, sumber daya modal, dan infrastruktur yang dapat berkontribusi untuk kesuksesan industri nasional melalui strategi dan peningkatan inovasi. Keunggulan daya saing dari *factor condition* bergantung pada sejauhmana faktor-faktor tersebut dikerahkan secara efektif dan efisien.

Determinan kedua adalah *Demand Condition* (kondisi permintaan). Negara/daerah memiliki keunggulan daya saing dimana kondisi permintaan lokal

lebih bisa dibaca dan diidentifikasi oleh industri lokal dibanding dengan industri pesaing luar. Negara/daerah juga memiliki keunggulan daya saing apabila pembeli lokal memberikan tekanan lebih kuat agar industri lokal lebih berinovasi dan berdaya saing lebih cepat dibandingkan dengan pesaing. Karakteristik dari permintaan domestik yang penting bagi peningkatan keunggulan bersaing adalah komposisi permintaan, ukuran dan pola pertumbuhan permintaan, dan cara permintaan di Negara sendiri menarik produk dan jasa Negara itu ke pasar luar negeri.

Determinan ketiga adalah *Related and Supporting Industries* atau keterkaitan dan keberadaan industri pendukung. Keunggulan daya saing yang dimaksud oleh Porter berupa cluster, bukan industri semata. Cluster adalah perkiraan pengelompokan geografis dari sejumlah industri yang saling terkait kegiatannya dan terhubung dalam satu komunitas serta saling melengkapi. Menurut Kotler, et al dalam Syahresmita (2000 : 31-32) kehadiran industri-industri terkait dan pendukung dalam suatu bangsa merupakan salah satu dari determinan utama daya saing suatu bangsa. Kelompok industri mempunyai kaitan vertikal dan horizontal. Kaitan vertikal merupakan kaitan antara industri utama dan industri pendukung, sedangkan kaitan horizontal adalah kaitan antara industri utama dan industri-industri lainnya yang merupakan pelengkap terhadap teknologi atau pemasaran industri utama.

Determinan keempat adalah *Firm Strategy, Structure, and Rivalry* atau strategi, struktur, dan persaingan pada tingkat perusahaan. Pada beberapa industri, satu komponen untuk mencapai dan menjaga keberlanjutan keuntungan daya saing adalah menjaga keberlanjutan investasi, komponen lainnya adalah komitmen dan usaha (Porter, 1990: 110). Selain itu juga keunggulan daya saing bisa dicapai bila persaingan yang terjadi adalah persaingan lokal/domestik dibandingkan dengan persaingan dengan pesaing luar. Persaingan domestik membuat industri tetap dinamis dan terus menerus memberi tekanan pada perbaikan kualitas dan inovasi. Industri yang telah teruji dalam persaingan domestik yang ketat menyebabkan industri tersebut akan lebih kuat untuk memenangkan persaingan di pasar internasional.

Faktor penting yang mempengaruhi keempat determinan diatas adalah faktor peluang dan pemerintah. Peluang atau kesempatan adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali perusahaan, industri, dan biasanya pemerintah. Kondisi yang merupakan kesempatan antara lain: perang dan pasca perang, terobosan besar dalam teknologi, pergeseran secara tiba-tiba dan dramatis biaya faktor atau biaya masukan (input) seperti krisis minyak, perubahan dramatis dalam kurs mata uang, dan sebagainya.

Kemudian faktor penting lainnya adalah faktor pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kondisi permintaan secara tidak langsung melalui kebijakan moneter dan keuangan. Pemerintah mempengaruhi berbagai sumber daya melalui kebijakan yang menyangkut tenaga kerja, pendidikan, pembentukan modal, sumber daya alam, dan standar produk. Pemerintah dapat memperbaiki atau menurunkan keunggulan bersaing suatu industri, tetapi pemerintah tidak dapat menciptakan keunggulan bersaing tersebut. Walaupun demikian, di Negara manapun peran pemerintah sangat diperlukan, bahkan di Negara maju peran pemerintah tetap dibutuhkan walaupun sistem ekonomi dan sosial sangat berorientasi pasar. Di Negara berkembang, peran pemerintah dalam pembangunan termasuk di sektor industri sangat mempengaruhi lingkungan, dimana dapat berakibat pada meningkat atau menurunnya keunggulan daya saing suatu industri, walaupun secara bertahap campur tangan pemerintah secara langsung diharapkan dapat dikurangi. Dengan arti kata dalam proses pertumbuhan ekonomi, tugas utama pemerintah adalah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif (Syahresmita, 2000:99).

Berdasarkan kajian dari Bappenas (2005:28) untuk mengembangkan suatu wilayah yang berdaya saing, setidaknya tujuh faktor kunci yang perlu diperhatikan yaitu: **a). Sumberdaya Manusia.** Faktor SDM dibedakan kedalam dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas meliputi kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan serta lembaga yang memfasilitasinya. Aspek kualitas meliputi upaya fasilitasi dan penciptaan keahlian (*expertise*); **b). Aksesibilitas terhadap masukan.** Faktor ini merupakan aspek dasar dalam pengembangan wilayah, terdiri dari pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur fisik, lembaga penyedia, pelayanan), sumberdaya modal (lembaga penyedia, jenis modal, pelayanan), dan *input raw material* (lembaga penyedia, jenis input); **c). Jaringan.** Faktor ini terdiri

dari jaringan kerja/jejaring yang melibatkan baik antar daerah dalam satu propinsi, antara pusat-propinsi kabupaten, antar pengusaha, antara pemerintah-pengusaha, atau antarpemerintah-masyarakat-LSM-swasta, dan pengembangan keterkaitan antar sektor/komoditi (input-output); **d). Iklim Usaha.** Faktor ini terdiri dari pengembangan regulasi yang meliputi kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada pengurangan hambatan untuk iklim usaha, seperti halnya kebijakan fiskal, insentif, dan peraturan perundangan lainnya, beserta penegakan hukumnya, serta keberadaan *leadership* baik dalam pemerintahan maupun pemimpin pasar; **e). Aksesibilitas terhadap pasar.** Faktor ini merupakan orientasi dari pengembangan wilayah yang berdaya saing, terdiri dari pengembangan pusat-pusat pasar (outlet) serta pengembangan *market research* dan jaringan pasar (akses informasi dan faktor produksi) ; **f). Penelitian dan Pengembangan.** Faktor ini merupakan tulang punggung dari pengembangan produk yang berdaya saing, meliputi aspek teknologi produksi dan aspek informasi/pengetahuan. Aspek teknologi produksi meliputi pengembangan lembaga-lembaga riset, pengembangan jenis-jenis teknologi, serta pemanfaatannya, dan ; **g). Sosial Budaya.** Faktor ini merupakan pendorong keberhasilan peningkatan daya saing yang terdiri dari nilai-nilai budaya yang berorientasi pembangunan serta adanya Konsensus dasar dalam masyarakat akan pembangunan industri dan kesiapan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam pasar global.

Di Indonesia sendiri telah banyak dilakukan pengukuran dan pemeringkatan daya saing daerah, salah satunya adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2005) dengan menggunakan rumus penghitungan peringkat daya saing yang dikembangkan oleh VNCI (USAID). Peringkat daya saing daerah dinilai berdasarkan enam parameter utama yang masing-masing parameter dibangun dari beberapa variabel yang menggambarkan parameter tersebut. Enam kelompok parameter ini memiliki indeks masing-masing yang kemudian dirata-ratakan menjadi indeks daya saing daerah. Enam parameter tersebut adalah (i) lingkungan peraturan, (ii) dinamika bisnis, (iii) formalisasi usaha, (iv) akses ke permodalan, (v) lingkungan usaha, dan (vi) infrastruktur.

Parameter untuk menilai kondisi lingkungan peraturan terdiri dari empat variabel yaitu jumlah Peraturan daerah (Perda) terkait pajak daerah, terkait

retribusi, terkait lalu lintas barang dan Perda terkait perijinan. Penilaian terhadap parameter dinamika usaha menggunakan enam variabel yakni usia dan perkembangan skala usaha, penggunaan teknologi, ekspansi pasar dan upaya efisiensi. Penilaian formalisasi usaha didasarkan atas kondisi kemudahan dalam pengurusan formalisasi usaha dan tingkat kepemilikan ijin usaha dan badan hukum usaha yang mendukung untuk daya saing pengembangan usaha.

2.2.4.2 Daya Saing Investasi Daerah

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Bagi seorang investor yang hendak melakukan suatu investasi, harus melakukan suatu analisis terlebih dahulu dalam menentukan keputusan investasinya. Untuk melakukan suatu analisis investasi, setidaknya ada tiga faktor yang harus dianalisis, yaitu: analisis kondisi makroekonomi, analisis pada jenis industri, dan analisis fundamental suatu perusahaan. Keputusan untuk berinvestasi di suatu daerah akan sangat tergantung pada ketiga faktor diatas. Suatu daerah akan menjadi pilihan untuk berinvestasi bila daerah tersebut memiliki keunggulan yang menarik dibandingkan daerah lain dalam bidang investasi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. KPPOD dibentuk tahun 2000 oleh dunia usaha, para wartawan, dan peneliti yang dimaksudkan untuk memantau dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian KPPOD pada tahun 2005 adalah penilaian daya saing investasi daerah dengan menggunakan lima faktor, yakni:

1. Faktor institusional, mengacu pada kualitas lingkungan kebijakan legal untuk mempengaruhi dunia bisnis.
2. Faktor keamanan dan sosial politik, yakni usaha menciptakan lingkungan yang aman bagi individu dan bisnis serta kualitas pembuatan kebijakan lokal seperti keharmonisan sosial dan keterbukaan .

3. Faktor ekonomi, mengukur struktur dan potensi ekonomi lokal.
4. Faktor tenaga kerja, termasuk produktivitas dan pendidikan tenaga kerja.
5. Faktor infrastruktur, seperti ketersediaan dan kualitas transportasi, listrik, dan fasilitas komunikasi.

Dari kelima faktor tersebut kemudian diturunkan menjadi 14 variabel dan 47 indikator untuk menganalisis daya saing investasi pada daerah di Indonesia. Berikut diagram yang menggambarkan hirarki dari penurunan lima faktor tersebut:



Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2005

Penciptaan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing membuat investasi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi mengidentifikasi empat faktor yang menjadi penghambat investasi di Indonesia. Faktor pertama adalah masalah hukum dan implementasi dari peraturan yang berkaitan dengan investasi. Faktor kedua adalah masalah yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan investasi, misalnya pajak, bea cukai, masalah ketenaga kerjaan, dan desentralisasi. Faktor ketiga adalah persoalan penyediaan infrastruktur, dan yang terakhir adalah masalah kebijakan industri dan perdagangan (Hasan dan Purwanto, 2006:218).

Daya saing yang rendah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta iklim investasi yang tidak sehat dan tidak kompetitif. World Economic Forum (WEF, 2005) menggunakan tiga komponen dalam mengukur daya saing, yaitu

Universitas Indonesia

indeks teknologi, indeks institusi publik, dan indeks kondisi makroekonomi. Survey yang dilakukan oleh WEF mengukur interaksi antarempat faktor kompetitif yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pembentukan daerah otonom baru dimaksudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Menurut Frinces (2011:83) terdapat keterkaitan yang erat dan pengaruh yang besar antara persaingan bisnis global dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Daya saing yang rendah akan mengakibatkan stagnasi dalam pembangunan yang pada akhirnya akan menghasilkan tingginya pengangguran, suku bunga, inflasi, dan rendahnya daya beli masyarakat yang berarti rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, menurunnya kualitas pendidikan yang akan berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, dalam pembentukan daerah otonom baru penting pula untuk melihat prospek ekonomi daerah untuk menciptakan daya saing daerah. prospek ekonomi tersebut berupa jumlah penduduk, PDRB, pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Daerah Sendiri, Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata jarak dari tiap kecamatan ke pusat pemerintahan, dan Rata-rata waktu tempuh dari tiap kecamatan ke pusat pemerintahan.

Prospek pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labour force*) secara tradisional dianggap faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik (Arsyad, 1997:199). Kemudian untuk membentuk daerah otonom baru menurut I Made Suwandi (2009:164) syarat potensi ekonominya harus riil yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Hal ini juga sesuai dengan teori pemerataan pembangunan yang diprakarsai oleh Bank Dunia dengan konsep yang disebut *redistribution wealth grow* yang artinya bahwa perlunya melihat distribusi pendapatan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kemudian indikator dari pembangunan juga dapat dilihat

dari IPM daerah. IPM merupakan konsep dalam paradigma pembangunan yang menekankan pentingnya peran manusia yang tak lain merupakan tujuan utama dari pembangunan itu sendiri (Kartasasmitha, 1997:17-18). Dalam konteks pembangunan terutama bagi daerah otonom baru penting pula untuk membahas rata-rata waktu tempuh dari tiap kecamatan ke pusat pemerintahan karena hal tersebut merepresentasikan tujuan pembentukan daerah otonom baru yakni untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan variabel daya saing investasi daerah mengacu pada elaborasi dari teori determinan daya saing oleh Porter (1990), faktor kunci daya saing dari Bappenas (2005) dan analisis faktor daya saing investasi daerah oleh KPPOD (2005). Porter (1990) menekankan bahwa daya saing dipengaruhi oleh empat faktor yakni *Factor Condition, Demand Conditions, Related and Supporting Industries,* dan *firms strategy*. Bappenas (2005:28) menyatakan bahwa terdapat tujuh kunci untuk menciptakan daya saing daerah yakni sumber daya manusia, aksesibilitas terhadap input, jaringan, iklim usaha, aksesibilitas terhadap pasar, penelitian dan pengembangan, dan faktor sosial budaya. Kemudian hasil kajian dari KPPOD (2001-2005) menegaskan bahwa untuk menilai daya saing investasi ditentukan dari faktor institusional, faktor keamanan dan sosial politik, faktor ekonomi, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur. Dengan demikian, maka operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Operasionalisasi konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Sumber Data	
					Primer	Sekunder
Elemen prakondisi pembentuk an daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah.	Prakondisi	Kependudukan	1. Jumlah penduduk	- (tidak ada)	- (tidak dicari)	Studi data statistik dan observasi
		Kemampuan ekonomi	1. PDRB	- (tidak ada)		
			2. Pertumbuhan ekonomi	- (tidak ada)		
		Kemampuan keuangan	1. Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)	- (tidak ada)		
		Tingkat kesejahteraan masyarakat	1. IPM	- (tidak ada)		
		Rentang Kendali/ akses pelayanan	1. Rata-rata jarak tiap kecamatan ke pusat pemerintahan	- (tidak ada)		
	2. Rata-rata waktu perjalanan tiap kecamatan ke pusat pemerintahan		- (tidak ada)			
Daya saing	<i>Factor condition</i>	- Sumber daya	- Jumlah PNS.	Survey	Studi	

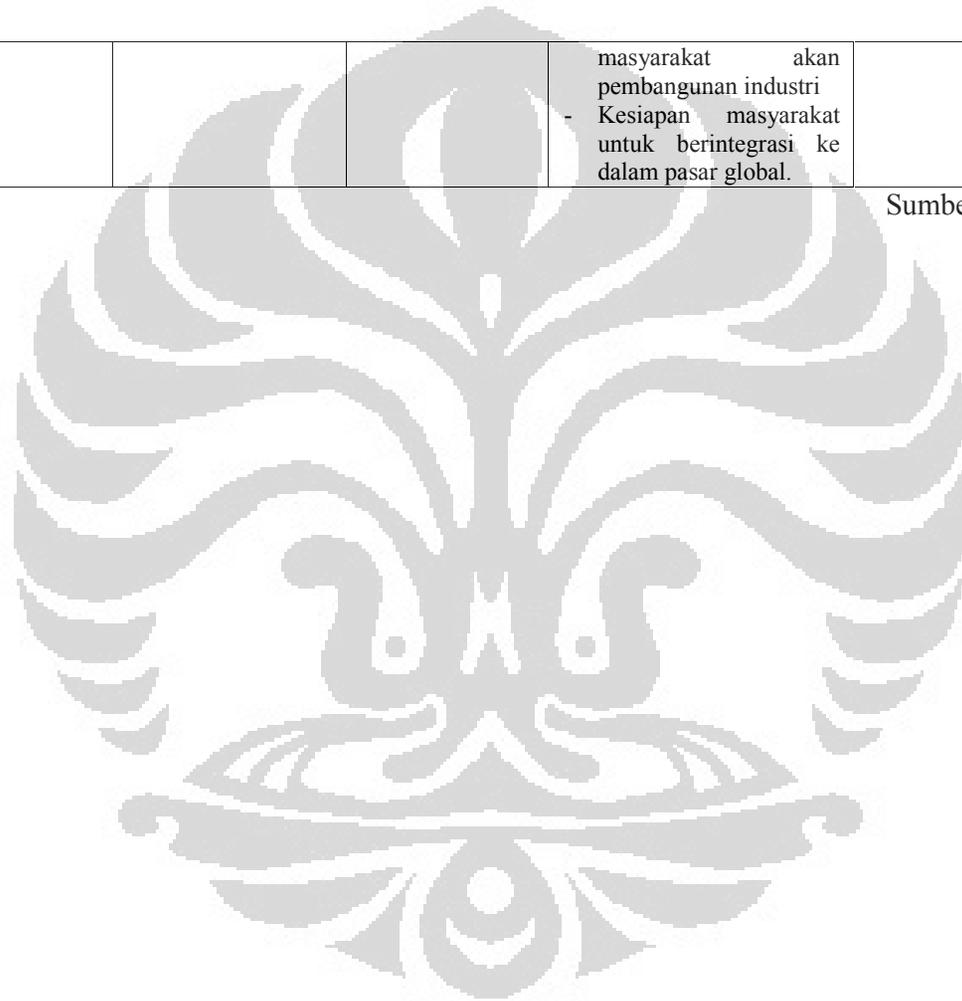
Universitas Indonesia

investasi			manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM - Jumlah tenaga kerja. - Biaya tenaga kerja . 		dokumen dan wawancara mendalam		
			- Sumber daya modal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga penyedia modal. - Akses ke permodalan. 				
			- Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan. - Kualitas jalan. - Ketersediaan transportasi. - Ketersediaan listrik. 				
			<i>Institutional factor</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan daerah (Perda) (<i>Local Governemnt Policies</i>) 			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peraturan daerah (Perda) terkait pajak daerah. - Jumlah Peraturan daerah (Perda) terkait retribusi daerah. - Jumlah Peraturan daerah (Perda) terkait perijinan. - Kebijakan lain terkait dengan iklim usaha. 	
			- <i>Apparatus and Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga/badan/kantor yang memberikan pelayanan terkait dengan investasi dan dunia usaha. 			<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelayanan lembaga/badan/kantor 	

				yang memberikan pelayanan terkait dengan dunia usaha.	
			- Kepemimpinan lokal	- Komitmen dan perhatian pemimpin daerah terhadap dunia usaha.	
		Ekonomi lokal	- Struktur ekonomi	- Penggunaan teknologi. - Ekspansi pasar. - Jaringan kerja antara pemerintah-pengusaha, atau antarpemerintah-masyarakat-LSM-swasta.	
			- Permintaan lokal	- Pengembangan pusat-pusat pasar. - Pengembangan <i>market research</i> . - Jaringan pasar (akses informasi dan faktor produksi).	
			- <i>Related and Supporting Industries</i>	- Jumlah Kluster industri	
		Sosial, politik, budaya, dan keamanan.	- Keamanan	- Usaha menciptakan lingkungan yang aman bagi individu dan bisnis.	
			- Sosial budaya	- Nilai-nilai budaya yang berorientasi pembangunan - Konsensus dasar dalam	

				masyarakat akan pembangunan industri - Kesiapan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam pasar global.		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012



Universitas Indonesia

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat, 1997:7). Metode penelitian merupakan tahap yang penting untuk menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya sehingga dengan adanya metode penelitian, maka suatu penelitian dapat dikerjakan dengan sistematis dan teratur. Para peneliti dapat memilih berbagai jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Prosedur, alat, dan desain tersebut harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan agar penelitian dapat dilakukan sesuai prosedur yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian lebih berbicara mengenai bagaimana cara peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial, yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar dari ilmu sosial (Prasetyo dan Jannah, 2005:18). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif perlu dimiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, mencegah timbulnya bias-bias, mengontrol penjelasan-penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan menerapkan kembali penemuan-penemuannya (Creswell, 2010:5). Dalam penelitian ini dianalisis elemen-elemen prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah di Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini peneliti bedakan berdasarkan tujuan, manfaat, waktu, dan keberadaan tindakan intervensi.

3.2.1 Berdasarkan tujuan

Penelitian ini termasuk pada penelitian eksplanasi, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskriptif-analitik. Tidak hanya sebatas deskripsi, tetapi juga terdapat analisis yang dilakukan guna menciptakan hasil penelitian yang mampu mengatasi probematika yang ada pada penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini digambarkan prakondisi pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan daya saing investasi.

3.2.2 Berdasarkan manfaat

Dari segi manfaat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian murni cenderung berorientasi akademik dan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005:37). Penelitian murni menjelaskan pengetahuan yang amat mendasar mengenai dunia sosial. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis (Nawawi, 1985:30) mengenai prakondisi pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan daya saing investasinya sebagai suatu fenomena tertentu dalam praktik otonomi daerah di Indonesia khususnya di kabupaten Bandung Barat.

3.2.3 Berdasarkan waktu

Penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*, yakni metode pengumpulan data di mana informasi yang dikumpulkan hanya pada suatu saat tertentu (Ronny, 2004). Penelitian ini dilaksanakan pada 1 Februari-30 Maret 2012 di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dirancang secara *ex post-facto* yang variabel-variabelnya telah terjadi secara apa adanya tanpa intervensi dalam bentuk manipulasi apa pun.

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu pencatatan dari peristiwa-peristiwa atau karakteristik sebagian atau keseluruhan dari elemen populasi yang menunjang suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif melalui:

a. Studi Data Statistik dan Dokumen

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa dokumen maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, majalah, yang sifatnya dokumentasi (Masri, 1989). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah studi data statistik dan dokumen yang dihimpun dari badan/lembaga terkait dengan data prakondisi pembentukan daerah dan daya saing investasi. Dalam teknik ini dikumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh lembaga pemerintah seperti Bappeda, BPPMPT, dan lain-lain, serta berbagai laporan penelitian sebelumnya.

b. Wawancara Mendalam

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Soeharto, 1995). Data primer ini didapatkan melalui studi lapangan. Dalam studi lapangan ini, dilakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan sumber penilaian dalam rangka menganalisis prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam yang akan digunakan untuk memperkaya hasil interpretasi data.

Pertanyaan yang diajukan berpedoman pada operasionalisasi konsep yang telah digambarkan sebelumnya. Dengan demikian, pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

1. Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk menggali informasi terkait dengan proses pembentukan daerah otonom baru, terutama gambaran komprehensif mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan daerah otonom baru.
2. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat. Bappeda menjadi narasumber dalam penelitian ini dikarenakan Bappeda adalah salah satu aktor yang berpengaruh pada awal pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Bappeda juga adalah badan yang memiliki andil besar

dalam merencanakan perekonomian daerah Kabupaten Bandung Barat ke depan, terutama dalam segi peningkatan investasi daerah.

3. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat (BPMPT) adalah badan yang berwenang dalam memberikan pelayanan terkait dengan penanaman modal (investasi) dan perijinan usaha. Oleh karena itu, kebutuhan data dan pelayanan yang diberikan oleh badan ini merupakan sumber bagi analisis penelitian.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (Disperindagkop dan UMKM) Kab. Bandung Barat (KBB) adalah badan yang berperan terkait dengan pengaturan dunia industri, perdagangan dan usaha lain. Dari wawancara dengan disperindagkom dapat dilihat gambaran kontribusi industri, perdagangan, dan usaha yang menunjang daya saing daerah Kabupaten Bandung Barat.

c. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti harus melibatkan semua panca inderanya. Peneliti harus mampu mengetahui suatu kejadian baik yang terlihat nyata maupun yang tidak. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi riil yang ada di lapangan karena lebih akurat untuk melihat keadaan nyata kabupaten Bandung Barat dibanding hanya membaca data yang sudah ada. Observasi penelitian dilakukan dari mulai awalnya penelitian, yakni dari tanggal 1 Februari 2012- 30 Maret 2012. Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan langsung terhadap kondisi kabupaten Bandung Barat, yakni dari peneliti mengunjungi kantor pemerintahan kabupaten, mengelilingi beberapa kecamatan di kabupaten Bandung Barat, juga mengamati keadaan pelaku usaha tradisional. Adapun informasi yang didapat dari hasil observasi adalah, pertama dari pengamatan terhadap PNS kabupaten Bandung Barat, peneliti melihat bahwa etos kerja sudah ada, namun masih banyak PNS yang pada jam kerja malah mengobrol dan tidak bekerja. Namun, dari segi keramahan, PNS kabupaten Bandung Barat cenderung ramah dan bersikap membantu. Kedua adalah dari segi infrastruktur, secara umum

infrastruktur jalan raya sudah baik dan sarana transportasi juga sudah menjangkau kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Ketiga, terdapat perbedaan data yang diberikan oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti mendapat informasi dari pelaku usaha di Cililin bahwa pelaku usaha yang sampai saat ini melakukan usaha ada 15 pengrajin wajit, berbeda dengan data yang diberikan oleh dinas, yakni sebanyak 50 pengrajin wajit.

d. Survei

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Soeharto, 1995). Survei adalah penelitian yang mengumpulkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang merupakan pengukuran dari variabel yang diteliti, serta menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data secara survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai variabel daya saing investasi daerah. Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian survei adalah kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mengukur variabel, menetapkan kategori-kategori jawaban, dan mengorganisasikan bagian-bagian pertanyaan. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan mendistribusikan kuesioner maupun dengan melakukan wawancara lisan yang hasilnya direkam untuk mendapatkan gambaran daya saing investasi para pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat. Data yang diperoleh dari sampel lalu digeneralisasikan pada kelompok yang lebih besar. Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 11-17 Maret 2011 berlokasi di kecamatan Cililin, kabupaten Bandung Barat.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam menunjang sebuah penelitian diperlukan objek penelitian. Objek penelitian ini menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang diteliti. Karakteristik ini dibutuhkan oleh peneliti yang berguna dalam penelitiannya.

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). Penelitian populasi dilakukan apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam satu wilayah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah seluruh sentra usaha yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sentra usaha di kabupaten Bandung Barat dianggap dapat memberikan gambaran daya saing daerah dan memberikan penilaian atas usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan daya saing daerahnya.

Tabel 3.1

Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012

o	Sektor Usaha	Lokasi (Kecamatan)
.	Arsitektur	Padalarang, Prongpong, Cikalongwetan
.	Pasar barang seni	Parongpong
.	Kerajinan	Padalarang, Ngamprah, Batujajar, Parongpong, Cihampelas, Cikalongwetan, Cipatat, Lembang, Gununghalu, Cisarua, Cipendeuy, Cipongkor, Cililin
.	Desain	Lembang, Cikalongwetan, Padalarang
.	Fesyen	Parongpong, Lembang, Padalarang
.	Kuliner	Padalarang, Ngamprah, Batujajar, Parongpong, Cihampelas, Cikalongwetan, Cipatat, Lembang, Gununghalu, Cisarua, Cipendeuy, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, 2012

Dalam menentukan batasan populasi, terdapat kriteria isi, cakupan, dan waktu yang harus dipenuhi (Prasetyo dan Jannah, 2005:119). Populasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

Isi : Pelaku usaha

Cakupan : Sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat

Waktu : 11 – 17 Maret 2012

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti yang mewakili karakteristik dari populasi. Oleh karena itu sampel dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang tersebar dalam sentra-sentra industri di Kabupaten Bandung Barat yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2009:300) adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Dari tabel 3.1 UMKM yang cenderung homogeny, akhirnya diambil sentra ekonomi kreatif kuliner, yakni sentra wajit di kecamatan Cililin sebagai sampel yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada seluruh pemilik pabrik rumahan wajit Cilin yang keseluruhannya berjumlah 15 pengrajin. Namun ditekankan dalam penelitian ini yang menjadi fokus responden adalah pelaku usaha UMKM yang diasumsikan homogeny dan menggambarkan dunia usaha UMKM di kabupaten Bandung Barat.

3.4.3 Karakteristik Responden

Dari penyebaran kuesioner kepada 15 pelaku usaha, berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan usia usaha.

3.4.3.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.2

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	9	60%

Perempuan	6	40%
Total	15	100%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin lakik-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin disini tidak untuk mengukur gender mana yang lebih banyak dalam melakukan wirausaha, melainkan untuk membedakan saja.

3.4.3.2 Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 3.3

Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	Persentase
17 - 25	1	6.7%
26 - 35	2	13.3%
36 - 55	6	40%
56 - 65	2	13.3%
< 65	4	26.7%
Total	15	100%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden ada di usia antara 36-55 tahun. Usia ini termasuk usia produktif dalam dunia usaha. Dari tabel 3.3 juga dapat dilihat bahwa terdapat empat responden yang usianya sudah diatas 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha juga masih digeluti oleh pelaku usaha yang usianya dapat dikatakan sudah tidak produktif lagi. Namun, mengingat usaha ini merupakan usaha yang turun temurun, sehingga usia senja tidak membuat pelaku usaha berhenti melakukan usaha.

3.4.3.3 Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

Tabel 3.4

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

Jenjang pendidikan	Frekuensi	Persentase

Universitas Indonesia

Tidak Tamat SD	1	6.7%
Tamat Sekolah Dasar (SD / MI)	3	20%
Tamat SMP / Mts	4	26.7%
Tamat SMA/ SMK / MA	6	40%
D3	1	6.7%
Total	15	100%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah menamatkan jenjang pendidikan sampai SMA dan sederajat. Kemudian disusul dengan sebagian yang tamat SMP dan sederajat. Dan dari tabel juga terlihat bahwa hanya satu responden yang menempuh pendidikan D3 dan ada satu responden yang bahkan tidak tamat SD. Sedikitnya responden yang menempuh pendidikan tinggi dikarenakan usaha ini tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi, terutama karena pelaku usaha ini umumnya melanjutkan usaha yang sudah turun temurun dalam keluarganya.

3.4.3.4 Karakteristik responden berdasarkan usia usaha

Tabel 3.5

Karakteristik responden berdasarkan usia usaha

Usia usaha	Frekuensi	Persentase
1 - 5 tahun	2	13.3
5 - 10 tahun	1	6.7
10 - 20 tahun	4	26.7
< 20 tahun	8	53.3
Total	15	100.0

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar usia usaha pengrajin sudah lebih dari 20 tahun. Hal ini dikarenakan pada umumnya usaha UMKM di Cililin merupakan usaha yang turun temurun. Sedangkan usia usaha yang kurang dari 10 tahun adalah pelaku usaha yang memulai dari nol usahanya, yakni biasanya bermula dari menjadi pekerja pada perusahaan lainnya, kemudian membentuk usaha sendiri.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik untuk mengolah dan menganalisis data yang tepat sangat diperlukan agar data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipercaya (Husein, 1998:231). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Penelitian ini mendeskripsikan prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi di kabupaten Bandung Barat.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah pendekatan di dalam mencari kebenaran/kevalidan, sebagai suatu cara bagi peneliti untuk mengkonseptualisasikan ide-ide pemikirannya dalam bentuk definisi konseptualisasi (Neuman, 2003:179). Tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk, dimana penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk pengukurannya. Proses pencarian validitas dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 13. Langkah yang dilakukan untuk mengukur validitas adalah dengan menggunakan *factor analysis* pada bagian *data reduction*. Reduksi dilakukan dengan cara melakukan analisis faktor pada masing-masing indikator. Peneliti menggunakan standar nilai validitas sebesar 0,700 sesuai dengan Result Coach of SPSS. Nilai ini merupakan factor loading yang diharapkan untuk component matrix, yaitu diatas 0,700. Dengan nilai ini, pernyataan-pernyataan nilai validitas dibawahnya tidak akan dijadikan sebagai pernyataan dalam penyebaran kuesioner.

Reliabilitas diartikan sebagai suatu sikap konsisten atau dapat diandalkan (Neuman, 2003:179). Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dalam rangka melihat sejauh mana instrument yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu kuesioner, dapat diandalkan untuk menjawab penelitian. nilai batas reliabilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha yang biasanya dapat diterima adalah diatas 0,500.

Adapun pengukuran validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan pada 15 kuesioner yang terisi. Peneliti telah mengukur validitas dan reliabilitas pada masing-masing dimensi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Dimensi factor condition : 0,560

Tabel 3.6
Dimensi Factor Condition

Indikator	Anti image matrices	Communal ities	Komponen matrix
Kualitas PNS	0,613 ^a	0,748	0,809
Kemudahan akses ke permodalan	0,584 ^a	0,867	0,928
Kualitas infrastruktur jalan	0,543 ^a	0,761	0,685
Kualitas infratraktur transportasi	0,633 ^a	0,559	0,441
Upah mengikuti UMR	0,331 ^a	0,603	0,718

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari dimensi factor condition, indikator yang validitasnya memenuhi komponen yakni yang memiliki component matrix diatas 0,7 kemudian reliabilitas diatas 0,5 pada nilai Crobach alpha anti image matrices diatas 0,5, adalah indikator kualitas PNS, kemudahan akses ke permodalan, dan kualitas infrastruktur jalan.

2. Dimensi institusional factor : 0,500

Tabel 3.7
Dimensi Institusional Factor

Indikator	Anti image matrices	Communal ities	Komponen matrix
Perhatian dari pemimpin daerah	500 ^a	0,770	0,877
Kualitas lembaga yang memberi pelayanan	500 ^a	0,770	0,877

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Indikator institusional faktor yakni perhatian dari pemimpin daerah dan kualitas lembaga yang memberi pelayanan telah memenuhi nilai validitas diatas 0,7 pada component matrix dan 0,5 pada crobach alpha, sehingga dua indikator ini dapat dipakai untuk mengukur dimensi institusional factor.

3. Dimensi ekonomi lokal :

Tabel 3.8
Dimensi Ekonomi Lokal

Universitas Indonesia

Indikator	Anti image matrices	Communal ities	Komponen matrix
Mudah mengurus ijin usaha	0,476 ^a	0,809	0,654
Usaha mengalami perkembangan skala usaha	0,415 ^a	0,917	0,743
Usaha menggunakan teknologi	0,452 ^a	0,610	0,760
Usaha memperluas pasar interlokal, nasional, internasional	0,507 ^a	0,753	0,863
Terdapat jaringan kerja pelaku usaha dan pemerintah	0,461 ^a	0,643	0,863
Pemerintah membantu mengembangkan pasar	0,688 ^a	0,409	0,575
Usaha melakukan penelitian terhadap pasar	0,569 ^a	0,493	0,567
Usaha mengalami perkembangan usaha	0,452 ^a	0,808	0,639
Ada jaringan pasar yang memberi akses informasi	0,555 ^a	0,401	0,668

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari dimensi ekonomi lokal yang memenuhi validitas diatas 0,7 adalah indikator usaha mengalami perkembangan usaha; usaha menggunakan teknologi; usaha memperluas pasar interlokal, nasional, internasional; terdapat jaringan kerja pelaku usaha dan pemerintah. Sedangkan yang memenuhi unsur reliabilitas adalah indikator Usaha memperluas pasar interlokal, nasional, internasional; Pemerintah membantu mengembangkan pasar; Usaha melakukan penelitian terhadap pasar; Ada jaringan pasar yang memberi akses informasi. Namun, dengan mempertimbangkan keseluruhan indikator diatas penting untuk mengukur ekonomi lokal, maka peneliti memutuskan untuk tetap menggunakan indikator-indikator diatas.

4. Dimensi sosial, budaya, keamanan : 0,557

Tabel 3.9

Dimensi sosial, budaya, keamanan

Indikator	Anti image matrices	Communal ities	Komponen matrix
Pemerintah menciptakan lingkungan aman bagi dunia bisnis	0,265 ^a	0,852	0,907
Ada etos kerja berwirausaha	0,527 ^a	0,633	0,680
Ada kesepakatan bisnis	0,522 ^a	0,787	0,853

Universitas Indonesia

Memiliki kesiapan bersaing	0,494 ^a	0,893	0,910
----------------------------	--------------------	-------	-------

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari dimensi sosial, budaya, keamanan, yang memenuhi validitas yakni komponen matrix diatas 0,7 adalah indikator pemerintah menciptakan lingkungan aman bagi dunia usaha, adanya kesepakatan bisnis, dan usaha memiliki kesiapan bersaing.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Dalam peraturan pemerintah mengenai persyaratan pembentukan daerah otonom baru, terdapat banyak syarat untuk meluluskan suatu daerah menjadi daerah otonom baru. Sejumlah syarat tersebut mencakup syarat teknis, administratif, dan fisik kewilayahan. Fokus penelitian ini adalah pada syarat teknis yang terdiri dari syarat kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali. Namun berhubung penelitian ini menggambarkan prakondisi dan daya saing daerah, maka penelitian ini tidak menggunakan sejumlah syarat pembentukan daerah otonom baru tersebut diatas. Oleh karena itu, dipilih faktor pembentukan daerah otonom baru yang terkait dengan pembangunan perekonomian daerah. Akhirnya untuk variabel prakondisi, diambil indikator kependudukan berupa jumlah penduduk, indikator kemampuan ekonomi berupa PDRB dan pertumbuhan ekonomi, indikator kemampuan keuangan berupa pendapatan asli sendiri (PADS), indikator tingkat kesejahteraan masyarakat berupa IPM, dan indikator rentang kendali berupa rata-rata jarak dan waktu tempuh mencapai pusat pelayanan. Kemudian, berhubung kabupaten Bandung Barat baru mekar pada tahun 2007 dan baru benar-benar efektif berjalan pada tahun 2008, akhirnya data yang diperoleh adalah data tahun 2008-2010. Sedangkan untuk data 2011 masih belum tersedia.

Untuk variabel daya saing, ditemukan kesulitan untuk mengukur daya saing daerah terutama yang berkaitan dengan daya saing investasi. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan untuk mengambil sampel bagi perusahaan-

perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Selain dikarenakan kecilnya kemungkinan untuk melakukan survey pada pemilik perusahaan yang memiliki jam terbang yang tinggi, survey pada perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Bandung Barat juga menjadi kurang relevan dengan penelitian dikarenakan bagi perusahaan besar untuk pengurusan investasinya tidak dilakukan di kabupaten Bandung Barat, melainkan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan atau di tingkat nasional. Untuk mengatasi kendala ini, akhirnya sasaran dari survey daya saing daerah adalah para pelaku usaha dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di kabupaten Bandung Barat dengan alasan pelaku usaha ini mengurus perijinan dan sebagainya di kabupaten Bandung Barat dan pelaku UMKM menunjukkan kekhasan daerah yang juga terkait dengan daya saing daerah.

Sentra wajit diambil sebagai sampel dalam *purposive sampling* dikarenakan dalam kerangka sampel yang diperoleh dari dinas perindustrian dan perdagangan terdapat 50 pengrajin wajit di kecamatan Cililin. Namun, pada kenyataan di lapangan, ternyata hanya 15 pengrajin wajit yang masih aktif produksi sampai saat ini. Dari hasil informasi selama terjun lapangan, ternyata dari 50 nama pengrajin wajit yang ada dalam kerangka sampel sebagian sudah tidak meneruskan usaha, kemudian sebagian besar yang lain hanya bersifat pengrajin musiman saja. Sehingga akhirnya survey dilakukan kepada 15 responden dari pelaku usaha sentra wajit yang masih aktif produksi sampai saat ini.

BAB 4

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada bab 4 ini berisi gambaran umum kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari gambaran sejarah, visi dan misi, geografi, demografi, pendidikan, indeks pembangunan manusia, kesehatan, dan ekonomi daerah. Keseluruhan gambaran umum ini menjadi informasi awal bagi prakondisi kabupaten Bandung Barat dan daya saing daerah.

4.1 Sejarah

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi dua kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U. Hatta Djati Permana. S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung No.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditanggihkan/dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembangan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi, yang meliputi 3 kecamatan yaitu

Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Di samping itu, jumlah penduduknya cukup banyak. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs. H. Endang Anwar. Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs. H. Endang Anwar. KPPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan Deklarasi Bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya

Undang-Undang No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

4.2 Visi dan Misi

Kabupaten Bandung Barat memiliki visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, serta gambaran mengenai arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Berikut peneliti jelaskan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat.

4.2.1 Visi

Kabupaten Bandung Barat memiliki visi Bandung Barat Cermat, yaitu Bersama Membangun Masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, dan Sehat Berbasis pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan. Kata “Cerdas” dalam visi mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berahlak mulia dan memiliki integritas, dan berdaya saing. Makna kata “Rasional” dalam visi Kabupaten Bandung Barat adalah di dalam melaksanakan pembangunan haruslah disesuaikan dengan realitas yang ada termasuk di dalamnya pemanfaatan potensi lokal dan kemampuan sumber daya serta harus memiliki indikator capaian kinerja yang terukur. Selanjutnya, kata “Maju” mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kabupaten Bandung Barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Kata “Agamis” memiliki makna tersendiri yaitu keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kata lain yang termaktub dalam visi yaitu kata “Sehat”. “Sehat” mengandung pengertian di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman

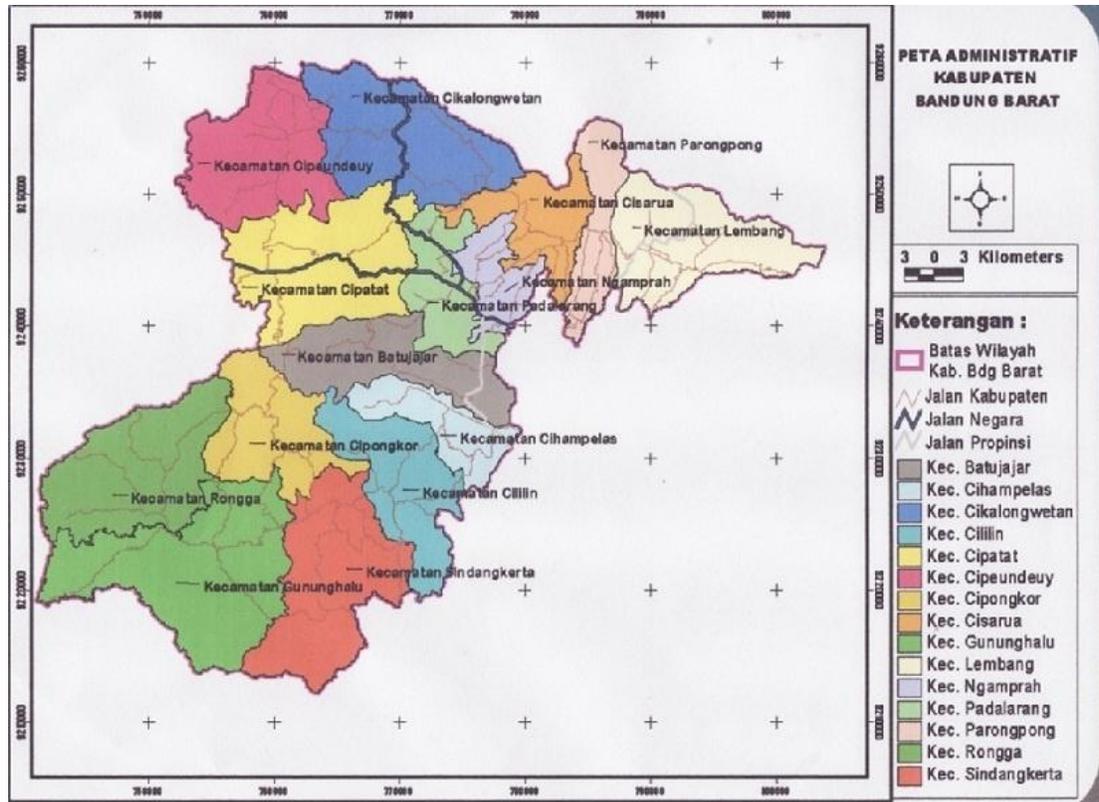
dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Dalam hal “agroindustri” Kabupaten Bandung Barat memaknainya sebagai terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi hasil-hasil pertanian. Kata terakhir yang termaktub dalam visi yaitu “Wisata Ramah Lingkungan” yang mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

4.2.2 Misi

Misi menggambarkan bagaimana visi yang akan dicapai dan memberikan kerangka bagi penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai, maka untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan lima misi, antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4.3 Geografi



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Bandung Barat

Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 km², terletak antara 60°41' s.d 70°19' Lintang Selatan dan 107° 22' s.d 108° 05' Bujur Timur. Kabupaten Bandung Barat mempunyai rata-rata ketinggian 110 m dan maksimum 22.429 m dari permukaan laut. Kemiringan wilayah bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga di atas 45%. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bandung Barat terletak diantara Kabupaten atau Kota lain yang relatif telah berkembang, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi lima belas kecamatan yang terdiri dari: Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga.

Tabel 4.1

Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Bandung Barat

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	JUMLAH DESA
1	Cililin	81,55	11
2	Cihampelas	46,63	10
3	Sindangkerta	120,35	11
4	Gununghalu	160,80	9
5	Rongga	113,12	8
6	Cipongkor	76,15	14
7	Batujajar	83,68	13
8	Lembang	98,27	16
9	Parongpong	43,39	7
10	Cisarua	55,36	8
11	Ngamprah	36,09	11
12	Padalarang	51,58	10
13	Cipatat	125,50	12
14	Cipeundeuy	101,25	12
15	Cikalongwetan	112,08	13
Total		1.305,77	165

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu seluas 16.796,2 ha (12,29%) dan terkecil adalah Kecamatan Ngamprah seluas 3,608 ha (2,76%).

Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 68.271,89 ha atau 52,19%, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 48.339,4 ha atau 36,9%, budidaya non-pertanian seluas 12.536,45 ha atau 9,58% dan lainnya seluas 1.759,29 ha atau 1,34%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa budidaya pertanian merupakan potensi terbesar untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat.

Luas wilayah kawasan lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu Kawasan Bandung Utara yang diperuntukkan bagi paru-paru Kota Bandung. Disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis, posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. Ditinjau dari aspek geologi, tanah dan kemiringan lereng, hampir di 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang kehilangan fungsi ekonomi maupun fungsi hidrologis. Sehingga pada akhirnya terjadi pemusatan kegiatan penduduk pada daerah yang kemiringannya datar dan merupakan zona aman terutama untuk pengambilan air air bawah tanah dengan debit 170 m³ per hari seperti di daerah Padalarang, Cicalong Wetan, Ngamprah, dan Parongpong.

4.4 Demografi

Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.506.273 orang, penduduk laki-laki berjumlah 768.459 orang sedangkan perempuan 737.814 orang. Dengan rata-rata kepadatan penduduk per km-nya 1.193 jiwa, dan menunjukkan bahwa Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 3.855 orang/km², sedangkan kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 482 orang/km². Dalam kesehariannya, penduduk Kabupaten Bandung Barat bekerja di berbagai macam bidang dan profesi.

Tabel 4.2
Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha

No	Kecamatan	Jumlah lapangan usaha							Jumlah
		Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya			
1.	Cililin	597	34	4.251	36	44	25.862		
2.	Cihampelas	39	60	7.186	47	94	33.126		
3.	Sindangkerta	055	97	3.251	52	92	26.348		
4.	Gununghalu	078	45	3.756	43	75	25.997		
5.	Rongga	258	3	2.110	73	58	22.882		
6.	Cipongkor	919	32	5.042	54	44	26.991		
7.	Batujajar	37	625	5.980	80	87	36.210		
8.	Lembang	212	12	10.797	969	792	65.382		
9.	Parongpong	69	00	6.986	84	91	32.929		
10.	Cisarua	140	0	4.747	50	9	26.187		
11.	Ngamprah	81	482	7.883	31	36	54.714		
12.	Padalarang	49	337	12.435	56	70	53.448		
13.	Cipatat	773	87	5.077	57	39	35.234		
14.	Cipeundeuy	409	6	2.985	82	39	22.871		
15.	Cikalongwetan	947	59	5.710	893	05	38.925		
TOTAL		180.063	79.000	88.210	100.308	79.525	527.107		

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

Dari tabel 4.2 tentang Struktur ketenagakerjaan, pada Tahun 2007 menunjukkan sektor pertanian masih merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami penurunan. Dari 527.106 orang angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat, yang bekerja di sektor pertanian 180.063 orang (34,16%), di sektor perdagangan 88.207 orang (16,73%), di sektor industri 78,999 orang (14,99%), di sektor jasa 100.307 orang (19,03%) dan sektor lainnya sebesar 79,525 orang (15,09 %) tersebar di berbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi, dan

lain-lain (SUSEDA 2007). Tampak pada tahun 2007 bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. Mayoritas kecamatan mempunyai proporsi terbesar tenaga kerja yang berkerja di sektor pertanian. Namun ada beberapa kecamatan yang mempunyai proporsi tenaga kerja yang lebih banyak bekerja di sektor lainnya seperti Kecamatan Batujajar, Padalarang, Ngamprah yang mayoritas bekerja di sektor industri. Beberapa kecamatan juga mempunyai proporsi tenaga kerja perdagangan yang cukup besar antara lain Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Padalarang.

Dari perspektif sistem perkotaan Metropolitan Bandung Raya, sebagian besar dan konsentrasi penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari kawasan peri urban atau sub urban sistem perkotaan Bandung Raya dengan *core region*nya adalah Kota Bandung. Kawasan permukiman utama di Kabupaten Bandung Barat sebagai masyarakat *suburban*, dalam aktivitas sosial-ekonominya sangat berorientasi pada *core-region* Kota Bandung, baik sebagai pusat pelayanan regional maupun sebagai tempat bekerja. Kawasan *suburban* juga menjadi pilihan utama untuk lokasi industri relokasi atau industri baru, yang khususnya berlokasi di Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar. Perkembangan kegiatan industri baru di kawasan ini banyak menyerap tenaga kerja kelas pekerja/buruh strata menengah-bawah (*middle and lower classes*), baik yang berasal dari perdesaan dan perkotaan di Bandung Barat sendiri maupun para pendatang dari luar Bandung Barat.

Di luar kawasan permukiman sub urban metropolitan dan kawasan industri di atas, tersebar kawasan-kawasan berciri perdesaan yang merupakan kawasan terluas dan merupakan kelompok sosial terbesar di Kabupaten Bandung Barat, dengan lapangan usaha utama di bidang-bidang pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk wisata alam dan agrowisata. Ciri budaya masyarakat ini adalah ciri budaya perdesaan yang sudah banyak terpengaruh unsur-unsur budaya kota mengingat kedekatannya dengan kawasan perkotaan.

4.5 Pendidikan

Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, banyak penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang tidak lagi bersekolah karena sudah lulus atau putus sekolah. Kecamatan Lembang adalah kecamatan dengan persentase penduduk tidak lagi bersekolah tertinggi.

Tabel 4.3

Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas

NO	KECAMATAN	TDK/BLM	MASIH	TIDAK LAGI
1	Cililin	792	12.105	58.611
2	Cihampelas	1.121	15.099	62.660
3	Sindangkerta	723	10.351	40.705
4	Gununghalu	1.188	8.912	53.943
5	Rongga	1.434	7.445	36.535
6	Cipongkor	1.907	12.927	51.398
7	Batujajar	1.325	15.445	73.062
8	Lembang	1.761	22.266	110.115
9	Parongpong	886	8.735	58.436
10	Cisarua	295	8.738	43.862
11	Ngamprah	643	21.453	89.834
12	Padalarang	850	18.275	104.249
13	Cipatat	3.920	18.960	75.617
14	Cipeundeuy	766	15.317	53.657
15	Cikalongwetan	662	12.397	76.152
TOTAL		18.271	208.426	988.834

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

Jumlah penduduk yang sudah tidak sekolah lagi memiliki jumlah terbesar sebanyak 988.834 penduduk. Hal ini mengindikasikan dua hal, yakni banyaknya penduduk yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, juga bisa mengindikasikan penduduknya telah banyak yang menempuh jenjang pendidikan tertentu. Untuk dapat menjawab hal ini maka perlu dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Ijazah Tertinggi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas

N o	Kecamat an	Tidak/ belum	S D	S LTP	S LTA	P T
1.	Cililin	14.008	40 .847	10 .016	6. 190	4 46
2.	Cihampe las	13.074	35 .896	18 .576	10 .011	1. 324
3.	Sindang kerta	7.366	28 .380	12 .530	2. 767	7 36
4.	Gunung halu	11.073	35 .214	11 .392	5. 871	4 93
5.	Rongga	15.735	21 .496	5. 322	2. 566	2 94
6.	Cipongk or	9.171	43 .072	8. 387	4. 716	8 87
7.	Batujajar	12.806	43 .998	21 .376	10 .641	1. 011
8.	Lemban g	26.290	57 .500	21 .418	21 .311	7. 622
9.	Parongp ong	14.922	34 .176	10 .680	5. 809	2. 470

10.	Cisarua	17.978	26 .320	6. 415	1. 872	3 09
11.	Ngamprah	15.429	31 .590	29 .618	31 .371	3. 924
12.	Padalarang	7.286	51 .310	22 .882	36 .083	5. 813
13.	Cipatat	23.104	48 .968	19 .218	5. 700	1. 506
14.	Cipeundeuy	17.574	33 .266	14 .788	3. 891	2 21
15.	Cikalongwetan	19.080	48 .889	12 .513	7. 504	1. 226
TOTAL		224.896	58 0.922	22 5.131	15 6.302	2 8.280

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa penduduk yang menempuh pendidikan jenjang Perguruan Tinggi masih minim bila dibandingkan dengan penduduk yang telah menempuh jenjang pendidikan sebelumnya, yakni SLTA. Ijazah tertinggi mayoritas penduduk berusia di atas 10 tahun di Kabupaten Bandung Barat adalah SD (54,35 %). Kecamatan Cipongkor adalah kecamatan dengan persentase jumlah penduduk berijazah tertinggi SD terbanyak (71,62 %) dan jumlah penduduk dengan ijazah PT (perguruan tinggi) yang terendah. Kecamatan Parongpong adalah kecamatan dengan persentase jumlah penduduk berijazah PT terbanyak. Adapun persebaran jumlah unit sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Jumlah Unit Sekolah

NO	KECAMATAN	TK	SD	SLTP	SLTA	RA	MI	MTS	MA
1	Ciililin	2	40	11	6	14	15	7	5
2	Cihampelas	1	45	5	2	18	16	7	3
3	Sindangkerta	3	42	6	3	10	11	4	2
4	Gununghalu	1	36	3	1	12	21	4	3
5	Rongga	1	35	2	0	3	6	1	-
6	Cipongkor	2	49	4	3	7	23	5	2
7	Batujajar	7	53	5	2	21	12	13	4
8	Lembang	18	66	8	5	18	3	4	-
9	Parongpong	4	36	4	1	11	3	1	1
10	Cisarua	2	28	2	2	6	4	3	3
11	Ngamprah	28	45	6	1	14	2	2	-
12	Padalarang	12	65	8	2	18	12	4	4
13	Cipatat	3	59	4	1	15	9	5	2
14	Cipeundeuy	3	44	5	3	3	12	4	2
15	Cikalongwetan	5	60	7	2	6	7	8	4
TOTAL		92	703	80	34	176	156	72	35

Sumber: Bandung Barat Dalam Angka 2006

Berdasarkan tabel 4.5, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 703 Sekolah Dasar (SD), yang merupakan jumlah terbesar pada unit sekolah di Kabupaten Bandung Barat. sedangkan jumlah sekolah lanjutannya masih cenderung lebih sedikit, yakni SLTP dan setara berjumlah 152 sekolah, dan SLTA dan setara berjumlah 34 sekolah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sekolah lanjutan dari jenjang pendidikan SD. Hal ini kurang mendukung bagi terselenggaranya program pendidikan dasar 12 tahun, terutama pada jenjang pendidikan SLTA dan setara.

4.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, terdiri dari tiga variabel, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli.

Tabel 4.6
Capaian Indeks Pembangunan Manusia PerKecamatan Tahun 2003-2007

NO.	KECAMATAN	IPM 2003	IPM 2004	IPM 2005	IPM 2006	IPM 2007
1	Cililin	66,67	67,20	68,97	69,65	70,45
2	Cihampelas	66,67	67,29	68,54	69,43	70,27
3	Sindangkerta	64,87	65,24	66,55	67,00	67,55
4	Gununghalu	63,61	64,16	65,57	66,30	67,15
5	Rongga	60,37	60,80	61,30	62,16	63,36
6	Cipongkor	60,82	61,39	62,17	62,54	64,43
7	Batujajar	65,24	65,71	67,23	68,01	68,87
8	Lembang	68,35	69,11	70,85	71,37	72,67
9	Parungpong	67,77	68,25	69,15	70,01	71,22
10	Cisarua	64,41	65,17	65,76	66,40	67,20
11	Ngamprah	65,37	65,88	67,42	68,10	69,72
12	Padalarang	66,89	67,52	68,32	68,91	70,83
13	Cipatat	64,88	65,65	66,88	67,74	68,51
14	Cipeundeuy	65,54	66,08	66,63	66,81	67,61
15	Cikalongwetan	65,77	66,88	67,50	68,05	68,73

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan IPM setiap tahun di masing-masing kecamatan yang berarti kinerja pembangunan menunjukkan perubahan. Pembangunan manusia dari tiga indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli ini memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun 2007, dari 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 5 Kecamatan memiliki angka IPM di atas angka IPM rata-rata Kabupaten Bandung Barat. Bila dibandingkan dengan tahun 2006, ada 2 Kecamatan yang memiliki angka IPM nya diatas Kabupaten Bandung Barat, artinya di Kabupaten Bandung Barat masih terdapat sekitar 10 kecamatan yang angka pencapaian IPMnya masih di bawah rata-rata IPM Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kemajuan pencapaian angka IPM di Kabupaten Bandung Barat masih belum begitu menggembirakan.

4.7 Kesehatan

Kabupaten Bandung Barat belum memiliki fasilitas rumah sakit kecuali rumah sakit swasta di Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang. Dengan tidak tersedianya rumah sakit khususnya milik pemerintah, warga yang membutuhkan perawatan harus merujuk ke rumah sakit di Kota Cimahi atau di Kota Bandung. Fasilitas kesehatan yang tersebar merata di tiap kecamatan adalah puskesmas (termasuk puskesmas pembantu). Rumah sakit bersalin hanya berada di beberapa kecamatan saja seperti Kecamatan Batujajar, Lembang, Parongpong, dan Padalarang. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan lainnya sudah cukup tersebar di seluruh kecamatan, walaupun secara kuantitas masih terlihat kurang. Poliklinik banyak terdapat di Kecamatan Padalarang. Apotik memusat di Kecamatan Ngamprah dan tidak ada di beberapa kecamatan. Praktik dokter di Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, dan Cipongkor juga kurang dari cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat

no	Kecamatan	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Praktik Bidan	Apotik
1.	Cililin	0	0	1	3	6	15	5
2.	Cihampelas	0	0	0	4	7	13	0
3.	Sindangkerta	0	6	2	5	1	14	0
4.	Gununghalu	0	0	1	5	1	5	0
5.	Rongga	0	7	1	2	1	4	0
6.	Cipongkor	0	0	2	0	2	11	0
7.	Batujajar	2	6	1	4	10	15	2
8.	Lembang	3	4	4	2	29	32	4
9.	Parongpong	2	4	2	3	15	10	2
10.	Cisarua	0	3	1	6	8	11	0
11.	Ngamprah	0	1	2	2	12	25	15
12.	Padalarang	5	14	4	3	17	20	2
13.	Cipatat	0	5	4	4	6	10	1
14.	Cipeundeuy	0	5	2	7	4	9	1
15.	Cikalongwetan	0	5	2	3	4	6	4
	TOTAL	12	60	29	53	123	200	36

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013

4.8 Ekonomi Daerah

Untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten Bandung Barat dapat terlihat dari PDRB dari tahun ke tahun. PDRB memperlihatkan kontribusi ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4.8

PDRB KBB Tahun 2004 – 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku

NO.	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	871.454,18	1.040.290,87	1.176.470,08	1.299.815,28
2	Pertambangan dan Penggalian	38.458,65	45.148,08	50.372,04	55.816,82
3	Industri Pengolahan	3.720.997,18	4.435.844,35	5.110.400,64	5.761.640,36
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	550.702,55	657.321,76	750.971,05	842.017,50
5	Bangunan/Konstruksi	180.505,56	215.651,63	248.035,52	279.999,26
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.453.838,05	1.723.352,17	1.965.591,51	2.267.290,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	474.597,50	549.712,45	706.213,57	809.614,85
8	Kecelakaan, Persewaan & Jasa Perusahaan	215.420,87	253.994,06	285.361,53	324.895,06
9	Jasa – Jasa	401.041,84	481.075,34	555.600,37	642.692,59
PDRB TANPA MIGAS		7.907.016,39	9.402.390,70	10.849.016,31	12.283.781,76

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2007

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten berciri industri dan sektor-sektor berbasis perkotaan yang signifikan. Berdasarkan Tabel 4. menurut harga berlaku, PDRB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 telah mencapai nilai sekitar Rp 12,28 trilyun. Kontribusi PDRB terbesar adalah dari sektor industri pengolahan yang terus meningkat dari tahun 2004-2007. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak aktivitas ekonomi di bidang industri pengolahan di Kabupaten Bandung Barat, yang artinya juga banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan. Berikut adalah PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga konstan tahun 2000 :

Tabel 4.9
Proporsi (%) masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB KBB
Tahun 2004 – 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	11,50	11,55	11,04	10,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,52	0,53	0,53
3.	Industri Pengolahan	46,61	46,70	46,85	46,77
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	7,12	7,14	7,14	7,13
5.	Bangunan/Konstruksi	2,40	2,37	2,39	2,38
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	18,48	18,45	18,67	18,97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,69	5,60	5,66	5,71
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,83	2,83	2,82	2,86
9.	Jasa – Jasa	4,86	4,83	4,89	4,96

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Barat

Pada tabel 4.9, lapangan usaha industri pengolahan berkontribusi atas 46.7% total PDRB kabupaten, sedangkan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi sebesar 18,97% dari total PDRB. Dengan demikian kontribusi dua sektor ini mencapai lebih dari 65% PDRB kabupaten. Walaupun berkontribusi cukup dominan terhadap PDRB, namun secara spasial perkembangan sektor-sektor tersebut terkonsentrasi secara terbatas di beberapa kecamatan berciri perkotaan, dengan kepadatan permukiman tinggi yang berbatasan langsung dan memiliki aksesibilitas (kemudahan daya capai) ke Kota Bandung dan Cimahi. Sektor Industri, khususnya terkonsentrasi di Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar dan sebagian Cipatat.

4.8.1 Potensi Ekonomi

Kabupaten Bandung Barat memiliki sejumlah potensi daerah yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi peluang bagi peningkatan investasi daerah. Potensi besar dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan energi, industri, dan pariwisata.



Sumber: Badan Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu

Gambar 4.2

Peta Potensi Kabupaten Bandung Barat

a. Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari padi dan palawija, hortikultura, dan buah-buahan. Komoditas padi merupakan komoditas produksi padi dan palawija yang paling besar di Kabupaten Bandung Barat yakni sekitar 197.339 ton atau 56,72 %, sedangkan produksi komoditas kacang hijau merupakan komoditas yang paling kecil yaitu sebesar 51 ton atau 0,01 %. Komoditas labu siam merupakan komoditas produksi hortikultura yang paling besar di Kabupaten Bandung Barat yakni sekitar 668.461 ton atau 33,65 %, sedangkan produksi komoditas bawang putih merupakan komoditas yang tidak ada di Kabupaten Bandung Barat. Komoditas buah pisang merupakan komoditas produksi buah-buahan yang paling besar di Kabupaten Bandung Barat yakni sekitar 359.185 ton atau 72,70 %, sedangkan produksi komoditas buah manggis merupakan komoditas yang produksinya paling kecil di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebesar 64 ton atau 0,01 %.

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memberikan paling banyak kontribusi produksi di 15 kecamatan Kabupaten Bandung Barat yakni komoditas teh sebanyak 91.555,9 ton yang berlokasi di Cikalong Wetan, Cisarua, Sindangkerta; komoditas kelapa sebanyak 1.065,9 ton yang berlokasi di kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor, dan Cikalong Wetan; komoditas karet sebanyak 2.068 ton yang berlokasi di Kecamatan Cipendeuy dan Cipatat; komoditas kopi sebanyak 510,56 ton yang berlokasi di Kecamatan Gununghalu, Sindangkerta, Cilin, Cipongkor, dan Cikalongwetan.

c. Peternakan

Komoditas peternakan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yaitu ternak besar (sapi, kerbau, kuda, domba dan kambing) dan ternak kecil (ayam dan itik).

Komoditas ayam merupakan komoditas yang jumlahnya paling besar di Kabupaten Bandung Barat yakni sebesar 3.011.097 ekor atau 86,39 %, sedangkan kerbau merupakan komoditas yang jumlahnya paling kecil di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebesar 2.764 ekor atau 0,08 %.

Apabila dilihat dari penyebaran setiap komoditas ternak besar dan kecil di Kabupaten Bandung Barat dari setiap kecamatan, hanya komoditas domba, kambing, ayam dan itik yang jumlahnya secara merata ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan ternak sapi, kerbau dan kuda merupakan ternak yang hanya terdapat di beberapa kecamatan saja.

d. Perikanan

Produksi ikan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat terdapat dari kolam air tenang, mina padi, kolam jaring apung dan perairan umum. Produksi perikanan yang terbesar di Kabupaten Bandung Barat berasal dari kolam jaring apung yaitu sebesar yaitu sebesar 18.204 ton atau 94,30 %, sedangkan produksi ikan dari mina padi merupakan tempat pemeliharaan yang menghasilkan produksi ikan paling kecil yaitu sebesar 112 ton atau 0,58 %.

e. Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat adalah batu andesit dengan luas 61,84 ha, pasir dengan luas 26 ha, marmer dengan luas 7,7 ha, dan kapur dengan luas 15 ha. Dari lahan-lahan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dan merupakan peluang investasi.

Potensi energi yang dimiliki oleh Kabupaten bahkan mampu memenuhi kebutuhan energy nasional dengan tiga pembangkit listrik utama yaitu PLTA Saguling, Cirata, dan sebagian Jatiluhur. Pembangkit listrik ini menambah posisi strategis untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah.

f. Industri

Industri hanya terdapat di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang, seperti LIK/PIK. Jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Pemusatan dan jumlah industri di Kabupaten Bandung Barat tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Pemusatan dan Jumlah Industri

KECAMATAN	PEMUSATAN INDUSTRI (DESA)			JUMLAH INDUSTRI (UNIT)									
	KAWASAN INDUSTRI	SENTRA INDUSTRI	LIK/PIK	INDUSTRI BESAR	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI KECIL							
						KULIT	KAYU	LOGAM	ANYAMAN	GERABAH	KAIN	MAKANAN	LAINNYA
Cililin	0	0	0	0	0	0	4	0	589	0	0	219	0
Cihampelas	0	0	0	0	0	0	3	0	24	0	0	24	4
Sindangkerta	0	0	0	0	0	0	37	0	67	0	0	235	204
Gununghalu	0	0	0	1	0	1	64	0	79	0	0	87	4
Rongga	0	0	1	0	0	0	27	0	34	0	0	20	305
Cipongkor	0	0	0	0	0	0	35	0	201	0	0	391	0
Batujajar	0	0	0	48	9	0	3	0	1	0	0	16	10
Lembang	0	0	0	3	14	1	40	0	2	0	36	35	4
Parongpong	0	0	0	0	2	0	12	1	2	6	4	20	2
Cisarua	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0
Ngamprah	0	0	0	10	10	0	6	0	38	0	15	133	5
Padalarang	7	3	5	108	59	1	5	2	7	5	5	33	0
Cipatat	0	0	1	4	10	1	26	1	1	10	0	2	0
Cipeundeuy	0	0	0	0	0	0	23	3	157	0	0	65	11
Cikalongwetan	0	0	0	2	3	0	23	8	45	0	0	130	17
TOTAL	7	3	7	176	107	4	311	15	1.253	21	60	1.410	566

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Barat

Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit,

serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20%.

g. Pariwisata

Beberapa objek wisata di Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zona pengembangan wisata terbagi atas Zona Bandung Utara dengan objek wisata Satuan Kawasan Wisata Maribaya, Lembang dan Tangkuban Perahu; Zona Bandung Barat dengan objek wisata Satuan Kawasan Wisata Ciburuy dan Saguling.

Tabel 4.11

Klasifikasi Potensi Obyek Wisata Dan Daya Tarik Wisata

Potensi Pengembangan	Zona Wista	
	Utara	Barat
Tinggi	THR Juanda Skawana	Curug Malela
	Kawah Tangkuban Perahu	
Sedang	Maribaya	Situ Ciburuy
	Taman Bunga Cihideung	Air Panas Cisameng
	Curug Panganten	Air Panas Cibaligo
	Bufer Cikole	Bufer Sela
	Jayagiri	Waduk Cirata
		Waduk Saguling
		Curug Sawyer
		Perkebunan Panglejar
Rendah	Curug Omas	Gua Pawon
	Situ Lembang	
	Situ Umar	
	Curug Cimahi	

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat, 2011

BAB 5

PEMBAHASAN

Pada bab 5 ini berisi pembahasan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pembahasan pertama adalah mengenai prakondisi kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari determinan kependudukan, kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali akses pelayanan. Pembahasan kedua adalah mengenai daya saing investasi kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari *factor condition*, *insitutional factor*, ekonomi lokal, dan sosial, politik, budaya, dan keamanan. Kemudian sintesis daya saing investasi kabupaten Bandung Barat dikaitkan antara hasil temuan lapangan dan konsep daya saing daerah.

5.1 Prakondisi Kabupaten Bandung Barat

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah terlampir sejumlah persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh daerah otonom. Pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut merupakan prakondisi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Terdapat banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah otonom baru yang mencakup faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali. Namun dalam pembahasan ini diambil faktor-faktor yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan ekonomi daerah. Adapun faktor yang menjadi prakondisi bagi Kabupaten Bandung Barat dalam membangun ekonomi daerah yang berdaya saing adalah dari faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali akses pelayanan.

5.1.1 Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan aset yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bandung Barat dari segi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.534.869 dengan kepadatan penduduk 1.175/ km². Tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.557.639 orang, penduduk laki-laki berjumlah 786.203 orang sedangkan perempuan 771.436 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya mencapai 1,02. Dengan rata-rata kepadatan penduduk per Kmnya 1.193 jiwa, dimana Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 3.855 orang per kilometer persegi, sedangkan kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 482 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk juga merupakan prakondisi yang penting juga untuk mengetahui persebaran jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah efektif Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.506.273 orang, penduduk laki-laki berjumlah 768.459 orang sedangkan perempuan 737.814 orang. Dengan rata-rata kepadatan penduduk per kilometer 1.193 jiwa menunjukkan bahwa Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 3.855 orang per kilometer persegi, sedangkan kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 482 orang per kilometer persegi.

Tabel 5.1

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2008-2010

o	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/km ²
.	2008	1.534.869 jiwa	1.175 jiwa
.	2009	1.557.639 jiwa	1.193 jiwa
.	2010	1.506.273 jiwa	1.193 jiwa

Sumber : Diolah Kembali Oleh Peneliti, 2012

Dari tabel 5.1 dapat dilihat jumlah penduduk di kabupaten Bandung Barat bertumbuh dari tahun 2008 ke tahun 2009, namun sebaliknya mengalami penurunan di tahun 2009 ke tahun 2010. Begitu pun dengan kepadatan penduduk yang mengalami kenaikan di tahun 2008 ke tahun 2009, dan mengalami stagnansi di tahun 2009 ke tahun 2010. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Pertumbuhan jumlah penduduk kabupaten Bandung Barat pada tahun 2008 ke tahun 2009 dapat dipengaruhi oleh faktor tingginya angka kelahiran dan atau banyaknya penduduk luar yang bermigrasi ke kabupaten Bandung Barat. Sebaliknya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2010 dapat disebabkan oleh tingginya angka kematian dan atau migrasi penduduk kabupaten Bandung Barat ke daerah lain.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan kabupaten induknya, yakni kabupaten Bandung, memang lebih sedikit. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.506.273 orang, sedangkan kabupaten Bandung memiliki penduduk berjumlah 3.174.499 orang. Pun dengan kepadatan penduduk, kabupaten Bandung memiliki kepadatan penduduk lebih banyak yakni sebanyak 1.801 orang per kilo meter persegi dibandingkan dengan kabupaten Bandung Barat yang kepadatan penduduknya adalah 1.193 orang per kilo meter persegi. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2010*, rata-rata jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat yang berjumlah 1.654.686 pada tahun 2010, dan jumlah penduduk Bandung Barat masih tergolong pada kisaran rata-rata menengah. Kabupaten Banjar adalah kabupaten dengan dengan jumlah penduduk penduduk paling sedikit di Jawa Barat, yakni sebanyak 185.993 jiwa pada tahun 2009. Dan Kota Bogor adalah kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat yakni sebanyak 4.453.927 jiwa pada tahun 2009.

Jumlah penduduk merupakan indikator yang penting dari perspektif pembentukan daerah otonom baru dan dari perspektif pembangunan ekonomi regional. Pertama dari segi pembentukan daerah otonom baru, jumlah penduduk merupakan faktor yang berperan dalam pertimbangan membentuk daerah otonom baru. Jumlah penduduk yang banyak akan memperkuat daerah untuk dimekarkan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suahasil Nazara dan Nurkholis berjudul *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Era Desentralisasi* yang salah satu hasil dari penelitiannya adalah suatu daerah memiliki kemungkinan lebih besar apabila mempunyai jumlah penduduk yang besar (2006:162). Sedangkan dari perspektif pembangunan ekonomi regional, jumlah penduduk kabupaten Bandung Barat ini berhubungan dengan sumber daya tenaga kerja yang secara positif akan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui banyaknya penduduk yang terserap dalam dunia kerja.

5.1.2 Kemampuan Ekonomi

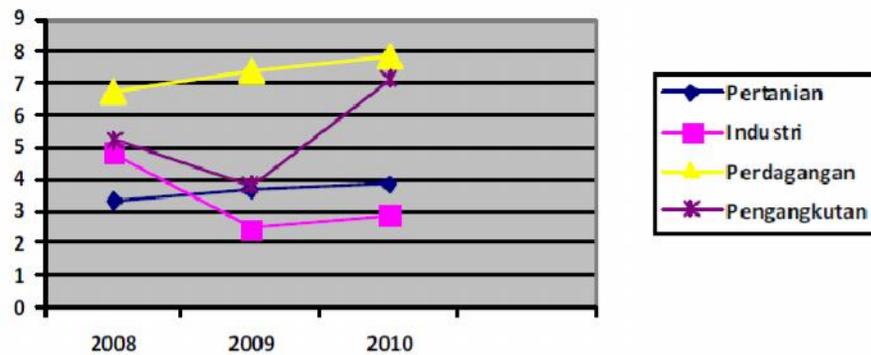
Kemampuan ekonomi merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk membentuk suatu daerah otonom baru. Kemampuan ekonomi kabupaten Bandung Barat dalam pembahasan ini akan dilihat dari ekonomi makronya, yakni dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat.

5.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan dalam sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi makro suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan. PDRB kabupaten

Bandung Barat dihitung dengan akumulasi PDRB tiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Bandung Barat mengenai PDRB Bandung Barat tahun 2010, perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 yang diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan 2000 menunjukkan percepatan meski tidak terlalu besar. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menguat sebesar 0,50 poin yaitu tumbuh sebesar 4,79 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 4,29 persen. Dari laju pertumbuhan ekonomi tersebut umumnya seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan.



Gambar 5.1
LPE Kabupaten Bandung Barat dan Sektor-sektor Dominan Tahun 2008-2010 (dalam persentase)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2011

Empat sektor dominan yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap pembentukan PDRB kabupaten Bandung Barat, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor pertanian serta sektor Pengangkutan. Dari gambar 5.1 terlihat bahwa sektor yang mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai 2010 adalah sektor perdagangan dan pertanian, sedangkan sektor pengangkutan dan industri mengalami fluktuasi yakni menurun dari tahun 2008 ke tahun 2009 kemudian menaik pada tahun 2009 ke tahun 2010. Penurunan pertumbuhan industri pada tahun 2008 ke tahun 2009 dikarenakan industri di Kabupaten Bandung Barat masih

sangat tergantung oleh bahan baku import, sehingga kenaikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar berpengaruh besar terhadap kehidupan Industri di Kabupaten Bandung Barat. Fluktuasi harga BBM dan depresiasi nilai rupiah di tahun 2008, menjadikan kinerja sektor ini semakin membaik. Hal ini diamati dari semakin naiknya kinerja sektor industri pengolahan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Primer	840.622,07	871.958,15	906.060,20
1. Pertanian	802.995,28	832.429,32	864.568,50
2. Pertambangan dan penggalian	37.626,79	39.528,83	41.491,70
2. Sekunder	3.985.866,04	4.111.437,92	4.258.537,03
1. Industri pengolahan	3.313.355,90	3.395.983,71	3.495.146,43
2. Listrik, gas, dan air	505.209,68	541.215,47	580.142,08
3. Bangunan	167.300,28	174.240,30	183.248,52
3. Tersier	2.330.535,28	2.526.402,49	2.657.567,94
1. Perdagangan, hotel, dan restoran	1.367.910,41	1.468.810,40	1.583.740,78
2. Pengangkutan dan komunikasi	405.694,95	421.167,09	451.235,35
3. Keuangan, persewaan, dan jenis perusahaan	203.295,97	214.673,08	231.468,16
4. Jasa-jasa	354.244,06	376.616,68	391.123,65
PDRB	7.157.633,43	7.507.423,19	7.822.165,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2011

Apabila PDRB tersebut dihitung atas dasar harga konstan 2000, kinerja sektor sekunder tahun 2010 mampu tumbuh sebesar 3,58 persen dari tahun 2009. PDRB sektor tersier meningkat menjadi sebesar Rp. 2,66 trilyun di tahun 2010 dari nilai Rp. 2,52 trilyun pada tahun 2009. Sementara itu

kelompok sektor primer pada tahun 2010 mampu tumbuh sebesar 3,91 persen, yaitu dari 0,87 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 0,91 trilyun pada tahun 2010.

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa PDRB kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Namun, bila dibandingkan dengan kabupaten Bandung yang merupakan kabupaten induknya, PDRB Kabupaten Bandung Barat jelas tertinggal jauh. PDRB Kabupaten Bandung atas harga konstan 2000, pada tahun 2008 saja sudah berjumlah 19.673.732,61 yang merupakan dua kali lipat PDRB Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, dari rata-rata PDRB non migas provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 11.290.334, PDRB Bandung Barat dinilai dibawah rata-rata dari PDRB Provinsi.

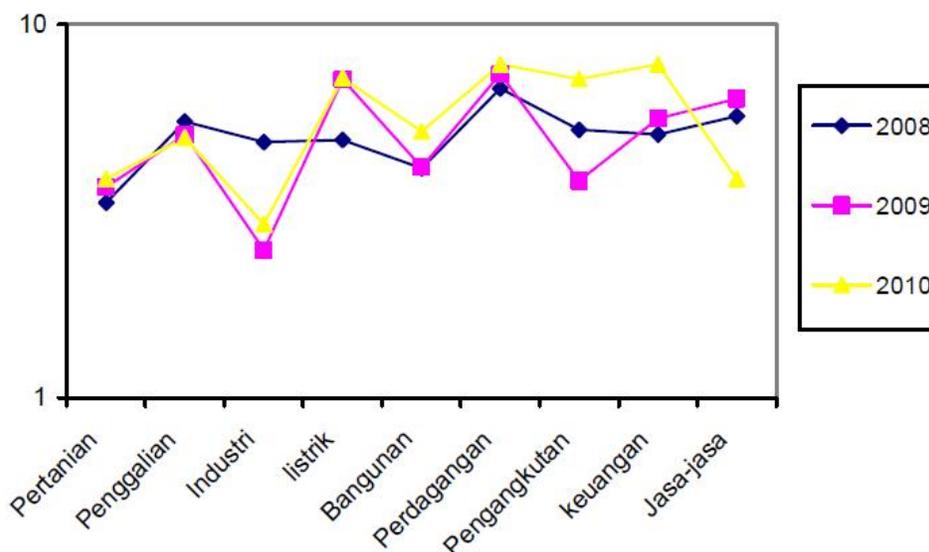
PDRB dinilai penting untuk memperlihatkan kondisi perekonomian kabupaten Bandung Barat. Selain untuk memperlihatkan pos-pos pendapatan perekonomian seluruh daerah, PDRB juga mampu menjelaskan kemampuan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk dapat mengelola potensi perekonomian yang ada. Sejauh ini PDRB Bandung Barat masih belum dapat menyamai kabupaten induknya maupun rata-rata PDRB Provinsi Jawa Barat. Namun dari struktur yang terlihat dari pos PDRB Bandung Barat, dapat dilihat bahwa potensi pendapatan terbesar ada pada lapangan usaha sekunder dan tersier, sedangkan di sektor primer masih sedikit potensi pendapatan yang sudah tergali. Hal ini menunjukkan kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten berciri industri dan sektor-sektor berbasis perkotaan yang signifikan.

5.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian disuatu wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Demikian pula halnya di Kabupaten Bandung Barat, dalam Rencana Strategisnya (Renstra), laju pertumbuhan

ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk selalu dievaluasi.

Secara umum, pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif semua sektor. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Kelompok Sektor Tahun 2008-2010 (dalam persentase)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2011

Dari gambar 5.2 terlihat bahwa laju pertumbuhan kelompok sektor primer mengalami peningkatan pertumbuhan dari 3,73 persen pada tahun 2009 menjadi 3,91 pada tahun 2010. Peningkatan ini karena peningkatan dari sektor pertanian, yaitu dari 3,67 persen di tahun 2009 menjadi 3,86 pada tahun 2010, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami perlambatan yaitu dari 5,06 persen pada tahun 2009 menjadi 4,97 persen pada tahun 2010. Kemudian keseluruhan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelompok Sektor dalam Perekonomian
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha	2008	2009*)	2010**)
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Primer	3.50	3.73	3.91
1. Pertanian	3.33	3.67	3.86
2. Pertambangan dan Penggalian	5.50	5.06	4.97
2. Sekunder	4.82	3.15	3.58
3. Industri Pengolahan	4.84	2.49	2.92
4. Listrik, Gas dan Air	4.84	2.49	7.19
5. Bangunan	4.12	4.15	5.17
3. Tertier	6.13	7.98	5.61
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.73	7.38	7.82
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5.23	3.81	7.14
8. Keuangan, Persewaan & Js Prahahan	5.07	5.60	7.82
9. Jasa jasa	5.68	6.32	3.85
PDRB	5,08	4,29	4,79

Catatan: *)Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2011

Pada kelompok sektor sekunder, semua sektor pertumbuhannya mengalami percepatan. Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan menguat dari 2,49 persen pada tahun 2009 menguat hingga sebesar 2,92 persen pada tahun 2010, sektor Listrik, Gas dan Air bersih (LGA) melemah dari 2,49 persen di tahun 2009 menjadi 7,19 persen pada tahun 2010 dan sektor bangunan menguat dari 4,15 persen menjadi 5,17 persen di tahun 2010. Adapun untuk kelompok sektor tersier, mengalami perlambatan laju pertumbuhan terutama sektor jasa-jasa. Untuk sektor perdagangan, pengangkutan dan sektor keuangan mengalami percepatan laju pertumbuhan. Pada kelompok tersier ini sebagian besar pengaruh dari percepatan dari sub sektor keuangan terutama perbankan karena menguatnya nilai mata uang rupiah. Sektor jasa-jasa melemah dari 6,32 persen di tahun 2009 menjadi 3,85

persen di tahun 2010. Sedangkan laju pertumbuhan sub sektor pengangkutan dan komunikasi terjadi percepatan dari 3,81 persen pada tahun 2009 menjadi 7,14 persen pada tahun 2010 dan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menguat dari 5,60 persen pada tahun 2009 menjadi 7,82 pada tahun 2010.

Dari tabel 5.3 juga dapat dilihat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2009 ke tahun 2010. Penurunan pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 ke tahun 2009 cukup signifikan yakni dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08 menjadi 4,29. Sektor sekunder berkontribusi banyak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 ke tahun 2009.

Adapun bila dibandingkan dengan kabupaten induknya, yakni kabupaten Bandung, pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat tidak terlalu jauh dengan pertumbuhan kabupaten induknya. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat adalah 5,08 sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung adalah 5,30. Pertumbuhan ekonomi, bila menurut pandangan Simon Kuznet, dapat memperlihatkan kemampuan kabupaten Bandung Barat untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi Bandung Barat tahun 2010 yakni sebesar 4,79 bukan hanya merupakan angka semata, tetapi memperlihatkan kemampuan Bandung Barat dalam menyediakan barang ekonomi mulai dari lapangan usaha primer, sekunder, dan tersier.

5.1.3 Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari porsi Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun oleh kabupaten Bandung Barat. Dalam konteks otonomi daerah, kemandirian daerah dalam hal keuangan, terutama dalam menghimpun pendapatan daerah sendiri, merupakan poin penting yang memperlihatkan kemandirian suatu daerah. Pun

dengan kabupaten Bandung Barat, sebagai daerah otonom baru yang sudah berjalan selama 5 tahun, untuk melihat kemandirian daerah dari segi keuangan dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Adapun pendapatan asli daerah kabupaten Bandung Barat dari tahun 2008 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Realisasi PAD Bandung Barat tahun 2008-2011

o	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
.	2008	Rp.18.322.050.000	Rp.19.719.128.150	107,63
.	2009	Rp.22.524.545.000	Rp.22.654.716.905	100,58
.	2010	Rp.24.347.349.000	Rp.26.757.545.644	109,90
.	2011	Rp.59.476.148.000	Rp.71.569.435.314	120,33

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, 2011

Dari tabel 5.4 dapat diketahui umumnya realisasi PAD Kabupaten Bandung Barat melebihi target yang ingin dicapai. Namun pemenuhan realisasi yang melebihi target bukan merupakan ukuran yang menunjukkan kemandirian keuangan dari daerah Bandung Barat. Sebaliknya, kemandirian daerah dalam menghimpun pendapatan asli daerah dapat terlihat dari bagaimana daerah Bandung Barat memaksimalkan potensi yang ada untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, kemandirian kabupaten Bandung Barat dalam keuangan daerah juga dapat dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2009, jumlah PAD 26 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 567.184.627.720.000 dan rata-ratanya adalah Rp. 21.814.793.370.000. Dengan jumlah rata-rata PAD provinsi tersebut maka

dapat diketahui bahwa PAD Kabupaten Bandung Barat masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

Dari pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun, umumnya masih jauh proporsinya dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat. Pada APBD kabupaten Bandung Barat tahun 2008 transfer dari pemerintah pusat ke kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp.641.767.948.461 dan transfer pada tahun 2009 mencapai Rp. 677.032.859.252. Jumlah transfer dari pusat ini sangat besar dibandingkan dengan pendapatan asli kabupaten Bandung Barat. Hal ini memang sudah menjadi suatu keadaan yang umum di Indonesia bahwa daerah-daerah otonom di Indonesia dari segi keuangan masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Terlebih kabupaten Bandung Barat merupakan daerah otonom yang masih baru sehingga ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat masih tinggi. Mengenai kemampuan keuangan daerah otonom, terdapat perbedaan pandangan para ahli. Pendapat pertama adalah daerah otonom harus memiliki kemampuan keuangan karena dalam menjalankan otonomi perlu didukung oleh sumber keuangan yang memadai untuk membiayai otonominya (Azfar dalam Tarigan, 2007:57). Pendapat ini pertama kali dimunculkan oleh J. Wayong pada tahun 1950-an yang menyatakan bahwa, “otonomi identik dengan otomoney” (dalam Rasyid, 2009:212). Sebenarnya pandangan ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena memang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah unsur keuangan merupakan sumber daya yang penting untuk membiayai penyelenggaraan sehari-hari, juga membiayai pembangunan daerah.

Namun, dari hasil empiris di lapangan, daerah otonom tidak sepenuhnya otonom dari segi kemampuan keuangan. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah masih sangat tinggi terhadap pemberian dari pemerintah pusat. Fitriani et.al (2005:66) menyatakan bahwa salah satu motivasi daerah untuk melakukan pemekaran daerah adalah adanya motivasi “rampasan fiskal”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ketika suatu daerah otonom itu terbentuk, daerah tersebut masih mengandalkan bantuan fiskal dari pemerintah pusat dan atau provinsi atau kabupaten/kota induknya. Artinya

adalah daerah otonom baru tidak memiliki kemampuan keuangan secara penuh melainkan mengandalkan transfer keuangan dari pemerintahan di atasnya. Namun sejumlah pihak menganggap wajar akan ketergantungan finansial yang tinggi dari daerah otonom baru kepada pemerintah pusat, seperti yang dinyatakan oleh Endharto dari Bagian Penataan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2012), *“Kalo menurut saya gini, wajar. Dia itu kan daerah otonom baru, yang katakanlah baru berjalan berapa tahun. Masa langsung dievaluasi? Nilainya dari 10 aspek. Yah klenger mba.. orang sing tua ngeklek aja masih banyak kekurangan yaa..”* (wawancara dengan Bapak Endharto, 30 Januari 2012).

Dari beberapa pendapat para ahli dan melihat keadaan empiris kemampuan keuangan kabupaten Bandung Barat maka dapat disintesis bahwa kemampuan kabupaten Bandung Barat dalam menghimpun PAD masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari lebih banyaknya transfer dana dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD yang dihimpun oleh kabupaten Bandung Barat.

5.1.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) diukur melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity index* (IPM Kabupaten Bandung Barat 2010). Yang jelas bahwa indeks pembangunan manusia, merupakan tolak ukur dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah. Hal ini dikarenakan dalam pengukuran IPM mencakup tiga variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di

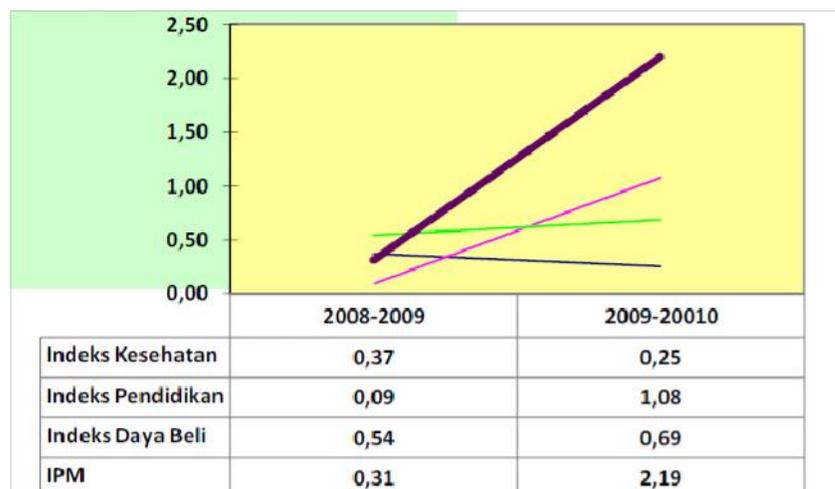
suatu wilayah. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut.

Tabel 5.5
IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2008-2010

	Kesehatan		Pendidikan			Daya beli		I P M
	AHH	Indeks	AMH	MYS	Indeks	PPP	Indeks	
2008	68,58	72,63	98,00	8,00	83,11	569,21	62,21	72,65
2009	68,74	72,90	98,01	8,03	83,18	570,67	62,55	72,88
2010	68,85	73,08	98,32	8,34	84,09	632,53	62,98	73,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2011

Dewasa ini, perspektif pencapaian IPM di Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan kemajuan. Perekonomian masyarakat Bandung Barat terus bergerak, sarana kesehatan dan pendidikan pun juga terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Terlihat dari tabel 5.5 indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. IPM kabupaten Bandung Barat juga tidak terlalu jauh dengan nilai IPM yang dicapai oleh kabupaten induknya. IPM kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 78,09, tahun 2009 adalah 73,29, dan tahun 2010 adalah 74,30. Berdasarkan nilai IPM yang dicapai Kabupaten Bandung Barat yang berkisar $66 \leq \text{IPM} < 80$, maka status pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat adalah menengah atas. Hal ini dinilai baik untuk ukuran sebagai daerah otonom baru. Adapun laju peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Gambar 5.3

Laju Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Bandung Barat Selama Periode 2008-2010

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2011

Jika memperhatikan laju perkembangan IPM-nya, selama periode 2008-2009 laju perkembangan IPM Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, dimana pada periode 2008-2009 laju peningkatannya sebesar 0,31 poin, dan pada 2009-2010 lajunya meningkat cukup tajam yaitu 2,19. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang berorientasi langsung pada pencapaian IPM mampu menggerakkan laju peningkatan IPM Kabupaten Bandung Barat. Nilai IPM di kisaran menengah atas ini juga menunjukkan pembangunan yang baik khususnya di bidang pembangunan manusia. Bila dikaitkan dengan paradigma pembangunan manusia, maka tujuan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya nilai IPM Bandung Barat dan dari komponen IPM dapat terlihat bahwa pendidikan memiliki indeks terbesar disusul dengan kesehatan dan daya beli masyarakat. Paradigma pembangunan manusia melalui IPM ini sendiri merupakan wujud jawaban dari efek pertumbuhan ekonomi yang kadang kurang merepresentasikan keadaan masyarakat dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat lapisan paling bawah. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator yang dapat memperlihatkan kemampuan Bandung Barat dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan manusia.

5.1.5 Rentang Kendali Akses Pelayanan

Sampai saat ini, pusat pemerintahan kabupaten Bandung Barat berada di kecamatan Batujajar. Namun pusat pemerintahan di Batujajar ini sifatnya masih sementara. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Umar, Kasubdit perencanaan ekonomi dan investasi Badan Perencanaan Daerah kabupaten Bandung Barat,

“.....Itu karena disini cuman sementara, gitu. Jadi nanti rencana 2013 ini pusat pemerintahan itu adalah di Ngamprah. Kecamatan Ngamprah itu dulu bagian dari Padalarang” (Umar, 2012).

Pemilihan kecamatan Batujajar sebagai pusat pemerintahan kabupaten Bandung Barat saat ini tidak terlepas dari tujuan pemerintah daerah untuk mendekatkan akses dan memudahkan pelayanan. Hal ini dikarenakan sebelum pusat pemerintahan disatukan di kecamatan Batujajar, satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) berpecah di tiap daerah.

“.. itu, berpecah gitu. Nah, ehem (berdehem) kalo mencar gitu kan untuk koordinasi memang agak ini. lama lah gitu. Nah, kemudian ada inisiatif untuk disatukan gitu. Kita ngontrak disini. Kebetulan ini adalah.... ini adalah pabrik ya dulunya. Kita kontrak jadinya disini.” (Umar, 2012).

Selain untuk memudahkan koordinasi antar SKPD, integrasi pusat pemerintahan juga dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Umar,

“ya, pertama ini adalah untuk.. ya kalo satu wilayah kan jadi cepat untuk berkoordinasinya gitu. Kadang pelayanan publik dari masyarakat juga kan sulit untuk dia butuh ke dinas apa ya.. ke dinas pendudukan dia kesini kemudian juga dia untuk ke tenaga kerja dia masih dalam satu wilayah. Jadi dalam satu hari dapat cepat. Kalo berpencar-pencar terkadang masyarakat keburu capek, lelah gitu ya..” (Umar, 2012).

Selain dari segi efisiensi secara koordinasi dan jangkauan pelayanan, kondisi pusat pemerintahan Bandung Barat yang sekarang dapat dilihat juga dari segi efisiensi biaya. Berdasarkan standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dapat terlihat biaya perjalanan yang diperlukan dari tiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menuju kecamatan Batujajar sebagai lokasi pusat pemerintahan Bandung Barat saat ini. Berikut standar biaya perjalanan dari kecamatan Batujajar ke seluruh kecamatan lain di Kabupaten Bandung Barat :

Tabel 5.6
Biaya Perjalanan Dinas dari Kecamatan Batujajar (Pusat Pemerintahan Saat Ini) Ke Seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung Barat

o	Tujuan	Tahun 2011			
		ol IV ^G	ol III ^G	ol II ^G	ol I ^G
KLUSTER A					
.	Kec. Padalarang	20.000 ¹	00.000 ¹	0.000 ⁸	.000 ⁶⁰
.	Kec. Ngamprah				
.	Kec. Cihampelas				
.	Kec. Cililin				
KLUSTER B					
.	Kec. Cisarua	50.000 ²	00.000 ²	50.000 ¹	5.000 ¹²
.	Kec. Parongpong				
.	Kec. Sindang Kerta				
KLUSTER C					
.	Kec. Cipatat	00.000 ³	50.000 ²	00.000 ²	0.000 ¹⁵
.	Kec. Cipongkor				
.	Kec. Cicalong				
.	Wetan Kec. Cipendeuy				

	Kec. Gununghalu				
	Kec. Lembang				
	Kec. Saguling				
KLUSTER D					
	Kec. Rongga	3 50.000	3 00.000	2 50.000	20 0.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, 2011

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya perjalanan dari kecamatan lain ke kecamatan Batujajar adalah Rp.100.000 – Rp. 200.000. Namun standar biaya diatas adalah standar biaya perjalanan dinas pegawai negeri pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat, sehingga kisaran biayanya jauh lebih tinggi dari biaya transportasi yang biasa dikeluarkan oleh masyarakat. Untuk masyarakat, biaya rata-rata yang dikeluarkan menuju kecamatan Batujajar mencapai Rp. 5.000 – Rp. 20.000 satu kali perjalanan. Biaya ini tergolong mahal mengingat jarak rata-rata dari kecamatan lain ke kecamatan Batujajar cenderung jauh. Kemudian selain dari segi biaya, berikut akan disajikan data dari segi jarak dan waktu tempuh:

Tabel 5.7

**Waktu Tempuh Perjalanan Angkutan Kota pada Lintasan Trayek di
Kabupaten Bandung Barat**

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Waktu Perjalanan (menit)	Frekuensi (kend/jam)	Jumlah kendaraan
1.	64	Lembang-Maribaya-Cibodas	49.25	7	39
2.	65	Lembang-Cikawari	13	1	12
3.	66	Lembang-Cikole	20.5	44	65
4.	67	Lembang-Cijengkol	30.5	1	4
5.	69	Lembang-Cisarua	22.5	14	76
6.	70	Cikole-Tangkuban Perahu	5.5	1	1
7.	86	Padalarang-Cikalong Wetan-Cipeundeuy	37.75	32	174
8.	87	Padalarang-Gunung Bentang	35.75	33	45
9.	88	Padalarang-Pangheotan	44.25	2	15
10.	89	Padalarang-Parongpong	49	8	15
11.	90	Padalarang-Rajamandala	37.75	40	168
12.	94	Cisarua-Pangheotan	39	2	10
13.	95	Cililin-Sindangkerta-Gunug Halu	40.5	4	22
14.	96	Cililin-Cijenuk-Baranangsiang	49.75	11	47

15.	104	Cibitung-Rajamandala	30	3	20
16.	108	P. Tehnik-Ciwaruga-Cigugur-Parongpong	38.25	9	45

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, 2011

Dari tabel 5.7 tidak terlihat kendaraan umum yang destinasinya adalah kecamatan Batujajar sebagai pusat pemerintahan saat ini. Namun, berdasarkan obeservasi, pada trayek di tabel 5.7, kendaraan umum yang melewati kecamatan Batujajar khususnya yang melewati pusat pemerintahan daerah kabupaten Bandung Barat adalah trayek nomor 95 dengan lintasan Cililin-Sindangkerta-Gununghalu dengan waktu perjalanan 40,5 menit, dan frekuensi kendaraan 4 kendaraan per jam dan trayek nomor 96 dengan lintasan Cililin-Cijenuk-Baranangsiang dengan waktu perjalanan 49,75 menit dan frekuensi kendaraan 11 kendaraan per jam.

Sedangkan untuk kecamatan di luar trayek 95 dan 96 dapat menjangkau kecamatan Batujajar dengan cara transit di kecamatan Padalarang kemudian melanjutkan ke kecamatan Batujajar menggunakan dua kali angkutan kota yakni angkutan kota yang melewati daerah Cimareme kemudian dilanjutkan dengan angkutan kota tujuan kecamatan Cililin yang melewati kecamatan Batujajar. Adapun waktu perjalanan dari kecamatan Padalarang ke kecamatan Batujajar tidak memakan waktu yang lama, rata-rata angkutan kota dari Padalarang ke kecamatan Batujajar memakan waktu kurang lebih 10 menit dan angkutan kota yang melintas pun cukup banyak kira-kira 10 angkutan kota per jam.

Berdasarkan pemaparan diatas, prakondisi dari Bandung Barat dapat dikatakan telah memadai. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki jumlah rata-rata di provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi sudah baik meskipun sempat menurun, tapi kini pertumbuhan ekonomi Bandung Barat terus menunjukkan kenaikan. Dari segi IPM kabupaten Bandung Barat menempati kategori menengah atas yang artinya adalah baik bagi ukuran sebuah daerah otonom yang baru berjalan selama kurang lebih lima tahun. Namun dari segi PDRB Bandung Barat masih tertinggal dibanding daerah induk dan rata-rata

PDRB non migas provinsi Jawa Barat. Kemudian dari segi pendapatan asli daerah, kabupaten Bandung Barat juga masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Selain prakondisi yang termasuk pada persyaratan pembentukan daerah otonom menurut PP 78 tahun 2007 diatas, terdapat prakondisi yang menguntungkan bagi kabupaten Bandung Barat yang merupakan peninggalan dari kabupaten induknya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Umar dari Bappeda Bandung Barat, sebagai berikut :

“Nah, setelah dimekarkan, pada dasarnya juga kalo kabupaten induk sama, dia maju gitu. Sisi lain punya ini, eh pabrik-pabrik di sana, di Rancaekek. Nah itu Rancaekek itu pabrik-pabrik, kemudian juga wilayah ini wisata, di wilayah selatan ini objek wisata. Gitu. Disana itu, kemudian juga antara perbatasan Bandung dengan Garut, induknya itu ada panas bumi, itu dari tanah. Itu juga untuk pertumbuhan ekonominya jadi tinggi juga gitu. Nah, untuk yang baru ini, yang baru juga sama gitu. Pertama untuk pertumbuhan ekonominya itu dia sudah punya eksistingnya ini kawasan industri ini. kemudian juga, dari PLTA. Gitu. PLTA Saguling, kemudian PLTA Cirata, nah kita punya itu. Kemudian juga, perkebunan. Perkebunan teh Panglejar itu, PT Nusantara 8, itu juga sama ya. Kemudian juga hmm ada objek wisata Bandung Barat itu yang paling digemari adalah objek wisata wilayah Lembang. Lembang itu termasuk wilayah Bandung Barat” (Umar, 2012).

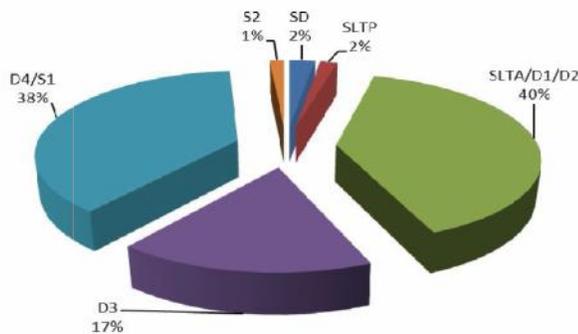
Keberadaan sejumlah pabrik-pabrik yang telah ada sebelumnya, juga objek wisata yang telah terkenal sebelumnya membuat kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya yang berpotensi dalam peningkatan perekonomian daerah. Saat ini kabupaten Bandung Barat hanya perlu mengembangkan kondisi sumber daya tersebut untuk menciptakan daya saing bagi daerahnya.

5.2 Daya Saing Kabupaten Bandung Barat

Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk memperlihatkan gambaran daya saing kabupaten Bandung Barat, terdapat beberapa analisis faktor daya saing berdasarkan elaborasi teori dan kajian tentang daya saing daerah. Faktor tersebut adalah faktor kondisi, institusional, ekonomi lokal, dan sosial, politik, budaya, dan keamanan. Gambaran daya saing kabupaten Bandung Barat didapat dari hasil penyebaran kuesioner terhadap pelaku usaha di kabupaten Bandung Barat dan dari data statistik, berikut gambaran daya saing kabupaten Bandung Barat dilihat dari per-dimensi daya saing daerah.

5.2.1 *Factor Condition*

Kondisi faktor yang menjadi input bagi daya saing kabupaten Bandung Barat adalah dilihat dari segi sumber daya manusia, sumber daya modal, dan infrastruktur. Sumber daya manusia sendiri dilihat dari dua aspek yakni dari segi kuantitas dan segi kualitas. Sumber daya manusia yang menjadi input bagi daya saing daerah terdiri dari dua, yakni dari pegawai negeri daerah dan dari tenaga kerja yang terdapat di Bandung Barat. Dari segi kuantitas, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 10.329 orang yang terdiri dari gol I = 150 orang, gol II = 1 974 orang, gol III = 5.807 orang, dan gol IV = 2.398 orang (Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2010). Kualitas PNS tersebut dapat dilihat salah satunya melalui jenjang pendidikan mereka, seperti yang tertera pada grafik berikut:



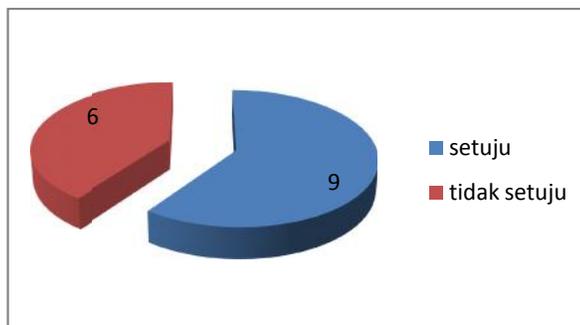
Grafik 5.1

Jenjang Pendidikan PNS

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2010

Jumlah PNS Bandung Barat dapat dikatakan dalam level rata-rata menengah melihat rata-rata PNS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 14.843 orang. Kabupaten induknya sendiri yakni kabupaten Bandung memiliki jumlah PNS sebanyak 31.726 orang. Kemudian kualitas PNS Bandung Barat dilihat dari jenjang pendidikan pada grafik 5.1 dapat terlihat bahwa sebagian besar PNS Bandung Barat merupakan lulusan SLTA/D1/D2 yakni sebesar 40% atau sebanyak 4.132 orang, sedangkan dari lulusan D4/S1 sebesar 38% atau sebanyak 3.925 orang dan lulusan dari D3 sebesar 17% atau sebanyak 1.756 orang. Lulusan S2 masih sedikit sekali yakni sebesar 1% atau 137 orang.

Kuantitas dan kualitas dari PNS tentunya akan berdampak pada performa penyelenggaraan kinerja dan pelayanan publik. Untuk melihat kualitas PNS dari segi pelayanan kepada pelaku usaha, telah diwawancarai 15 pelaku usaha dan hasilnya adalah sebagai berikut:



Grafik 5.2

Kualitas PNS

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan grafik 5.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku usaha yakni sebanyak 9 pelaku usaha menyatakan bahwa PNS Bandung Barat sudah berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Responden menyatakan bahwa PNS Bandung Barat sudah baik dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan ramah. Sedangkan sisanya sebanyak 6 pelaku usaha menyatakan bahwa PNS Bandung Barat masih kurang dari segi kualitas pelayanan terhadap pelaku usaha. Alasan responden adalah PNS Bandung Barat cenderung lambat dalam memberikan pelayanan dan tidak pernah memberi tahu pelaku usaha kalau ada acara terkait dengan dunia usaha. Adanya perbedaan pelayanan dari PNS kepada pelaku usaha dikarenakan PNS yang memberikan pelayanan tidak memiliki standar yang sama ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Perlakuan PNS kepada pelaku usaha yang menjadi UMKM binaan Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM akan lebih baik daripada pelaku usaha yang bukan termasuk pada UMKM binaan. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha yang menjadi UMKM binaan lebih sering melakukan komunikasi yang baik dengan PNS sehingga pelayanan yang diberikan pun menjadi lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha yang jarang berkomunikasi dengan PNS.

Sumber daya manusia yang juga penting dalam daya saing daerah adalah sumber daya tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja merupakan input bagi daya saing kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2009 jumlah pencari kerja yang terdaftar terdapat sebanyak 10.755 orang. Total jumlah penduduk usia kerja 10 tahun ke atas berjumlah 584.783 orang yang bekerja di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Dari jumlah tersebut, status pekerjaan sebanyak 152,765 orang adalah berwirausaha sendiri, 54,543 orang adalah berusaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap, sebanyak 241,434 orang adalah karyawan, dan sebanyak 136,041 adalah pekerja bebas dan tidak dibayar. Faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Tenaga kerja akan menambah input dalam pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi agar masuk ke daerah Bandung Barat.

Kemudian dari segi biaya tenaga kerja, upah minimum regional (UMR) di kabupaten Bandung Barat sendiri adalah sebesar Rp. 1.236.991,00. UMR tersebut tergolong cukup tinggi bagi ukuran sebuah kabupaten. Namun kebijakan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat pada kenyataannya memang masih tergantung pada perusahaan. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor yang dapat mendatangkan sumber investasi. Biaya tenaga kerja yang murah umumnya disukai oleh investor untuk berinvestasi di daerah. Namun biaya tenaga kerja yang murah tidak selalu baik karena di sisi tenaga kerja upah yang kecil akan merugikan mereka. Oleh karena itu, disinilah peran pemerintah daerah muncul dalam menangani hal tersebut. Akhirnya keberpihakan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat kepada tenaga kerja dapat terlihat dari penetapan UMR yang cenderung tinggi. namun, tetap saja implementasi pelaksanaan UMR berada ditangan perusahaan sehingga pemerintah daerah sendiri kurang ikut campur lebih jauh.

Faktor kondisi selanjutnya adalah sumber daya modal. Dalam teori ekonomi banyak disebutkan bahwa akumulasi modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Kemudian berkaitan dengan daya saing daerah, sumber daya modal memainkan peranan yang penting, terutama bagi pelaku usaha. Sumber daya modal yang ada di kabupaten Bandung Barat dapat berupa koperasi, lembaga keuangan penyedia modal seperti Bank dan lembaga lainnya.

Tabel 5.8

Rekapitulasi Perkembangan Koperasi Per-Kecamatan Tahun 2007-2009

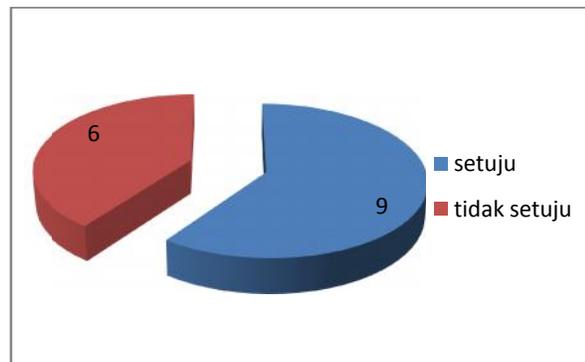
o	Kode BPS	Kecamatan	Jumlah koperasi		
			2007	2008	2009
1.	010	Rongga	52	56	59
2.	020	Gununghalu	15	20	20
3.	030	Sindangkerta	28	27	29
4.	040	Cililin	63	63	63
5.	050	Cihampelas	41	41	47
6.	060	Cipongkor	25	27	28

7.	0 70	Batujajar	23	24	24
8.	0 80	Cipatat	27	27	29
9.	0 90	Padalarang	25	27	28
10.	1 00	Ngamprah	75	75	79
11.	1 10	Parongpong	36	39	49
12.	1 20	Lembang	61	69	73
13.	1 30	Cisarua	29	31	31
14.	1 40	Cikalongwetan	6	7	7
15.	1 50	Cipeundeuy	43	43	43
Jumlah			549	576	608

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2010

Jumlah koperasi di kabupaten Bandung Barat sebanyak 608 pada tahun 2009. Koperasi ini berperan dalam menyediakan modal kepada pelaku usaha. Namun dari hasil wawancara dan observasi sebagian besar koperasi tidak berjalan dengan efektif. Akhirnya pilihan lain dalam memperoleh modal jatuh pada Bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank yang menjadi penyedia modal oleh banyak pelaku usaha di Bandung Barat adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jabar. Kemudian berdasarkan observasi, di Bandung Barat telah tersedia banyak lembaga peminjaman uang seperti Adhira, Bima Finance, dan lain-lain.

Dari ketersediaan lembaga penyedia modal, selanjutnya yang penting adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh modal tersebut. Survey dilakukan kepada 15 pelaku usaha mengenai kemudahan akses dalam mendapatkan modal usaha dan hasilnya adalah sebagai berikut :



Grafik 5.3

Kemudahan Akses Permodalan

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2012

Dari hasil survey kepada 15 pelaku usaha, sebanyak 9 pelaku usaha menyatakan mudah dalam akses ke sumber permodalan. Responden menyatakan mudah untuk mendapat pinjaman kepada Bank ataupun koperasi selama ada surat izin usaha. Kemudian juga terdapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meminjam modal. Ketentuan KUR sendiri sudah ditetapkan misalnya di Bank BRI sebesar 10 juta rupiah. Untuk mendapat KUR pelaku usaha menjaminkan BPKB. Ibu Ely, kepala bidang UMKM kabupaten Bandung Barat menjelaskan saluran permodalan khususnya bagi UMKM,

“kalo lembaga perbankan mah sekarang kan ada program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Itu kan pelaku usaha langsung berhubungan dengan perbankan. Ya gitu kan... trus kita hanya memberi tahu lah bahwa perbankan ini loh yang ada bunganya segini segini.. silakan mereka mengakses langsung. Trus untuk tahun sekarang hmmm ada KPR (Kredit Perusahaan Rakyat), itu khusus untuk BPD” (Ely, 2012).

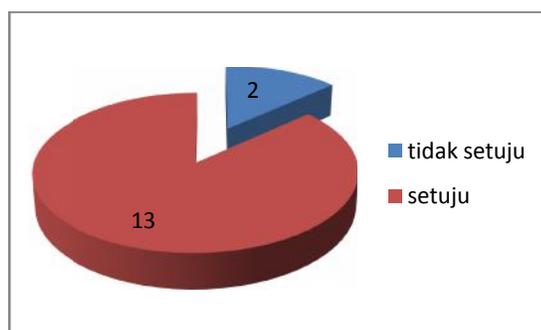
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha untuk mengakses permodalan sebatas sebagai fasilitator, sebagaimana ditegaskan kembali oleh ibu Ely, kepala bidang UMKM kabupaten Bandung Barat,

“iyah iyah, mengarahkan dia. Mengarahkan begini, kita ngasih mm ini loh kita ngasih sosialisasi kepada mereka, gitu kan.. ada program dari

pemerintah, ini KCR yah yang bunganya sedikit. Cuma kan perbankan banyak nih yang mengucurkan dana untuk usaha mikro kecil. Nah itu kan terserah mereka nantinya larinya kemana. Kita hanya memfasilitasi untuk memberitahukan bahwa emm ada bantuan modalnya dalam artian kredit dengan bunga murah. Gitu aja” (Ely, 2012).

Meskipun dari pemerintah daerah sudah berusaha menyosialisasi mengenai permodalan, ternyata masih ada pelaku usaha yang masih kesulitan untuk mengakses permodalan. Dari survey kepada 15 pelaku usaha, sebanyak 6 pelaku usaha menyatakan sulit untuk mengakses permodalan. Hal ini dikarenakan responden merasa bunga yang dikenakan terhadap mereka terlalu tinggi yakni sebesar 5%. Selain itu responden sebagian besar merasa rumit bila meminjam modal dikarenakan harus ada jaminan yang mereka keluarkan.

Faktor kondisi terakhir yang penting adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur jalan, listrik, transportasi, dan komunikasi. Untuk infrastruktur jalan, menurut data dari Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2010, Panjang jalan di wilayah Kabupaten Bandung Barat seluruhnya mencapai 612,49 kilometer. Yang terdiri dari panjang jalan Negara 50.78 kilometer, panjang jalan Provinsi 42.08 kilometer, Kabupaten 519,63 kilometer. Dari keseluruhan panjang jalan kabupaten Bandung Barat, dilakukan survey kepada 15 pelaku usaha dan tanggapan responden mengenai kualitas jalan di Bandung Barat adalah sebagai berikut :



Grafik 5.4
Kualitas Jalan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey kepada 15 pelaku usaha mengenai kualitas jalan, sebagian besar responden yakni sebanyak 13 responden menyatakan bahwa kualitas jalan di Bandung Barat sudah baik. Sedangkan sisanya sebanyak 2 responden menyatakan kualitas jalan di Bandung Barat masih belum baik. Kualitas jalan yang baik tentunya akan mendukung bagi lancarnya proses distribusi bagi kalangan dunia usaha.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur lain yang penting adalah transportasi. Hal ini dikarenakan transportasi merupakan hal yang penting untuk membuka akses baik dari segi pelayanan maupun akses masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Adapun di kabupaten Bandung Barat sudah tersedia transportasi terutama antar kecamatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.9
Lintasan Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Jarak (km)
1.	64	Lembang-Maribaya-Cibodas	3
2.	65	Lembang-Cikawari	20
3.	66	Lembang-Cikole	12
4.	67	Lembang-Cijengkol	15
5.	69	Lembang-Cisarua	12
6.	70	Cikole-Tangkuban Perahu	7
7.	86	Padalarang-Cikalong Wetan-Cipeundeuy	20
8.	87	Padalarang-Gunung Bentang	9
9.	88	Padalarang-Pangheotan	7
10.	89	Padalarang-Parongpong	48
11.	90	Padalarang-Rajamandala	24
12.	94	Cisarua-Pangheotan	12
13.	95	Cililin-Sindangkerta-Gung Halu	18
14.	96	Cililin-Cijenuk-Baranangsiang	21
15.	104	Cibitung-Rajamandala	25
16.	108	P. Tehnik-Ciwaruga-Cigugur-Parongpong	16

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

Dari tabel 5.9 dapat dilihat bahwa umumnya sudah terdapat trayek angkutan kota pada sebagian besar kecamatan di kabupaten Bandung Barat.

Dengan adanya sarana transportasi ini akan mendukung bagi masyarakat salah satunya para pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya.

Selain dari infrastruktur jalan dan transportasi, infrastruktur lain yang mendukung bagi daya saing daerah adalah ketersediaan listrik. Ketersediaan listrik di Bandung Barat baik mengingat kabupaten Bandung Barat telah memenuhi kebutuhan energi nasional dengan tiga pembangkit listrik utama, yakni pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Saguling, Cirata, dan sebagian Jatiluhur. Selain itu, akan ada proyek pembangunan PLTA di Cisokan dengan potensi ketersediaan listrik 1.040 MW yang direncanakan akan rampung pada tahun 2016.

5.2.2 Institutional Factor

Dalam menciptakan daya saing daerah, tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat. Wujud campur tangan pemerintah daerah yang nyata adalah melalui pembuatan regulasi yang terkait dengan penciptaan daya saing yang juga terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bandung Barat untuk mengatur iklim usaha adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kurun waktu 5 tahun sejak dimekarkan pada tahun 2007, pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat sudah mengeluarkan Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Perda mengenai pajak dan retribusi daerah ini merupakan suatu keharusan dikarenakan adanya peraturan pemerintah di atasnya yang mewajibkan daerah untuk memiliki Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah. sampai tahun 2012 ini di kabupaten Bandung Barat terdapat delapan Perda yang mengatur tentang pajak, antara lain: Perda No. 1 Tahun 2011 tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Perda No 25 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, Perda No. 28 Tahun 2011 tentang pajak hotel,

Perda Np. 2 Tahun 2011 tentang pajak air tanah, Perda No. 26 Tahun 2011 tentang pajak restoran, Perda No. 29 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Perda No. 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Kemudian untuk retribusi daerah, kabupaten Bandung Barat memiliki lima Perda, yakni Perda No. 6 Tahun 2011 tentang retribusi kesehatan, Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dan retribusi persampahan, Perda No. 21 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, Perda No. 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Perda pajak dan retribusi daerah tersebut diatas salah satu fungsinya adalah menjamin kepastian hukum salah satunya bagi pelaku usaha yang tentunya sering berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi daerah. Selain Perda pajak dan retribusi, Perda yang penting terkait dengan dunia usaha adalah Perda mengenai perijinan. Perijinan merupakan salah satu kelengkapan bagi pelaku usaha untuk memulai usahanya. Oleh karena itu, kejelasan dan kemudahan dalam segi perijinan akan menarik bagi pelaku usaha untuk mengurus perijinan usahanya di kabupaten Bandung Barat. Sampai tahun 2012 ini terdapat terdapat empat Perda perijinan, yakni: Perda No. 7 Tahun 2010 tentang perijinan kesehatan, Perda No. 18 Tahun 2011 tentang perijinan perdagangan, Perda No. 19 Tahun 2011 tentang perijinan perindustrian, dan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB).

Kemudian pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat juga mengeluarkan peraturan lain yang terkait dengan dunia usaha yakni dengan mengeluarkan Perda pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) yakni Perda No.4 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bandung Barat nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah.

Pendirian BPMPT ini merupakan respon pemerintah daerah Bandung Barat atas peraturan pemerintah pusat mengenai adanya lembaga atau badan

pelayanan satu pintu. Berikut pemaparan mengenai BPMPT dari ketua bagian penanaman modal BPMPT, Avira :

“BPMPT ini baru terbentuk setahun yang lalu, tadinya sih bentuknya kantor. Yah barangkali untuk sejarah nomenklatur dinas eh badan. Tadinya sih berupa kantor penanaman modal, sejak adanya Kab. Bandung Barat, Bandung Barat kan baru lima tahun ya neng. Nah setelah satu tahun ini jadi badan. Jadi ada peningkatan status, yang tadinya kantor jadi badan. Jadi kalau sekarang eselon II lah kepala badannya. Dari struktur organisasi kita ada tiga bidang. Setelah kaban kepala badan trus ada sekban sekretaris badan. Kemudian dibawahnya ada tiga bidang yaitu bidang penanaman modal, bidang sistem informasi dan pengaduan, dan layanan perijinan. Di bidang penanaman modal ada dua subdit, subdit promosi dan kerjasama, itu aja barangkali, lalu ada subdit pengembangan penanaman modal, yang adanya investasi” (Avira, 2012).

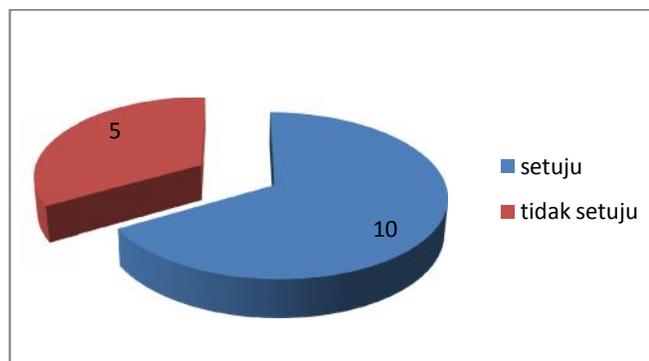
Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan BPMPT ini adalah untuk melayani perijinan dan penanaman modal. Artinya adalah BPMPT ini merupakan satu-satunya badan yang memberikan pelayanan terkait dengan dunia usaha. Pembentukan BPMPT ini adalah salah satunya untuk mengurangi kompleksitas pelaku usaha untuk mengurus ijin dan menanamkan modal. Namun, berhubung BPMPT ini masih baru berjalan satu tahun dan baru efektif sejak Maret 2012, esensi pelayanan satu atap pun masih belum terlihat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan ibu Avira,

“Fungsi kita ini kan sebagai koordinator jadi kembali cara teknisnya kembali ke dinas-dinasnya sendiri. Mau kemana? Nih ada investor loh, kita arahkan ke dinas-dinas untuk dibagaimanakan..... Balik laginya ke situ. Secara teknisnya itu dinas yang melakukan, kita disini istilahnya sebagai fasilitator” (Avira, 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengurusan ijin masih dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Namun, BPMPT ini dimaksudkan agar

pelaku usaha hanya perlu mengurus perijinan di BPPPT saja sedangkan untuk pengurusan terkait dinas lain BPPPT yang akan mengkoordinasikannya.

Terkait dengan badan yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha, seperti perijinan, dilakukan survey kepada 15 pelaku usaha. Adapun hasil survey mengenai kualitas lembaga/badan/kantor yang memberikan pelayanan terkait dengan dunia usaha dapat dilihat pada grafik dibawah:



Grafik 5.5

**Kualitas Lembaga/Badan/Kantor yang Memberikan Pelayanan
Kepada Dunia Usaha**

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan grafik 5.5 diketahui sebagian besar responden yakni sebanyak 10 responden menyatakan bahwa kualitas lembaga/kantor/badan yang memberikan pelayanan terkait dengan dunia usaha sudah baik. Responden beralasan bahwa lembaga tersebut memberikan pelayanan secara gratis. Kemudian perhatian yang diberikan lembaga tersebut kepada pelaku usaha sangat membantu pelaku usaha, terutama bila dibandingkan dengan pengurusan di lembaga sebelum kabupaten Bandung Barat terbentuk. Sedangkan sisanya, 5 pelaku usaha menyatakan kualitas lembaga/kantor/badan yang memberikan pelayanan terkait dunia usaha masih belum baik. Hal ini dikarenakan menurut responden pelayanan yang diberikan masih rumit dan juga kadang memerlukan untuk membayar uang agar pelayanan cepat dilakukan.

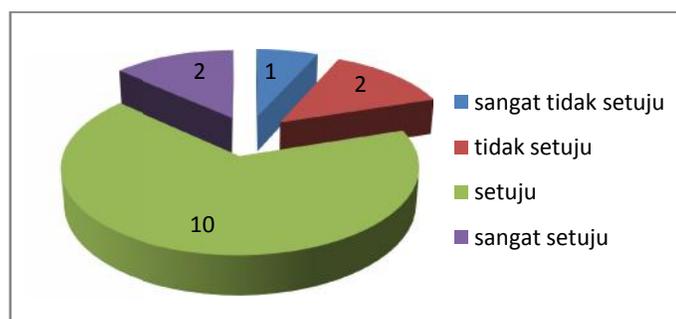
Pembentukan BPPPT juga merupakan salah satu manifestasi dari komitmen dan perhatian dari pemimpin daerah terhadap dunia usaha. Hal ini dikarenakan pembentukan BPPPT dimaksudkan untuk memudahkan para

pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perijinan dan memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Bandung Barat. Namun dari segi implementasi sampai saat ini dalam hal penanaman modal masih terkendala beberapa hal, seperti yang diungkapkan oleh kepala bagian penanaman modal, ibu Avira,

“..... setau saya sih investor memang tau Kabupaten Bandung Barat banyak potensinya yang dapat dikembangkan. Cuma yang melirik untuk menanamkan modalnya itu belum ada..... karena ada keterbatasan yang mereka inginkan gitu loh. Kaya contohnya kaya gini, kemaren PT Modern Internasional, bergerakinya dalam bidang peternakan. Mereka butuh lahan 500 hektar. Kita enggak ada lahan itu. Jadi enggak jadi lagi.” (Avira, 2012).

Oleh karena itu, langkah strategis yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah Bandung Barat untuk menggalakan penanaman modal adalah dengan memberi informasi sebanyak-banyaknya kepada para investor mengenai potensi yang ada di kabupaten Bandung Barat. Kemudian untuk kemudahan pengurusan ijin dan penanaman modal, para pelaku usaha diarahkan untuk mengurus pada satu badan saja, yakni BPMPT.

Untuk menilai komitmen dan perhatian pemerintah daerah Bandung Barat terhadap dunia usaha, kuesioner telah disebarkan kepada 15 pelaku usaha. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :



Grafik 5.6

Ada perhatian dan komitmen dari pemimpin daerah terhadap dunia usaha

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2012

Dari grafik 5.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merasa ada perhatian dan komitmen pemimpin daerah terhadap dunia usaha, yakni dari sebanyak 10 responden menjawab setuju dan sebanyak 2 responden menjawab sangat setuju. Responden merasa pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat menaruh perhatian besar pada dunia usaha khususnya UMKM yakni dengan memudahkan pengurusan perijinan dan pinjaman uang. Selain itu juga pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan bagian UMKM sering memberi penyuluhan kepada pelaku usaha berupa pelatihan-pelatihan yang selalu diadakan 2-3 kali dalam setahun. Kemudian juga responden merasa pemerintah mendukung dunia usaha terutama dengan mengajak pelaku usaha untuk memamerkan produknya dalam pameran-pameran yang diadakan baik di kabupaten Bandung barat maupun daerah lainnya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari ibu Ely, kepala bidang UMKM,

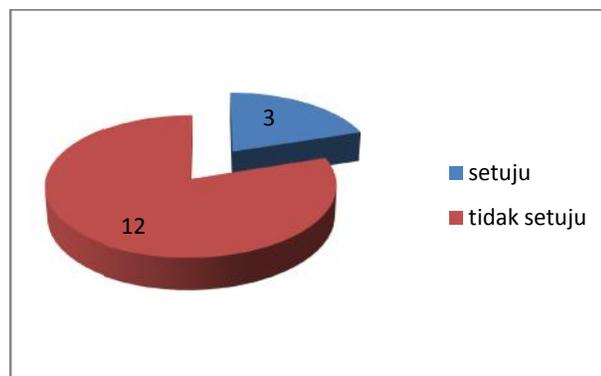
“yah pengembangan mereka gitu untuk lebih berkembang? Ya kita dari pemerintah sendiri kita kan eeh mereka kan diberikan pelatihan-pelatihan kaya gitu yah. Pelatihan-pelatihan kewirausahaannya, eeh apah ya kewirausahaan dan kita memfasilitasi untuk kerajinan makanan, kita kan ada pameran nih, promosi produk, nah mereka dari situ gitu. Untuk mengembangkan gitu kan..” (Ely, 2012).

Sedangkan sisanya merasa kurang ada perhatian dan komitmen dari pemimpin daerah terhadap dunia usaha, yakni terlihat dari 13% atau sebanyak 2 responden menjawab tidak setuju, dan 7% atau satu responden menjawab sangat tidak setuju dikarenakan wujud perhatian pemerintah dinilai masih belum fokus dan tidak berkelanjutan, contohnya adalah produk yang masih sederhana tapi dibawa ke pameran. Responden merasa pemerintah perlu juga untuk memfasilitasi pelaku usaha dari segi pengendalian mutu produk.

5.2.3 Ekonomi Lokal

Untuk menciptakan daya saing daerah, posisi ekonomi lokal perlu dipertimbangkan karena potensi ekonomi lokal akan ikut membentuk

kompleksitas daya saing daerah. Beberapa literatur menyatakan bahwa untuk menciptakan daya saing diperlukan teknologi yang mendukung terutama bagi suatu industri maupun jenis usaha lainnya. Oleh karena itu, berikut akan digambarkan penggunaan teknologi pada pelaku usaha di kabupaten Bandung Barat, khususnya pengrajin wajit di kecamatan Cililin:



Grafik 5.7

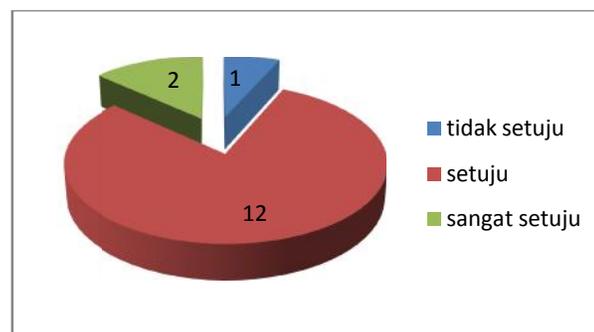
Penggunaan Teknologi pada Usaha

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey pada 15 responden, diketahui bahwa sebanyak 12 usaha belum menggunakan teknologi dalam usahanya. Responden menyatakan bahwa usaha mereka terlalu sederhana untuk menggunakan teknologi canggih, selain itu juga teknologi yang canggih tentu memerlukan modal yang banyak. Responden menyatakan bahwa usaha wajit memiliki resep yang turun temurun, dan resep tersebut adalah penggunaan tenaga manual pada proses produksi, yakni terutama proses pamarutan kelapanya. Sehingga usaha wajit di Cililin sebagian besar tidak menggunakan mesin-mesin untuk proses produksinya. Berbeda dengan sebanyak 3 responden yang menyatakan sudah menggunakan teknologi pada usaha mereka. Berhubung usaha yang mereka jalankan adalah usaha wajit, maka teknologi yang digunakan pun masih sederhana. Teknologi tersebut berupa penggunaan mesin parut. Pelaku usaha yang menggunakan mesin parut adalah mereka yang mempunyai modal setidaknya untuk menyewa atau membeli mesin parut. Responden menyatakan pemerintah pernah memfasilitasi untuk penggunaan teknologi pada usaha kecil, namun tidak ada kelanjutannya lagi.

Penggunaan teknologi pada usaha makanan tradisional, terutama wajit, dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pertama adalah dalam konteks menjaga mutu wajit sebagai makanan tradisional yang baik digunakan adalah melalui proses manual. Proses pamarutan kelapa dengan manual diyakini oleh penjual dan pembeli akan menghasilkan wajit yang lebih bermutu dibandingkan dengan pamarutan kelapa yang dilakukan oleh mesin. Sedangkan pandangan kedua adalah teknologi dipandang sebagai keunggulan suatu usaha dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun, pandangan kedua ini kurang relevan bila diterapkan pada usaha-usaha tradisional karena hal yang menjual dari usaha tradisional adalah produksinya secara manual. Oleh karena itu, hanya sedikit pelaku usaha wajit yang menggunakan teknologi dalam usahanya.

Dalam model daya saing menurut Porter (1990), untuk menciptakan daya saing daerah unsur yang paling penting adalah unsur pemasaran (*market based*). Adapun orientasi untuk pengembangan wilayah berdaya saing adalah melihat aksesibilitas usaha terhadap pasar. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apakah usaha lokal yang ada di kabupaten Bandung Barat sudah dapat menjangkau pasar interlokal, nasional, atau bahkan internasional. Berikut adalah hasil survey mengenai ekspansi pasar dari usaha lokal:



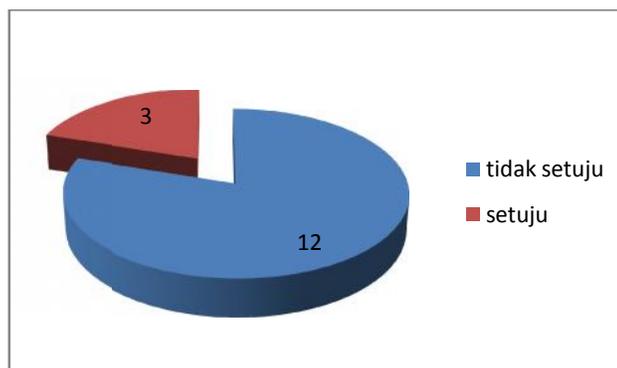
Grafik 5.8

Usaha Memperluas Pasar Interlokal, Nasional, Internasional

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey kepada 15 pelaku usaha, sebagian besar responden yakni sebanyak 12 responden menyatakan usaha mereka sudah merambah ke pasar interlokal. Begitupun sebanyak 2 responden juga sangat menegaskan bahwa

usaha mereka sudah merambah pasar interlokal. Hal ini dikarenakan permintaan dari luar daerah yang cukup tinggi akan produk dari pelaku usaha di kabupaten Bandung Barat. Umumnya pelaku usaha yang sudah memasarkan produk ke luar daerah tidak mencari sendiri pasar di luar daerah, melainkan adanya permintaan dari daerah lain yang sengaja datang sendiri ke pelaku usaha untuk membeli produk dan menjalin jaringan pasar antar daerah dengan pelaku usaha. Adapun daerah-daerah lain yang telah menjadi pasar bagi pelaku usaha adalah kota Bandung, kabupaten Garut, Cikampek, Bogor, Merak, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Bukittinggi, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Sedangkan satu responden menyatakan belum memperluas pasar ke luar daerah dikarenakan pelaku usaha masih memenuhi kebutuhan permintaan produk dalam daerah Bandung Barat saja. Berbicara mengenai pasar, terutama pada UMKM, tentu juga melibatkan pemerintah sebagai pihak yang juga memfasilitasi UMKM. Berikut hasil survey kepada pelaku usaha mengenai ada tidaknya peran pemerintah dalam mengembangkan pasar.



Grafik 5.9

Pemerintah Membantu Mengembangkan Pusat Pasar

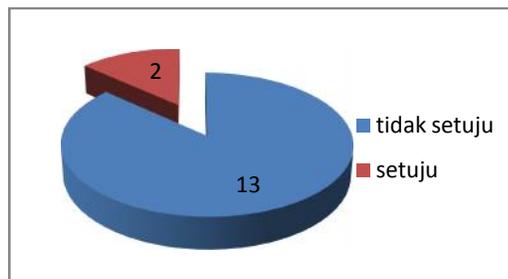
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey kepada 15 pelaku usaha mengenai peran pemerintah dalam membantu mengembangkan pusat pasar, sebagian besar responden, yakni sebanyak 12 responden menyatakan pemerintah tidak memiliki peran dalam mengembangkan pusat pasar. Hal ini dikarenakan pelaku usaha melakukan usaha tersendiri untuk memasarkan produknya. Seperti sudah dijelaskan bahwa pemasaran produk usaha dilakukan berdasarkan permintaan tersendiri dari konsumen sehingga peran pemerintah dalam mengembangkan pusat pasar tidak

menjadi perhatian sebagian besar para pelaku usaha. Sedangkan sebanyak 3 responden lainnya menyatakan pemerintah telah membantu pelaku usaha untuk mengembangkan pusat pasar, yakni melalui adanya pameran-pameran produk UMKM yang biasa dilakukan baik di daerah kabupaten Bandung Barat, juga di daerah lainnya. Hal ini juga ditegaskan oleh ibu Ely, kepala bagian UMKM dinas perindustrian dan perdagangan,

“.....untuk kerajinan makanan, kita kan ada pameran nih, promosi produk, nah mereka dari situ gitu. Untuk mengembangkan gitu kan..... Alhamdulillah dari pameran itu kalo produknya bagus kan dapat berkembang..” (Ely, 2012).

Namun, hanya pelaku usaha tertentu saja yang dapat mengenalkan produknya di pameran. Kemudian, selain melihat usaha pemerintah untuk mengembangkan pasar, penting juga untuk melihat usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri dalam melakukan penelitian terhadap pasar (*market research*), berikut hasil surveynya :



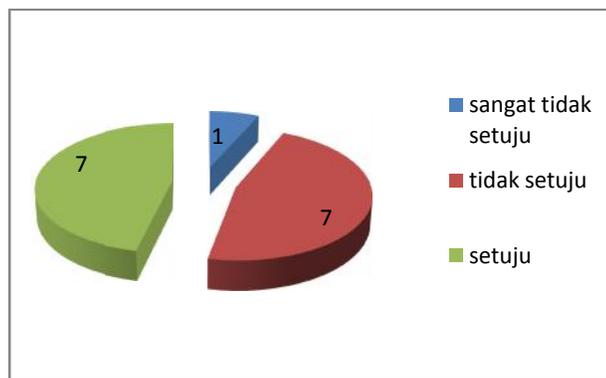
Grafik 5.10

Usaha Melakukan Penelitian Terhadap Pasar

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey kepada 15 responden, sebanyak 13 responden menyatakan tidak melakukan penelitian terhadap pasar. Pelaku usaha menyatakan usaha yang mereka jalankan lebih mengandalkan permintaan konsumen dibandingkan dengan mencari sumber pasar baru. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan produk kuliner mereka yang cukup tidak tahan lama sehingga resiko yang diambil untuk memasarkan di daerah lain menjadi terlalu tinggi untuk diambil. Sedangkan sisanya sebanyak 2 responden menyatakan mereka suka melakukan penelitian terhadap pasar mana saja yang dapat mereka masuki.

Umumnya mereka melakukan penelitian pasar dengan menjajaki terlebih dahulu daerah yang bersangkutan apakah layak atau tidak untuk dijadikan sebagai pasar. Hal ini juga berkaitan dengan jaringan pasar yang dibangun dalam dunia usaha, berikut hasil surveynya:

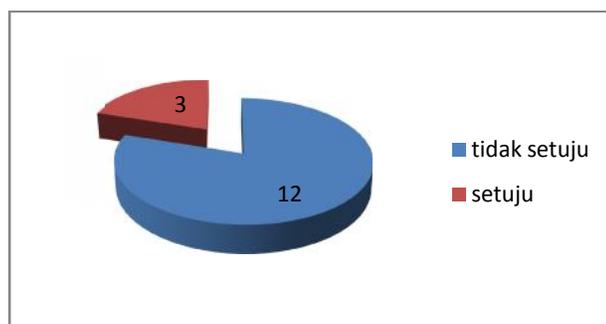


Grafik 5.11

Jaringan Pasar Yang Memberi Akses Informasi

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan hasil survey kepada 15 responden, sebanyak 7 responden menyatakan masih belum ada jaringan pasar yang memberi akses informasi, pun ditegaskan oleh satu responden lain. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya fungsi asosiasi pelaku usaha yang dibangun oleh para pelaku usaha. Sedangkan sebanyak 7 responden lainnya menyatakan terdapat jaringan pasar yang memberi akses informasi. Hal ini dikarenakan responden sudah menggunakan teknologi internet untuk bertukar informasi mengenai pasar. Jaringan kerja yang perlu dibangun untuk menciptakan daya saing adalah juga jaringan kerja antara pemerintah dan pelaku usaha, berikut hasil surveynya:



Grafik 5.12

Jaringan Kerja Antara Pemerintah Dan Pelaku Usaha

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan hasil survey kepada 15 responden, sebanyak 12 responden menyatakan tidak ada jaringan kerja antara pemerintah dan pelaku usaha. Sedangkan sisanya, sebanyak 3 responden menyatakan terdapat jaringan kerja antara pemerintah dan pelaku usaha. Dari informasi yang didapat dari para responden, sebenarnya sempat ada semacam asosiasi pengrajin yang juga didukung asosiasi kamar dagang yang sering mengadakan seminar mengenai kewirausahaan UMKM. Namun, sayangnya tidak ada kelanjutannya lagi sampai saat ini. kemudian juga pelaku usaha sempat ingin membentuk koperasi. Namun, sampai survey ini dilakukan, rencana tersebut masih sebatas wacana saja. Pelaku usaha mengaku sulit untuk membentuk koperasi dikarenakan diperlukan juga modal yang cukup lumayan untuk membentuk koperasi.

Terakhir adalah menurut Porter (1990) dalam penciptaan daya saing perlu adanya kluster industri, yakni pengelompokan geografis dari sejumlah industri yang saling terkait kegiatannya dan terhubung dalam satu komunitas serta saling melengkapi. Di kabupaten Bandung Barat sendiri masih belum terdapat kluster industri, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Asep dari disperindagkop,

“Kab. Bandung Barat belum memiliki kawasan industri, kawasan berikat. Masih menunggu rencana tata ruang dan tata wilayah kab. Bandung Barat. mudah-mudahan rencana kedepan Kab. Bandung Barat akan ada kawasan industri di daerah Cikalong dan Cipendeuy” (Asep, 2012).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Umar dari Bappeda Bandung Barat,

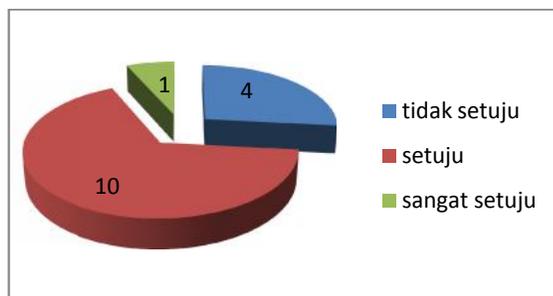
“iya, itu adanya di daerah Batujajar, Padalarang, itu tersebar gitu ya.. jadi itu kawasan industri. Walaupun itu yah harusnya kalau namanya kawasan industri harusnya satu kawasan..... Masuk itu sudah ada kawasan berikat seperti yang di.. mana itu? Yang di Bekasi itu ya.. daerah Jababeka itu. Itu, harusnya gitu. Tapi ini dulunya apa.. RTRW-nya ini

dikasih wilayah Batujajar itu untuk wilayah industri dengan sebagian perbatasan dengan Padalarang” (Umar, 2012).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sudah ada daerah yang khusus bercorak industri, yakni di kecamatan Batujajar dan Padalarang. Namun, karena rencana tata ruang dan wilayah masih bermasalah, yakni baru direvisi kembali pada Maret 2012, akhirnya tidak ada daerah satu pun di kabupaten Bandung Barat yang secara khusus untuk industri. Hal ini terlihat dari hasil observasi di kecamatan Batujajar dan Padalarang, kondisi keberadaan industri bercampur dengan pemukiman yang padat. Hal ini membuat kecamatan Batujajar dan Padalarang carut marut dengan banyaknya kendaraan dari industri yang berlalu lalang sedangkan penduduk juga dalam waktu yang bersamaan melakukan aktivitas sehari-hari. Akhirnya, kabupaten Bandung Barat merencanakan membentuk kawasan khusus industri di kecamatan Cikalong dan Cipendeuy.

5.2.4 Sosial, politik, budaya, dan keamanan

Untuk menciptakan daya saing daerah diperlukan kondisi sosial, politik, budaya, dan keamanan yang stabil. Iklim usaha yang aman dan stabil tentunya lebih disukai oleh pelaku usaha, terutama bila dikaitkan dengan penciptaan keunggulan daya saing. Tenaga kerja dan iklim usaha akan menjadi keunggulan kompetitif yang penting terutama ketika di daerah lain hal itu merupakan masalah (Bappenas, 2004). Dikemukakan juga oleh Syahresmita (2000:99) bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi, tugas utama pemerintah adalah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Adapun gambaran peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi dunia usaha di kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada grafik 5.13 berikut:



Grafik 5.13

Pemerintah Menciptakan Lingkungan Yang Aman Bagi Dunia Usaha

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey kepada 15 responden, sebagian besar responden yakni sebanyak 10 responden menjawab pemerintah sudah menciptakan lingkungan yang aman bagi dunia usaha, demikian juga dengan satu responden lain. Hal ini dikarenakan responden merasa pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat sudah memberikan kemudahan terutama dalam pengurusan perijinan usaha, terutama bagi UMKM perijinan digratiskan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Asep, kepala seksi dinas perindustrian,

“..... Mereka justru dengan keadaan Bandung Barat ini lebih merasa diperhatikan untuk segala layanan perijinan. Dulu kan harus mengurus di Soreang, sekarang kan lebih dekat. Dari segi pelayanan lebih cepat. Karena kita sudah punya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 ya yang tentang perijinan industri” (Asep, 2012).

Wujud peran pemerintah daerah dalam memperkuat potensi ekonomi adalah dengan mempermudah formalisasi pengurusan ijin usaha. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui banyaknya sektor usaha di kabupaten Bandung Barat. Kemudahan formalisasi usaha menunjukkan pemerintah daerah memberi ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan lebih jauh berkembangnya dunia usaha menguntungkan pemerintah daerah yakni dengan terbukanya lapangan pekerjaan di Bandung Barat. Selain itu juga responden menyatakan bahwa pemerintah daerah juga memonitor pelaku usaha UMKM baik melalui telepon maupun datang secara langsung ke pusat-pusat

UMKM. Kemudian sebanyak 4 responden menjawab pemerintah masih belum menciptakan lingkungan yang aman bagi dunia usaha. Responden merasa pemerintah daerah masih kurang menciptakan lingkungan yang stabil, terutama dari segi kestabilan harga dan bahan baku. Responden berharap pemerintah harusnya memantau harga dan alur distribusi bahan baku.

Iklim usaha yang aman dan kondusif juga bukan semata peran dari pemerintah daerah, tapi juga ada peran dari masyarakat itu sendiri. Yang lebih baik lagi adalah adanya kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Di kabupaten Bandung Barat sendiri masyarakatnya dapat dikatakan juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Asep, kepala seksi bagian perindustrian;

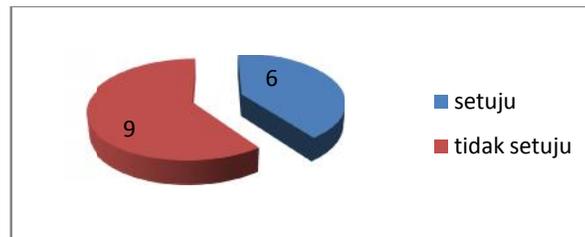
“Terus kita menjaga wilayahnya juga Alhamdulillah di kabupaten seluruh Indonesia kabupaten Bandung Barat ini lebih tertib. Coba lihat Cimahi, sedikit-sedikit demo, Bekasi juga ya. Kab Bandung Barat ini dapat menjadi pilot project bagi daerah lain karena campur tangan si aparaturnya bukannya sombong, yah lebih memperhatikan kalau ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Seperti pembentukan UMR, kita itu paling besar loh seJawa Barat. yah kalo dibandingkan sama Jakarta sih memang dibawah. Tapi mba ya lebih besar kalau dibandingkan dengan Cimahi, Kab. Bandung, Kota (Asep, 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menciptakan lingkungan yang aman terutama kestabilan dari sisi tenaga kerja, pemerintah daerah menetapkan upah minimum yang layak untuk mencegah gejolak yang akan terjadi pada tenaga kerja. Kemudian hal ini juga didukung oleh ibu Avira, kepala bagian penanaman modal, BPMPPT kabupaten Bandung Barat yang menyatakan,

“Em masih oke. Karena disini penyerapan tenaganya masih oke dan mendukung. Jangan sampe demo-demo kaya di Bekasi ya, itu kan salah satunya juga mungkin kebijakan kurang mendukung. Yah bukan berarti yang demo juga tidak signifikan yah? Tinggi sih tinggi, tapi yah itu menimbulkan gejolak. Nah untuk di kita ini signifikannya dalam arti yang

masyarakat masih merasakan adanya investasi. Misalnya tidak menghambat jalannya perindustrian, sehingga mereka dapat kerja lah” (Avira, 2012).

Kemudian selain dari segi keamanan dalam dunia usaha, hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan wilayah yang berdaya saing adalah kondisi sosial budaya. Faktor ini merupakan pendorong keberhasilan peningkatan daya saing yang terdiri dari nilai-nilai budaya yang berorientasi pembangunan serta adanya Konsensus dasar dalam masyarakat akan pembangunan industri dan kesiapan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam pasar global (Bappenas, 2005:28). Adapun konsensus tersebut dapat berupa kesepakatan diantara para pelaku usaha daerah di Kabupaten Bandung Barat yang dapat dilihat pada grafik berikut:



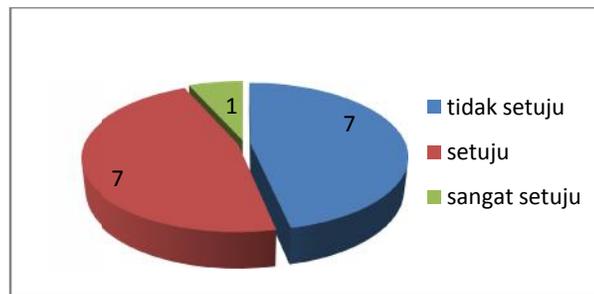
Grafik 5.14

Adanya Kesepakatan Bisnis Dalam Dunia Usaha

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan hasil survey kepada 15 responden, sebagian besar responden, yakni sebanyak 9 responden menyatakan tidak ada kesepakatan bisnis dalam usaha sejenis mereka. Sedangkan sisanya sebanyak 6 responden menyatakan ada kesepakatan bisnis dalam usaha mereka. Kesepakatan yang terjadi biasanya adalah kesepakatan dari segi harga jual produk. Meski kesepakatan yang terjadi tidak melalui keputusan formal, tetapi melalui kesepakatan informal diantara pelaku usaha. Biasanya kesepakatan tersebut dipicu oleh hal yang dialami serupa oleh semua pelaku usaha yakni seperti adanya kenaikan harga bahan baku yang mengharuskan pelaku usaha menaikkan harga produknya. Kemudian pendorong keberhasilan penciptaan daya saing daerah di kabupaten Bandung Barat juga dilihat dari segi kesiapan pelaku usaha di kabupaten Bandung Barat untuk dapat

bersaing dalam pasar global. Berikut hasil survey mengenai kesiapan pelaku usaha di kabupaten Bandung Barat:



Grafik 5.15

Usaha Memiliki Kesiapan Bersaing

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan survey kepada 15 responden, sebanyak 7 responden menyatakan tidak siap untuk bersaing. Responden merasa usaha mereka terlalu kecil untuk melakukan persaingan. Seorang responden dengan inisial U.D mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga jenis persaingan yang mereka hadapi, yakni persaingan dari usaha sejenis, beda jenis, dan musiman. Responden masih berkuat pada persaingan usaha sejenis pada daerah mereka sendiri sehingga masih belum dapat fokus untuk dapat bersaing ke luar daerah. Sikap pesimistis juga ini dikarenakan kendala dari segi ketahanan produk, yakni produk kuliner yang maksimal bertahan satu minggu saja. Sedangkan sebanyak 7 responden dan 1 satu responden lainnya menyatakan memiliki kesiapan untuk bersaing dengan produk usaha dari daerah lain. Hal ini dikarenakan responden percaya diri dengan kualitas produk kuliner yang dihasilkannya. Selain itu, beberapa responden bahkan sudah memasarkan produknya ke daerah lain seperti Garut, Cikampek, Merak, Bukittinggi, dan daerah lainnya.

Selain pemaparan penjabaran daya saing dari dimensi *factor condition*, *institutional factor*, ekonomi lokal, dan Sosial, politik, budaya, dan keamanan, dalam hal daya saing investasi daerah juga dapat dilihat dari kondisi riil investasi daerah. Dalam hal penanaman modal (investasi) di daerah, terdapat aturan pengurusan investasi. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala Seksi Dinas Perindustrian Kabupaten Bandung Barat;

“ yang dinamakan industri itu ada tiga. Ada yang disebut tanda daftar industri (TDI) investasi dari Rp. 5.000.000 - Rp. 200.000.000. kedua adalah ijin usaha industri untuk investasi dari Rp. 200.000.000 - Rp. 10.000.000.000. adapun di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang diperkenankan dikelola oleh Kabupaten Bandung Barat perijinannya adalah usaha industri dibawah Rp. 10.000.000.000. ada ijin usaha tetap yang dikeluarkan oleh kementerian perindustrian berdasarkan Kepmen no. 41 tahun 2010, namanya IUP. Kemudian yang dikelola oleh provinsi adalah PMA dan PMDN. Provinsi memiliki kewenangan mengelola investasi kurang dari 10 Milyar PMA dan atau PMDN melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi. Kalau di kab/kota menangani TDI dan IUI yang investasinya dibawah 10 M. di Bandung Barat sendiri ada industri agro, aneka industri, logam dan elektro.” (Asep, 2012).

Pengurusan ijin investasi yang ditangani langsung oleh Kabupaten Bandung Barat adalah investasi dibawah 10 Milyar. Sedangkan investasi diatas 10 Milyar dilakukan oleh level pemerintahan diatasnya, yakni Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Pusat. Investasi yang diurus oleh level Provinsi dan Pusat bersifat diketahui saja oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung barat;

“...Yang eksisting ini lebih banyaknya adalah kita sifatnya hanya mengetahui. Karena eh investor-investor yang ada itu di kota besar kan dimana kewenangan daerah pun dibatasi dengan nilai investasi dibawah 10 Milyar. Nah ini kan pasti diatas sekian Milyar, maka perijinannya tidak di kami. Sebaliknya ijin-ijin usaha yang biasa kami tangani seperti ijin swalayan, kaya yomart, kaya pasar modern lah, yah yang seperti ini. sementara investor besar itu masih di pusat atau di provinsi. Gitu.., kita hanya sekedar mengetahui. Kaya kemaren Indofood, merger dari perusahaannya menjadi terbuka, nah kita sudah terima saja dari BKPM untuk diketahui bahwa perusahaan ini ada kerjasama dengan Indofood

sudah merger dari perusahaannya atau apa-apa. Jadi sifatnya hanya mengetahui.” (Avira, 2012).

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Asep dan Ibu Avira, bahwa tingginya investasi Bandung Barat tersebut dilakukan pada tataran tingkat pemerintahan provinsi karena nilai investasi besar yakni diatas 10 milyar dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui BKPM. Sehingga, nilai investasi yang besar ini sebenarnya bukan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat. Sedangkan dalam perjalanan usaha peningkatan dan perluasan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat sendiri masih terkendala dalam hal pengembangan potensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Investasi Kabupaten Bandung Barat memiliki grafik yang menaik tiap tahunnya, terutama semenjak kabupaten ini dimekarkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu kabupaten Bandung Barat, untuk PMA kabupaten Bandung Barat menaik sedikit dari tahun 2008 ke tahun 2009 yakni dari \$156.192.790 menjadi \$157.929.632, dan menaik drastis pada tahun 2010 menjadi \$349.425.764. Begitu pun dengan PMDN yang menaik dari jumlah Rp.1.673.804.665.050 pada tahun 2008 menjadi Rp.1.678.804.665.050 pada tahun 2009 dan menaik lebih tinggi lagi pada tahun 2010 dengan jumlah Rp.2.037.927.751.918. Berikut gambar dari grafik perkembangan investasi di kabupaten Bandung Barat :

Tabel 5.10

**Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008-2011**

NO	TAHUN	PERUSAHAAN			NILAI INVESTASI				TENAGA KERJA				
		PMA	PMDN	JML	PMA	PMDN	JUMLAH	%	PMA		PMDN		JUMLAH
									TKI	TKA	TKI	TKA	
1	2008	36	48	84	\$ 330.217.633	Rp 1.931.031.193.322	Rp 4.902.989.890.322		7.905	971	11.351	13	20.240
2	2009	37	49	86	\$ 331.954.475	Rp 1.936.031.193.322	Rp 4.923.621.468.322		7.905	971	11.351	13	20.240
3	2010	28	35	63	\$ 349.425.764	Rp 2.037.927.571.918	Rp 5.182.758.447.918	5,26	7.440	55	12.407	22	19.924
4	2011	28	35	63	\$ 357.768.769	Rp 2.507.102.609.855	Rp 5.753.854.188.530	11,02	9.240	59	17.891	32	27.222

Sumber : BPPMPT Kab. Bandung Barat, 2012

Dari tabel 5.10 terlihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dalam peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN di kabupaten Bandung Barat. Peningkatan yang signifikan adalah peningkatan investasi dari tahun 2009 ke tahun 2010. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan oleh membaiknya perekonomian kabupaten Bandung Barat dalam beberapa sektor yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertanian, dan sektor pengangkutan. Peningkatan investasi juga dikarenakan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat pasca krisis yang terjadi pada tahun 2008. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya di kabupaten Bandung Barat melihat optimism pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung Barat yang stabil dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat.

Dari tabel juga dapat dilihat jumlah PMA jauh melebihi jumlah PMDN. Jumlah PMA lebih banyak dikarenakan investasi PMA itu sebagian besar berupa investasi yang padat modal dan juga padat karya. Padat modal sendiri dikarenakan PM berinvestasi dengan mendirikan pabrik-pabrik yang didalamnya banyak terdapat mesin-mesin, sehingga modalnya pun tentu besar. Namun, selain padat modal, PMA juga pada akhirnya menyerap banyak tenaga kerja sehingga juga merupakan investasi yang padat karya. Sedangkan jumlah PMDN yang lebih kecil dibandingkan dengan PMA dikarenakan PMDN di kabupaten Bandung Barat lebih diarahkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM di kabupaten Bandung Barat keseluruhan berjumlah 1.270 usaha. Namun meskipun jumlahnya banyak, tetapi investasinya bernilai sedikit dibandingkan dengan PMA dikarenakan modal usahanya jauh lebih kecil. Namun, meski tidak padat modal, UMKM merupakan usaha yang padat karya karena menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.

Dari data perkembangan investasi PMA memiliki grafik peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan PMDN. Dari segi ekonomi, tentu hal tersebut akan menguntungkan bagi kabupaten Bandung Barat karena investasi yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Namun, melihat kesenjangan yang besar antara PMA

dan PMDN tentu mengakibatkan konsekuensi lain, yakni masalah kedaulatan ekonomi daerah. Jumlah PMA yang lebih besar dari PMDN tentu bukan sebuah prestasi yang harus dibanggakan. Sebaliknya, hal ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi investasi yang ada di daerah dan tentunya mengelolanya secara mandiri.

Secara umum, kondisi daya saing investasi kabupaten Bandung Barat dikatakan tinggi melihat dari pergerakan peningkatan setiap tahunnya. Terdapat beberapa kemungkinan yang mempengaruhi terciptanya daya saing investasi yang tinggi tersebut, antara lain bila dikaitkan dengan proses penciptaan daya saing menurut Frinces (2011) adalah pertama, dari segi manajemen dan kepemimpinan. Terlihat bahwa pemimpin kabupaten Bandung Barat cukup memberi perhatian pada dunia bisnis yakni dengan dibentuknya Badan Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu melalui Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada BPMPPPT. Pembentukan BPMPPPT ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memangkas jalur birokrasi perijinan yang selama ini dinilai sebagai hambatan investasi dikarenakan sifatnya yang lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pembentukan BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat ini selain karena adanya peraturan diatas yang memberikan ruang untuk membentuk badan atau lembaga yang bersifat “satu pintu”, juga karena reaksi atas kondisi yang dimiliki oleh kabupaten Bandung Barat, yakni kabupaten yang memiliki corak industri. Sehingga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha dan industri, pemerintah kabupaten Bandung Barat mempermudah pengurusan perijinan melalui terbentuknya BPMPPPT pada tahun 2012 ini. Oleh karena BPMPPPT ini masih baru terbentuk, perijinan yang diberikan pun masih terbatas, yakni 21 jenis perijinan baru 1/6 jenis perijinan yang ditangani oleh BPMPPPT. Minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pun makin bertambah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah investor yang mengurus perizinan pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT). Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat, Bambang Subagio;

“Sejak BPMPPT meresmikan pelayanan perizinan pada 1 Maret lalu, tercatat sekitar 200 investor yang mengurus perizinan usaha, dan sudah 174 perizinan yang dikeluarkan. Hal ini pertanda animo investor untuk berinvestasi di Bandung Barat sangat tinggi,” (www.tribunnews.com, 2012).

Kemudian keunggulan kedua adalah dari segi perencanaan mengenai kebijakan investasi. Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 telah ditetapkan mengenai arah kebijakan investasi di Kabupaten Bandung Barat. Dalam RPJMD kabupaten Bandung Barat upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas, seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan perikanan, industri pengolahan, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.

Dari poin perencanaan kebijakan investasi diatas yang sudah terimplementasi adalah yakni deregulasi peraturan yakni melalui pembentukan BPMPPT. Kemudian kerjasama dalam dengan pihak swasta terutama melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang digelontorkan pihak swasta bagi masyarakat sekitar di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Adapun untuk peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal masih belum terealisasi

secara maksimal. Peningkatan investasi lokal ini diarahkan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diorientasikan pada peningkatan akses modal dan penyadaran berkoperasi. Dari deskripsi yang sebelumnya dijelaskan mengenai daya saing daerah, yakni berdasarkan survey kepada pelaku UMKM untuk akses terhadap modal sebagian besar pelaku UMKM meminjam kepada Bank yang telah direkomendasikan oleh Pemda melalui bagian UMKM, Dinas Perindustrian, Industri, Koperasi, dan UMKM. Sedangkan untuk penyadaran berkoperasi masih belum terimplementasi. Pelaku UMKM umumnya memiliki keinginan untuk membentuk koperasi bagi usaha mereka, namun kenyataannya tidak ada kekompakan dalam jaringan pelaku usaha sendiri untuk membuat koperasi maupun menjaga keberlanjutan dari koperasi yang telah terbentuk.

Kabupaten Bandung Barat juga dinilai memiliki kondisi lokal bisnis yang kondusif (dapat dilihat dari grafik peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi). Hal ini dikarenakan masyarakatnya masih bercirikan masyarakat kabupaten yang cenderung patuh dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya suplai bahan baku yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan industri. Akses menjadi mudah karena kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang dekat dengan kabupaten dan kota Bandung dan Jakarta. Oleh karenanya dari segi penciptaan daya saing investasi, kabupaten Bandung Barat sudah cukup memiliki keunggulan komparatif untuk dapat bersaing dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Prakondisi kabupaten Bandung Barat sudah memadai dilihat dari segi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Dari segi pendapatan regional domestik bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah prakondisi kabupaten Bandung Barat masih tertinggal baik dibandingkan dengan daerah induk maupun nilai rata-rata di provinsi Jawa Barat.

Daya saing investasi di kabupaten Bandung Barat sudah tinggi dilihat dari peningkatan jumlah investasi. Adapun identifikasi yang mendukung bagi terciptanya daya saing investasi di kabupaten Bandung Barat, yakni manajemen dan kepemimpinan, perencanaan, dan kondisi daerah yang kondusif.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan kepada *stakeholder* baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat:

1. Meningkatkan investasi dengan keunggulan komparatif lokal.
2. Memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai wujud peningkatan investasi dalam negeri.
3. Menjadikan BPPPT sebagai ujung tombak kabupaten Bandung Barat dalam pelayanan investasi dan perijinan sehingga ke depan institusi ini merupakan institusi yang berperan penting dalam penciptaan daya saing investasi.
4. Memperhatikan keseluruhan kondisi kabupaten Bandung Barat. Artinya, untuk menciptakan daya saing investasi tidak hanya berpaku pada sektor-sektor tertentu, namun melibatkan juga keseluruhan kondisi yang ada.

5. Memperhatikan aspek keberlangsungan (*sustainability*) dari prakondisi yang sudah ada.

Bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat :

1. Mempertimbangkan kemungkinan modifikasi dan pengembangan kembali persyaratan pembentukan daerah otonom baru agar dapat menysasar pada penciptaan daya saing investasi.
2. Mengambil kebijakan untuk memekarkan daerah dengan mempertimbangkan kondisi riil dari calon daerah otonom baru. Artinya, meski proses politik tidak dapat dihindari dalam proses pembuatan kebijakan, perlu dipastikan bahwa calon daerah yang dibahas dalam pengambilan kebijakan adalah daerah yang telah memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku, yakni PP nomor 78 tahun 2007.

Bagi penelitian selanjutnya :

Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan elemen prakondisi pembentukan daerah otonom baru dan daya saing investasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Bappenas. 2004. *Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.
- Bappenas dan UNDP, 2008, “Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007”, BRIDGE: Jakarta.
- Blakely, E.J. 1989. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Edisi ke-4. New York: Praeger.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (edisi ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Conti, Sergio and Giaccaria Paolo. 2001. *Local Development And Competitiveness*. Netherlands: Kluwer Academic Publisher.
- Princes, Heflin Z. 2011. *Persaingan dan Daya Saing : Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta : MIDA Pustaka.
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: Press Malang.
- Imawan, Riswandha. 2009. *Urgensi Politik Pembentukan/Pemekaran Daerah Otonom*. Dalam Bakry & Andy Ramses. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Cetakan ketujuh). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global* (edisi revisi) . Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025*.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Kotler, Philip., Somkid Jatusripitak, Suwit Maesincee. 1997. *A Strategic Approach To Building National Wealth : The Marketing Of Nations*". New York : The Free Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lewis, Jhon P., Valeriana Kallab. 1987. *Mengkaji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Mehrtens, Jana Marie., Benjamin Abdurahman. 2007. *Regional Marketing : Buku Panduan Untuk Menarik Investasi Melalui Aliansi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V dan GTZ-RED.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Neuman, Lawrence W. 2003. *Social Research Method : Qualitative and Quantitative Approach*. New York : Pearson Education Inc.
- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage Of Nations*. New York: The Free Press.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Prasojo, Eko., Irfan Ridwan, dan Teguh Kurniawan, 2006, "Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah", DIA FISIP UI: Depok.
- Ramses, Andy. 2009. *Dimensi-Dimensi Pembentukan Daerah Otonom: Antara Dimensi Politik dan Dimensi Administrasi*. Dalam Bakry & Andy Ramses. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

- Seldadyo, Harry. 2009. *Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan Rakyat: Mencari Jalan Alternatif*. Jakarta: BRIDGE Project UNDP-BAPPENAS.
- Soeharto, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwandi, I Made. 2009. *Perubahan Instrumen Pembentukan Daerah Otonom*. Dalam Bakry & Andy Ramses. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Syaukani, Gaffar Afan, Ryaas Rasyid. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Husein. 1998. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*. Jatinangor : Pusat Kajian Pemerintahan STPDN bekerja sama dengan Citra Pindo.
- World Economic Forum (WEF). 2005. *Global Competitiveness Report 2005-2006*. Palgrave Macmillan.

Karya akademis:

- Bhenyamin Hoessein. 1993. *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Desertasi Program pascasarjana Universitas Indonesia.
- Harahap, Agus Supriadi. 2003. *Pengaruh Pemekaran Kabupaten Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Maksum, Irfan Ridwan. 2007. *Desentralisasi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier: Suatu Studi Dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial Dan Fungsional Di Kabupaten Dan Kota Tegal, Jawa Tengah, Di Kabupaten Jembrana, Bali, Dan Di Hulu Langat, Selangor, Malaysia*. Jakarta: Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 2005. *Investment Competitiveness Of Regencies/Cities In Indonesia: Perceptions of the*

Business Community. Jakarta: KPPOD bekerja sama dengan Asian Foundation.

Kuncoro, Mudradjad., Anggi Rahajeng. -----, *Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY*.

Nopriyanto, Heru. 2000. *Kondisi Perubahan Status Kota Administratif Menjadi Kota: Studi Mengenai Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah Pada Tahun Pertama Otonomi Daerah*. Depok: Skripsi Program Sarjana Universitas Indonesia.

Nuraini, Ida. -----, *Analisis Daya Saing Investasi Kota Batu*.

M.C.R., Imanuela. 2004. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Era Otonomi Daerah: Studi di Propinsi Maluku*. Jakarta: Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Syahresmita, 2000, *Strategi Peningkatan Keunggulan Daya Saing Industri Pengolahan Rotan Indonesia*. Jakarta : Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Tarigan, Antonius. 2007. *Implementasi Kebijakan Pemebntukan Daerah Otonom Baru: Pengaruh Kebijakan, Organisasi dan Lingkungan Terhadap Keberhasilan Daerah Otonom Baru di Provinsi Gorontalo*. Jakarta: Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Jurnal:

Fitrani., Hofman., & Kaiser. *Unity In Diversity? The Creation Of New Local Governments In A Decentralising Indonesia*. The World Bank Jakarta. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.41 No.1 2005:-57-79.

Hasan, M. Fadhil & Deniey A. Purwanto. *Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan*. Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol I No 3, April 2006 (217-234).

Homme, Remy Prud, 1995. *Danger Of Decentralization*. Research of World Bank Vol. 10 No. 2.

Nazara, Suahasil, Nurkholis. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Di Indonesia Dalam Era Desentralisasi*. Kajian ekonomi, vol 5 No. 2, 2006 : 133-165.

- Nurkholis, 2005. *Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi*.
- Kurniawan, Dedy. 2008. *Regresi Linier*. Forum Statistika. <http://ineddeni.wordpress.com>.
- KPPOD. (2001- 2005). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: KPPOD.
- Rondinelli, Dennis A, *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries*, International Review of Administrative Sciences 1980; 47; 133.
- Tarigan, Antonius. 2010. *Dampak Pemekaran Wilayah*. Majalah Jurnal Perencanaan Pembangunan edisi 01/tahunXVI/2010.
- Tirtosuharto, Darius. 2009. *Regional Competitiveness in Indonesia: The Incentives of Fiscal Decentralization on State Efficiency and Economic Growth*. UMI Number: 3399171.

Artikel :

- Haryadi, Agus. *Otonomi Daerah dan Otonomi Negara, Visi Pembangunan Masa Depan*. Kompas, 20 Juni 2001.

Website:

- Balitbang Riau. 2011. *Daya Saing Penanaman Modal*. available at <http://balitbang.riau.go.id/penelitian/dayasaingpenanamanmodal.pdf> diunduh tanggal 18 November 2011.
- Bataviase.co.id. 2011. *Investasi di Bandung Barat Meningkatkan Tajam*. available at <http://bataviase.co.id/node/541751> diunduh tanggal 21 November 2011.
- Bank Indonesia. 2010. *Peringkat Daya Saing Investasi Daerah Provinsi Jambi*. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A56AD514-A3DB-4A11-86C11AF0C0AA>

[48E0/15462/boks2PeringkatDayaSaingInvestasiDaerahProvinsiJamb.pdf](#)

diunduh tanggal 20 November 2011.

Bappenas, 2011. *ANALISIS PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA 2008-2011.*,

www.weforum.org.

Infobandungbarat, 2010. *Kabupaten Bandung Barat*. <http://info-bandung-barat.blogspot.com/> diunduh tanggal 20 November 2011.

Tribunnews.com. 2012. *Bandung Barat Targetkan Raih Investasi Rp 6 Triliun*.

<http://www.tribunnews.com/2012/05/09/bandung-barat-targetkan-raihinvestasi-rp-6-triliun>. Diunduh tanggal 24 Mei 2012.

Dokumen Pemerintah :

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah*.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Evaluasi Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran (EDOHP) tahun 2011*.

Kabupaten Bandung Barat, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013*.

Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka (KBBDA) Tahun 2010*.

Kabupaten Bandung Barat, *Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Tahun 2012*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dede Indrawati

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 12 Oktober 1990

Alamat : Desa Bulak RT.04 RW.01 Kecamatan Kandanghaur,
Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Barat. Kode
pos: 45254.

Nama Orang Tua:

Ayah : Mubasyir

Ibu : Sariah

Nomor Telepon : 085224524731

Surat elektronik : dede.indrawati@gmail.com

Pendidikan Formal : Sarjana Ilmu Administrasi Negara FISIP UI
SMA N 1 Sindang, Kabupaten Indramayu
SMP N 1 Kandanghaur, Kabupaten Indramayu
SD N Kandanghaur 1, Kabupaten Indramayu

Pengalaman Kerja:

2011-2012 : Local Governance Watch, FISIP UI.

2011 : Bappenas

Organisasi

2011-2012 : Asisten fungsional Local Governance Watch, FISIP
UI.

2010 : Sekretaris Forum Studi Kebijakan (Forbi) FISIP UI.

2009 : Staff divisi keilmuan, Himpunan Mahasiswa Jurusan
Ilmu Administrasi, FISIP UI.

LAMPIRAN 1

Hasil wawancara dengan Bapak Umar, Kasubdit Perencanaan Ekonomi dan Investasi, Bappeda Bandung Barat

Tanggal : 2 April 2012 pukul 12.40 WIB

Tempat : Ruang Kantor Bappeda

Keterangan : D (Dede Indrawati, Peneliti)
U (Umar, Informan)

D : secara umum gambaran perekonomian Bandung Barat itu seperti apa pak?

U : ya memang dari kan arahnya itu pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri kearah sektor pertanian. Karena luasnya itu memang luas lahan pertanian itu lebih besar gitu. Dan kemudian, yang eksisting itu yang perindustrian itu yang dulu pemekarana dari kabupaten induk dulu yang eksisting itu, itu adalah industri..

D : yang industri pabrik-pabrik itu ya pak..

U : iya, itu adanya di daerah Batujajar, Padalarang, itu tersebar gitu ya.. jadi itu kawasan industri. Walaupun itu yah harusnya kalau namanya kawasan industri harusnya satu kawasan.

D : iya, kayak kawasan berikat gitu yaa?

U : kayak di Batam gitu. Masuk itu sudah ada kawasan berikat seperti yang di.. mana itu? Yang di Bekasi itu ya.. daerah Jababeka itu. Itu, harusnya gitu. Tapi ini dulunya apa.. RTRW-nya ini dikasih wilayah Batujajar itu untuk wilayah industri dengan sebagian perbatasan dengan Padalarang. Di sektor-sektor industri itu dengan banyaknya tenaga kerja yang masuk kesana, itu juga itu.. daerah setempat yah dan daerah luar Bandung juga.. dari Jawa Tengah, dari daerah Lampung..

D : oh pada datang jadi tenaga kerja gitu ya?

U : nah itu. Itu pada masuk sini. Nah, dengan masuknya tenaga kerja banyak itu akibatnya pertumbuhan ekonomi juga di daerah ini berkembang gitu. Apalagi sekarang setelah berpisah dari kabupaten induk, ini wilayah sepanjang Padalarang itu, dia sudah berubah gitu yah. Jadi peningkatannya itu pesat. Yah walaupun itu apa istilahnya ya..kalau melihat struktur jalannya, jalan provinsi itu memang masih.. yah karena itu jalur provinsi jadi dari mana-mana lewat kesana. Kemudian pertumbuhan tadi, ekonomi ya.. itu pembuatan itu apa, minimarket-minimarket gitu banyak.

D : oh jadi karena bertumbuhnya konsentrasi penduduk juga jadi menjamur minimarket-minimarket gitu ya.

U : betul.

D : jadi, kalau yang saya tangkap, yang tumbuh duluan itu industri ya pak ya..

U : ya.. industri tumbuh jadi orang itu dari sektor perdagangan dan jasa itu dia juga akan ini.. apa eeh tumbuh juga gitu, memberi pelayanan kepada sektor industrinya itu.

D : hmm.. itu kan dari sektor industri yang pabrik gitu. Kalo industri yang kecil-kecil gitu kayak pengrajin gitu bagaimana pak perkembangan ekonomi dari sektor industri tersebut?

U : itu, memang ada di setiap kecamatan. Kebetulan kita juga disini sudah membentuk apa istilahnya ehh komunitas ekonomi kreatif gitu ya. Kita juga ada (mengambil kertas). Kita sih biasanya kalau sektor-sektor industri gitu pertama ada binaan daripada dinas yang bersangkutan,

itu diperindag. Kemudian juga ada eehh pertumbuhannya itu ada yang tidak melalui dinas gitu. Maksudnya jadi kalau ini juga disini ada potensi ekonomi kreatif (menunjukkan kertas rincian industri ekonomi kreatif Bandung Barat) di tiap kecamatan itu termasuk setelah perkembangan industri, sektor perdagangan, ini ya apalagi ditunjang dengan ini menunjuk ekonomi kreatif kota baru parahyangan), kaya yang di BSD itu ada apa.. kota baru gitu ya. Kemudian Bandung Barat juga sama. Ini ada kota baru. Namanya kota baru Parahyangan. Jadi disana eehh pertama kita bentuk perumahannya, jasa perdagangannya juga ada, sama, dari mulai ini apa sekarang sudah dibuatkan hypermarket gitu. Kalau kita masuk kesana sebelah kanannya sudah ada hypermarket, masuk ke dalamnya lagi, sama itu, pusat pendidikan dan juga rumah sakit. Disitu sudah ada, di kota baru Parahyangan. Hotel-hotelnya juga gitu.

D : hmm.. itu di daerah.. Parongpong ya?

U : Padalarang.

D : eh iya, Padalarang ya..

U : Padalarang, kalo mm (berdehem) ini kan kalo tol ya, tol Padalarang itu sebelah sana ini lurus gitu ke wilayah yah sekitar 50 meter lah dari tol ke Padalarang itu.

D : itu pusat pertumbuhan yang paling pesat disana pak? Di Padalarang? Atau di kecamatan mana?

U : pertumbuhan yang paling pesat di padalarang. Karena dia penyangga dari mana-mana. Padalarang itu kan penyangga, pertama, keluar dari tol itu lebih cepat, kemudian juga dulu ehh lintasan dari Bandung ke Cianjur, Bandung ke Purwakarta, itu daerah yang ramainya itu melintas di Padalarang itu. Jadi sekarang, sepanjang jalan Padalarang itu sudah padet gitu apa hmm perdagangan untuk sektor jasa itu sudah padet gitu.

D : kemudian pak, ini kan pusat pertumbuhan ini kan di Padalarang ya pak? Tapi pusat pemerintahannya sendiri pak, kenapa di Batujajar gitu? Apa lebih dekat gitu akses dengan kecamatan-kecamatan lain atau bagaimana pak?

U : iyah, untuk kenapa pusatnya itu disini ya? Itu karena disini cuman sementara, gitu. Jadi nanti rencana 2013 ini pusat pemerintahan itu adalah di Ngamprah. Kecamatan Ngamprah itu dulu bagian dari Padalarang.

D : oh iyaa..

U : Padalarang, dibagi dua, itu dipecah menjadi Padalarang dan Ngamprah. Ngamprah sebelah utarannya, Padalarang sebelah selatannya. Itu untuk pusat eehh pusat pemerintahan itu adalah di Kecamatan Ngamprah. Disini hanya untuk sementara.

D : kenapa pusat pemerintahannya itu disini pak? Di Batujajar.

U : iyak, karena kan untuk kita apa.. mm sebelumnya itu pusat pemerintahan justru eehh berpencar-pencar gitu.

D ooh..

U : berpencar-pencar. Jadi misalkan, dinas perdagangan, dia ngontrak dimana gitu ya.

D : hmm.. dulunya seperti itu ya..

U : Padalarang dibagian perkotaan-perkotaannya ada di bagian Batujajar, ada di.. itu, berpencar gitu. Nah, ehem (berdehem) kalo mencar gitu kan untuk koordinasi memang agak ini. lama lah gitu. Nah, kemudian ada inisiatif untuk disatukan gitu. Kita ngontrak disini. Kebetulan ini adalah..

D : pabrik ya pak ya?

U : ini adalah pabrik ya dulunya. Kita kontrak jadinya disini.

D : untuk memudahkan koordinasi ya pak ya?

U : ya, pertama ini adalah untuk.. ya kalo satu wilayah kan jadi cepat untuk berkoordinasinya gitu. Kadang pelayanan publik dari masyarakat juga kan sulit untuk dia butuh ke dinas apa ya.. ke dinas pendudukan dia kesini kemudian juga dia untuk ke tenaga kerja dia masih dalam satu wilayah. Jadi dalam satu hari bisa cepat. Kalo berpencar-pencar terkadang masyarakat keburu capek, lelah gitu ya..

D : oh.. jadi memang memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik juga ya?

U : iyah.

D : kemudian pak, menurut Bapak, disini ada penyerahan sebagian wewenang dari Kabupaten ke tingkat kecamatan ga pak? Terutama dalam eehh ekonomi gitu pak? Bidnag ekonomi.

U : kalo itu.. ehh.. biasanya untuk bidang perijinan. Perijinan kalo misalkan itu ini apa sudah tumbuh minimarket-minimarket gitu. Yah walaupun disini bentuk peraturannya ini baru terbentuk 2011 ya. Aturannya sudah ada. Nah, sebelum Perda, sekarang dinas perdagangan itu, dia tidak mau memberikan ini gitu, mangga.. (ada orang datang) tidak mau memberikan ijin gitu, karena perdanya belum ada.

D : berarti kalau dulu, di kecamatan ya pak ngurusnya karna belum ada perdanya?

U : ehem.. karena dulu belum ada perdanya, untuk bikin ijin itu ya, di tingkat kabupaten, disperindag dia tidak mau memberika ijin. Karena perdanya belum ada. Nah, akhirnya, eehh tingkat kecamatan yah, dengan adanya minimarket yang harus ada ijin gitu ya, makanya dia minta ijinnya hanya ke kecamatan. Jadi, ke ini ke kabupaten tidak. Apalagi sekarang pertumbuhannya itu sudah terlalu banyak gitu yah.. sama lah dengan di tingkat kabupaten kota lainnya. Minimarket menjamur.

D : iyah, ehe. Berarti sekarang dengan adanya perda itu perijinan diatur disini semua ya pak? Di kabupaten.

U : nah.. nanti kalau misalkan itunya nah sudah ada perda, ya nanti diharapkan ijinnya langsung ke kabupaten.

D : kemudian sih pak, secara keseluruhan, ini kan daerah ini mekar dari kabupaten Bandung. Itu.. daerah ini menunjukkan perubahan yang signifikan engga sih pak dalam bidang ekonomi gitu pak? Ketika Bandung Barat ini berdiri sendiri, kalau dibandingkan dengan kabupaten induknya seperti apa gitu?

U : kalau kabupaten induk yah, dia itu kan yang namanya pemekaran itu biasanya kalo pemekaran kan sama-sama inilah ya. Yang induknya juga sama, ingin maju. Yang baru juga mau, sama, dia ingin maju. Jangan sampai dimekarkan trus dia nanti ini malah anjlok gitu ya perekonomiannya. Nah, setelah dimekarkan, pada dasarnya juga kalo kabupaten induk sama, dia maju gitu. Sisi lain punya ini, eh pabrik-pabrik di sana, di Rancaekek. Nah itu Rancaekek itu pabrik-pabrik, kemudian juga wilayah ini wisata, di wilayah selatan ini objek wisata. Gitu. Disana itu, kemudian juga antara perbatasan Bandung dengan Garut, induknya itu ada panas bumi, itu dari tanah. Itu juga untuk pertumbuhan ekonominya jadi tinggi juga gitu. Nah, untuk yang baru ini, yang baru juga sama gitu. Pertama untuk pertumbuhan ekonominya itu dia sudah punya eksistingnya ini kawasan industri ini. kemudian juga, dari PLTA. Gitu. PLTA Saguling, kemudian PLTA Cirata, nah kita punya itu. Kemudian juga, perkebunan. Perkebunan teh Panglejar itu, PT Nusantara 8, itu juga sama ya. Kemudian juga hmm ada objek wisata Bandung Barat itu yang paling digemari adalah objek wisata wilayah Lembang. Lembang itu termasuk wilayah Bandung Barat. nah, itu kan tiap hari apa tiap hari libur lah, sabtu-minggu gitu itu pada penuh itu wilayah Lembang. Apalagi objek wisatanya itu banyak dikelola oleh swasta. Ada yang itu teh, yang kuda, pacuan kuda. Kemudian juga hotel-hotelnya, kemudian juga ada puspitek

Ciwangun Indah, yah dari mulai objek wisatanya, kemudian outbound, keseluruhanlah dia ada disana.

D : oh.. jadi dari kondisi eksistingnya juga sudah banyak eh tinggal mengembangkan aja sekarang ya pak..

U : iya, tinggal mengembangkan saja. Dan kemudian, tadi, masalah industri kecilnya itu, memang di satu pihak industri yang besar itu di wilayah kawasan industri gitu yah. Sedangkan industri kecil menengah itu jadi binaan disperindag gitu ya, itu ehh kebetulan kita ikat menjadi forum ekonomi kreatif. Yah walaupun masih misalkan ekonomi kreatifnya itu kita satukan, kita adakan pembinaan. Seperti ada kampung jadoel, dari segi arsitektur. Kemudian kampung daun, orang Jakarta biasanya tahu, untuk makan-makan sambil menikmati pemandangan alam. kemudian ada kampung gajah, ini juga sama gitu. Teropong bintang Boscha juga masih sama, itu yang ITB itu yah. Kemudian pasar seni, ada perumahan tapi dia juga menyediakan pasara barang seni. Seperti kawasan perumahan, didalam rumah itu ada keseniannya. Ini rumah sapu lidi, konsepnya kaya di Bali, di Ubud, gitu rumah ada keseniannya. Jadi tiap sabtu minggu nanti ada pertunjukan. Tapi disini masih tahap pengembangan, jadi nanti ada kesenian Jawa Barat.

D : untuk menjadi daya tarik wisata tersendiri ya pak

U : iya, disini sudah ada hotel-hotelnya. Sementara dia nginep disana, dia juga melihat pertunjukan disana. Jadi konsepnya dia engga perlu kemana-mana gitu. Datang dari Jakarta menginap disana, melihat petunjukan disana. Untuk kerajinan juga banyak, di tiap kecamatan ada.

D : berarti memang industri rakyatnya juga dikembangkan gitu ya tidak hanya industri besar saja ya pak?

U : karena, memang dari dulu juga dia sudah, apa.. sudah melakukan kegiatannya yah untuk ekonomi. Cuman dulu kan belum dibentuk suatu forum dia melaksanakan kegiatannya asal dia menjual ke pasaran lokal. Ya misalkan ada yang ke internasional juga ada. Nah kalo sekarang dengan adanya ikatan gini kan jadi tahu gitu, industri ini wilayahnya kesana, kanjadi tahu gitu. Jadi lebih mudah gitu. Kemudian, nah karena Bandung Barat itu juga daerah wisata, dilengkapi dengan wisata kuliner. Ini disini juga ada industri wisata kuliner. Tiap objek wisata ada wisata kuliner, seperti sate kelinci di daerah Lembang.

D : oh, jadi seperti itu ya pak pengembangan industri kecilnya. Iya pak, terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya.

LAMPIRAN 2

Hasil wawancara dengan Ibu Avira Nur Fashihah, Ketua Bagian Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bandung Barat.

Tempat : Ruang kerja ketua bagian penanaman modal
Waktu : 21 Februari 2012, 10.30-11.15 WIB

Keterangan : D (Dede Indrawati, Peneliti)
A (Avira, Informan)

D : Bagaimana gambaran mengenai BPMPT?

A : BPMPT ini baru terbentuk setahun yang lalu, tadinya sih bentuknya kantor. Yah barangkali untuk sejarah nomenklatur dinas eh badan. Tadinya sih berupa kantor penanaman modal, sejak adanya Kab. Bandung Barat, Bandung Barat kan baru lima tahun ya neng. Nah setelah satu tahun ini jadi badan. Jadi ada peningkatan status, yang tadinya kantor jadi badan. Jadi kalau sekarang eselon II lah kepala badannya. Dari struktur organisasi kita ada tiga bidang. Setelah kaban kepala badan trus ada sekban sekretaris badan. Kemudian dibawahnya ada tiga bidang yaitu bidang penanaman modal, bidang sistem informasi dan pengaduan, dan layanan perijinan. Di bidang penanaman modal ada dua subdit, subdit promosi dan kerjasama, itu aja barangkali, lalu ada subdit pengembangan penanaman modal, yang adanya investasi.

D :

A : Potensi Bandung Barat itu banyak sektor dalam pengembangannya, ini bisa difotocopy neng, (menyodorkan pamphlet peluang-peluang investasi di Kab. Bandung Barat).

D : oh iya bu, nanti saya bisa foto copy. Kemudian bu, lanjut lagi, kalau di Kab. Bandung Barat itu selain BPMPT ada lagi tidak instansi yang mengurus investasi?

A : selain BPMPT kita engga ada.

D : Oh, memang terpusat disini ya.. kemudian, ada kebijakan khusus tidak Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif?

A : Sebetulnya sih pengaturan ininya kita sekarang dari .. em sebetulnya memang arahnya pemerintah itu untuk menciptakan iklim yang seperti itu agar kondusif dan menarik investor sebanyak-banyaknya. Cuman, setahu saya, inikan gini neng, setau saya sih investor memang tau Kabupaten Bandung Barat banyak potensinya yang bisa dikembangkan. Cuman yang melirik untuk menanamkan modalnya itu belum ada.

D : Oh, belum ada yaa?

A : Belum, ya itu karena ada keterbatasan yang mereka inginkan gitu loh. Kaya contohnya kaya gini, kemaren PT Modern Internasional, bergerakinya dalam bidang peternakan. Mereka butuh lahan 500 hektar. Kita enggak ada lahan itu. Jadi engga jadi lagi.

D : Oh, jadi tidak ketemu antara permintaan dan penawaran, seperti itu..

A : Ehe. Potensi sih kita ada, ya cuman itu potensinya itu apa yang mereka kehendaki itu kita belum mm.. yah belum match lah antara keinginan dengan keadaan kita. Potensinya mah ada, kaya kita punya peternakan sapi. Itu contohnya ya. Sektor pariwisata juga gitu, semuanya belum. Belum ada yang deal lah kalau kasarnya. Cuman untuk kunjungan ke kita sih sudah sering. Sudah sering banget. Malah kemarin saya menghadiri rapat di Oman, ada enam sektor dari segi

pendidikan, manufaktur, segala macam, tekstil. Yah cuman itu, peluang-peluang kita yang akan ditangkap itu apa gitu.

D : ini kan bagian dari promosi ya, lebih ke..mm

A : betul, kalau disini promosinya lebih yang ke pameran-pameran itu. Yah menjual daerah lah.

A : Kalau untuk menangkap peluang-peluang investasi kita baru berkembang, kita baru mengusulkan ini loh potensi-potensi kita dari potensi yang ada, tapi belum tentu menjadi prospek. Potensinya ada, cuman untuk menjadi peluang investasinya, itu yang tersendat.

D : Kabupaten Bandung Barat kan merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Bandung, maka secara geografis wilayahnya berada di sepinggiran kabupaten maupun kota Bandung kan, jadi kabupaten Bandung Barat ini seperti menjadi penopang perekonomian. Hal ini bisa menjadi salah satu pengaruh investasi tidak?

A : beberapa ada. Tapi pertanyaan itu saya rasa terlalu melebar, perlu dikerucutkan lagi.

D : oh iya, jadi intinya sih bu saya ingin mendapat gambaran perkembangan investasi dari daerah ini mekar hingga sekarang, baik dari segi jumlah investasi, kemudian pandangan investor mengenai daya tarik investasi di sini itu seperti apa.

A : kebetulan saya baru dua bulan disini, jadi masih belajar juga. Kita banyak kendala di lahan, sebetulnya banyak yang melirik. Kembali ke kesiapan kita daerahnya. Jadi kalau sudah siap seperti itu, investor ujung-ujungnya cuman nanya, bagaimana sih mengurus investasi disini? Berapa lama dan berapa biayanya? Udah gitu doang, simpel. Tapi cuman, kesiapan daerahnya masih kurang, secara BPMPT ini baru terbentuk satu tahun, Maret tahun lalu. Jadi perijinan belum mengurus gitu. Namun selama ini ijin dilakukan di luar-luar itu efektivitasnya itu gimana gitu? Setelah membentuk ini tuh bisa ngga menanganin dan menanggulangi agar tidak berceceran, soalnya investor tidak mau tahu dimana-dimana mengurusnya yang penting ada yang mengurus.

D : Oh begitu. Saya boleh meminta standar operasional prosedur penanaman modal bu?

A : masih disusun. Sudah disusun, tapi kita menunggu Bupati menyetujui. Nanti setelah soft launching BPMPT baru bisa di-publish.

D : Oh, berarti saya kesini lagi abis launching ya. Kemudian, satu tahun ini sendiri itu bagaimana perkembangan investasi?

A : oh, lebih cenderung ke tadi ya, yang eksisting. Yang eksisting ini lebih banyaknya adalah kita sifatnya hanya mengetahui. Karena eh investor-investor yang ada itu di kota besar kan dimana kewenangan daerah pun dibatasi dengan nilai investasi dibawah 10 Milyar. Nah ini kan pasti diatas sekian Milyar, maka perijinannya tidak di kami. Sebaliknya ijin-ijin usaha yang biasa kami tangani seperti ijin swalayan, kaya yomart, kaya pasar modern lah, yah yang seperti ini. sementara investor besar itu masih di pusat atau di provinsi. Gitu.., kita hanya sekedar mengetahui. Kaya kemaren Indofood, merger dari perusahaannya menjadi terbuka, nah kita sudah terima saja dari BKPM untuk diketahui bahwa perusahaan ini ada kerjasama dengan Indofood sudah merger dari perusahaannya atau apa-apa. Jadi sifatnya hanya mengetahui.

D : oh, jadi lebih menangani yang kecil-kecil aja.

A : iya, dibawah 10 M aja pokoknya.

D : oh, jadi bisa disimpulkan bahwa memang daya saingnya tinggi investasi perusahaan-perusahaan besar yang pengurusannya ada di tingkat pusat dan provinsi, tapi tidak yang diurus oleh kabupaten.

A : ehe, persisnya begitu. Kalo memang yang dalam kewenangan Kabupaten memang kurang gitu untuk investasi. Ya itu yang diurus di kita itu yang dibawah 10 M yah seperti pasar modern, SPBU, SPBE, kaya gitu-gitu. Kalau yang besar-besarnya di provinsi dan pusat.

D : oiya, kalau rekam investasi seperti itu ada datanya bu?

A : sebenarnya ada, seperti ingin membuat pengelolaan sampah gitu kan, nah itu sudah datang dari Rusia, dari Vietnam, datang untuk investasi

D : oh, saya bisa minta data bagi investor yang datang dan investor yang akhirnya jadi berinvestasi?

A : ya itu tadi, balik lagi ke kesiapan daerah itu sendiri dan kemudian lahannya. Nah itu,sebetulnya yang pengolahan sampah itu siap dikelola, cuman yah eng..., yang dipolitisir lah sampai sampah tuh dikuasailah begini begini lah, yah akhirnya investor engga mau dong mengelola sesuatu yang menjadi tanda Tanya. Bukannya menjadikan kesejahteraan masyarakat, takutnya malah dihujat oleh masyarakat.

D : oh, dari segi masyarakatnya juga ya. Soalnya banyak sih pertimbangan investor salah satunya adalah faktor keamanan juga.

A : yah kalo soal infrastruktur, keamanan, kita bisa menyediakan, cuman yah yang tadi itu, dari sisi sumber dayanya terkadang tidak memenuhi harapan investor. Ade bisa ke Bappeda bagian tata ruang untuk melihat investasi apa saja yang dikembangkan tiap daerah sehingga kelihatan investor apa saja yang menginginkan investasi kesana gitu. Juga terlihat infrastruktur apa saja yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Tadi peternakan lah, pertaniannya?. Dari segi pertanian kita memang masih sangat luas. Secara pengelolaan mereka sudah oke, kemudian secara produksinya bagaimana? Butuh investor tidak? Begitu. Jangan sampe petani itu cuman petani tradisional aja gitu kan. Peluang investasi itu bukan sekedar infrastruktur dan semacam itu, tapi memberikan juga untuk pemasaran keluar, seperti itu fungsi investasi.

D : oh, untuk perlindungan kepada investor itu ada Perdanya tidak bu?

A : ada, sudah dibuat. Investor itu apa, seperti itu ya. Perdanya ada, pada Perda pembentukan BPMPT kemudian kita juga sudah menyusun Perda penyelenggaraannya. Disitu nanti yang diatur secara teknis, investor itu harus bagaimana.

D : oh, tapi Perdanya masih digodok ya bu?

A : iya, nah kalau Perda pembuatan BPMPT sendiri yah sebagian tersiratlah di situ seperti transparansi dalam mengurus, trus sama peluangnya baik investor dalam maupun luar negeri. Lalu juga ada standar biaya untuk berinvestasi.

D : kemudian, menurut ibu ada tidak komitmen dari pemimpin daerah sendiri untuk meningkatkan investasi daerah?

A : Oh itu jelas ada. Karena bagaimanapun karena kebijakan pimpinan sehingga kita bisa memberikan peluang investasi ini. BPMPT ini sendiri juga kan dari Keppres. (datang pengantar makanan menghadirkan cemilan). Monggo didahar dulu de.

D : signifikan tidak bu perkembangan investasi yang selama ini dari kabupaten ini mekar hingga kini?

A : kalo dibilang signifikan sih dibandingkan dengan apa dulu yah? Em masih oke. Karena disini penyerapan tenaga kerjanya masih oke dan mendukung. Jangan sampe demo-demo kaya di Bekasi ya, itu kan salah satunya juga mungkin kebijakan kurang mendukung. Yah bukan berarti yang demo juga tidak signifikan yah? Tinggi sih tinggi, tapi yah itu menimbulkan gejolak. Nah untuk di kita ini signifikannya dalam arti yang masyarakat masih merasakan adanya investasi. Misalnya tidak menghambat jalannya perindustrian, sehingga mereka bisa kerja lah.

D : kemudian, pemerintah punya kerjasama dengan masyarakat tidak?

A : kalau kita pemerintah ada kamar dagang dan industri. Otomatis kita kerjasama. Kemudian dengan UMKM kan, itu juga ruang lingkupnya adalah masyarakat. Kemudian untuk asosiasi-asosiasi sendiri juga ada kaya kelompok tani, asosiasi petani jamur, atau apalah gitu kan. Kalau mereka bisa menghasilkan kenapa tidak kita bangun apa misalnya untuk suatu industri dan mencari investor untuk menanamkan modal. Contohnya misalnya potensi ikan nih, sementara pakannya darimana? Kenapa tidak kita bikin sendiri. Ada tidak sumber dayanya? Kalau ada kenapa tidak kita bangun? Nah berangkat dari hal kecil-kecilan bisa dibangun agar tidak usah dari luar karena sudah jelas kebutuhannya.

D : oia, kalau investasi di bidang pariwisata sendiri bagaimana? Apakah ada investor yang tertarik?

A : sangat-sangat tertarik. Karena kan sektor wisata di kabupaten Bandung Barat kalau menurut saya adalah sektor yang sangat konkrit untuk dikembangkan. Ada Maribayanya, Curug Cinulang, Situ Ciburuy, ada Gua Pawo dan banyak lagi. Sebetulnya sih kalau di sektor pariwisata menurut saya lebih mudah jalur untuk membidik investor dibandingkan sektor pertanian dan peternakan.

D : Oh gitu. Tapi, banyaknya itu investor disini itu banyaknya dari lokal apa dari luar daerah?

A: hmm.. selama ini sih kita berusaha menarik investor siapapun itu. Dengan memberikan kesempatan yang sama. Fungsi kita ini kan sebagai koordinator jadi kembali cara teknisnya kembali ke dinas-dinasnya sendiri. Mau kemana? Nih ada investor loh, kita arahkan ke dinas-dinas untuk dibagaimanakan. Yah sekarang situ Ciburuy begitu doing, ga ada hotel ga ada apa. Kalau datang begitu doing kan ga lucu. Ada engga pengelolaan kepariwisataannya sendiri, bukan mengeksploitasi sumber daya alamnya saja tanpa sesuatu yang dinikmati, gitu kan. Balik laginya ke situ. Secara teknisnya itu dinas yang melakukan, kita disini istilahnya sebagai fasilitator.

D : selama ini kan ibu suka ngobrol gitu sama investor, nah mereka itu tertariknya apa sih di Bandung Barat ini?

A : mereka secara ini malah, investor yang tertarik di bidang pariwisata itu integrated yah, bahkan kaya misalnya kaya peternakan juga integrated. Mulai dari on farm-nya, sampai ke off-farmnya sudah siap. Yah kembali gimana gitu kan kalau untuk dari on farm sampai off farm butuh berapa ratus hektar gitu kan. Yah tergantung dinas mau diarahkan kemana. Terutama memperhatikan kesediaan lahan.

D : berarti tiap SKPD juga perlu berkoordinasi juga ya kalau ada investasi?

A: betul, supaya tidak tumpang tindih. Ya istilahnya itu tadi, kita sebagai coordinator memberi tahu ini loh ada investasi, jadi tidak mengandalkan APBD/APBN, sama prosesnya. Yah misalnya kalo dari APBN harus segini dulu atau gimana, nah kalau investor kan engga, ada komitmen dengan pemerintah dengan memperhitungkan kapan break event pointnya. Soalnya mereka kan profit oriented kan. Sehingga feasible untuk itu, dan kalau deal kan oke. Gitu.. memang kabupaten/kota sih sifatnya memfasilitasi doing bagi penanaman modal.

D : oke bu. Terima kasih banyak ya bu atas kesediaan menjawab pertanyaan.

A : sama-sama dek.

LAMPIRAN 3
Hasil wawancara dengan Pak Endarto, Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah
Wilayah 1, Kementerian Dalam Negeri

Tanggal : 30 Januari 2012

Waktu : 11.18 – 11.45 WIB

Tempat : ruang bagian penataan daerah tingkat II, Kementerian Dalam Negeri

Keterangan : D (Dede Indrawati, Peneliti)

E (Endarto, Informan)

E : 4 tahun menyusun PP 78. Itu aja yang perlu diketahui.

D : berarti selama itu terus dilakukan kajian?

E : wah, kerja terus. Lumayan itu, kajian akademiknya ada.

D: kemudian pak, di PP 78 itu ada pembobotan, beda dengan PP sebelumnya (PP 129 tahun 2000),?

E : iya. Jauh banget dengan PP sebelumnya. Saya berikan gambaran, kalo PP 129 itu per-indikatornya itu kumulatif. Kalo semuanya dari 11 indikator, kalau seandainya ada katakanlah luas wilayah tidak mencukupi tapi mengenai kepadatan penduduk mencukupi, maka bisa. Sebaliknya, di keuangan, di PDRB ekonomi calon daerah tidak mencukupi, tetapi pendapatan PAD-nya itu bisa, itu bisa.

D : ooh

E : nah, yang di PP 78 ini yang faktanya yah, dari 4 indikator itu tidak bisa untuk dikumulatifkan, harus sendiri-sendiri. Luas wilayah, jumlah penduduk, ekonomi, keuangan, itu harus berdiri sendiri.

D : harus terpenuhi semua ya?

E : harus terpenuhi, diatas nilai 75. Dibawah 70 jelas tidak akan lulus. Contohnya, kemarin DPR RI menginisiasikan pemekaran sebanyak 17 daerah otonom. Kita sidangkan melalui sidang DPOD dan kita berikan pemahaman PP 78 dari 17 daerah usulan itu hanya satu pun tidak ada yang memenuhi syarat PP 78. Contoh Tangsel, PDRBnya gila-gilaan, PADnya gila-gilaan, tetapi tidak bisa memenuhi persyaratan PP 78 kalau dikumulasikan. Kenapa? Karena presentasi penduduk lebih gila perbandingannya mbak. Penduduknya gila banget, banyak banget, makanya dibagi rata-rata penduduk jadinya kecil sekali. Tapi, pertanyaan mba kenapa itu Tangsel tetap mekar? Karena itu inisiatif DPR RI, lobi-lobi politik.

D : politik ya pak ya.. kan ada yang cara administrative...

E : nah kalau sejarah politik, kita kan dari FISIP, sama, cuma bedanya mba dari UI saya dari UGM. Ini tidak bisa disambungkan antara politik dan administrative. Yak, politik untuk menuju kesana, tetapi politik kan harus melalui administrative. Sekarang tidak. Ketatanegaraan kita amburadul sekarang. Jujur saya katakana.

D : berarti melampaui istilahnya ya pak

E : melampaui kewenangan daripada apa yang menjadi kewenangan yang diamanahkan. Nah amanahnya apa? UU 32 dan PP-nya 78. Itu kan jelas toh.

D : jadi Tangsel itu mekar tapi tidak terpenuhi gitu ya pak

E : kalau mau kita kaji dengan PP 78.

D : iya.

E : terus, yang menjadi dasar lagi adalah bagaimana sekarang kita melihat eeh, kan kita bikin rayon mbak, barat, tengah dan timur. Barat itu sana, Kalimantan, Sumatera, tengah itu ya Jawa, Bali, terus timur itu.. tau sendiri ya.. Papua, Maluku, dan lain-lain. Nah, itu juga berbeda mbak penilaiannya. Kalau dulu di PP 129 kita tidak akan pernah membandingkan dengan daerah otonom yang bersampingan, yang kita bandingkan di induknya saja, di PP 129, itu yang menyolok sekali. Kalau PP 129 itu hanya membandingkan dengan kabupaten induknya saja. Kan itu. Katakanlah ini induk (menggambar di kertas), ada 16 kecamatan, katakanlah seperti itu. Nah ini kan 3 kecamatan katakanlah, ini PP 129, ini bisa mbak, 3 kecamatan ini bisa menjadi daerah otonom baru.

D : bukan 5 kecamatan ya pak?

E : ya ini kan PP 129 itu ada 3. Minimal 3 kecamatan. Ini kan gila mba kalau memang betul-betul kenyataan kita nggak.. masa 3 kecamatan bisa jadi daerah otonom baru. Bicara menegnai keuangan, iya kan.. pelayanan, ini gausah bersandingan dulu dengan aturan main lah, ya kan? Space of controlnya. Masa 3 kecamatan jadi daerah otonom baru?

D : 3 kecamatan jadi 1 kabupaten ya pak ya?

E : nah. Mengapa di PP 78 kita menjadi 5 kecamatan minimal. Ya kan 5 kecamatan. Dan ini pun mba, tidak dibandingkan dengan induk aja, dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Katakanlah kita mau memekarkan Pringsewu. Pringsewu itu bagaimana persentase kajiannya terhadap semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ini PP 78.

D: emm

E : gimana nih perbandingannya. Calonnya yah, calonnya ini, gimana ini? akan lebih baik, lebih buruk atau sama dengan atau bagaimana ambivalentnya nanti, nilainya.

D : rata-ratanya di Provinsi ya pak ya

E : rata-ratanya. Kalau seandainya jauh melampaui apa yang diindikasikan, dia tidak akan bisa. Itu dari perbandingan saja.

D : kalau jauh dibawah ya pak

E : kalau jauh dibawah. Apalagi, rigid ada di 3. Rigid kebawah itu jelas tidak mungkin. 1 saja menjadi pertimbangan. Nah, sekarang pertanyaannya. Pemekaran itu tujuannya apa sih?

D : yah ini, idealnya sih pak..

E : yaa.. kita kan lebih bicara idealnya ya, bagaimana pemerataan penduduk, bagaimana keuangan, pembangunan, pelayanan, apa semua ada disitu. Endingnya untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Lah, ini lah mbak, kalau mau kajian akademisnya, gausah.

D : kemudian pak, disini juga ada DPOD kan pak, bagaimana perannya?

E : di DPOD adalah bagaimana menindaklanjuti. Artiannya, DPOD begini mba (mengambil kertas dan menulis) ini ada presiden. DPR RI mengusulkan inisiatif mengenai RUU pembentukan DOB.

D : oh 2 aktornya presiden dan DPR RI ya pak

E : ini presiden, dibawahnya ada kementerian dalam negeri. Kemendagri menindaklanjuti atas usulan inisiatif DPR RI. Wahai depdagri, ini ada usulan katakanlah ada 15 RUU pembentukan DOB, tolong diproses sesuai peraturan perundangan. Okeh, kami proses sesuai PP 78. Kemendagri memproses, 1. Klarifikasi dan verifikasi data usulan, 2. Kunjungan lapangan, kalau sudah diproses ini yah, ke calon DOB. Ya mba ya. 3. Setelah kunjungan lapangan maka kita melakukan kajian terhadap usulan DOB. Setelah kajian kita adakan sidang DPOD. Sidang DPOD ini merekomendasikan ke presiden terhadap usulan tadi mbak. Nah, inilah yang namanya

DPOD, yang anggotanya terdiri dari 7 kementerian. 1. Kemendagri, ketua DPODnya. 2. Keuangan, 3. Bappenas, 4. Setneg, 5. PU,

D : akademisi juga ada ya pak..

E : oiya ada.. ini yang kementerian dulu, ke 6. PAN 7. Kemenham. Ini ketujuh kementerian itu. Wahai Presiden, kami jawab atas usulan surat anda yang mengusulkan 15 daerah baru, ternyata dari 15 RUU tersebut, yang sesuai dengan PP 78 mungkin hanya 1 RUU. Yaitu yang mana.. nah gitu loh. Makanya presiden ini kembali ke DPR RI, untuk membahas RUU tersebut. Begitu dibahas, inilah deal-deal politik, lobi-lobi politik..

D : terus tetep aja yang lolos 15 juga ya pak

E : iya ini mba, makanya kita sakit gigi. Seolah kita nggak ada gunanya, semua data yang ada di kita ini. kenapa? Ternyata dipatahkan dengan politik. Siapa yang lebih kuat. Padahal seharusnya saling bergantung. Apa sih yang menjadi tupoksi kita, eksekutif, legislatif..

D : legislatif sifatnya mengesahkan

E : legislatif seharusnya tidak menginisiatifkan semena-mena. Menyalurkan aspirasi masyarakat pun seharusnya ada pertimbangan dan controlling yang betul-betul. Dan penglihatan secara akademis. Seperti pemerintah ini melakukan kajian ini.

D : padahal ada staf ahli pak di D PR sana?

E : apaan? Staff ahli juga ngaco semua. Lah ini loh mba, ini mengapa PP 78.

D : memang kalo dari evaluasi juga sebagian besar DOB dinilai buruk ya pak..

E : waduh, dari 205 itu baru 82 dinyatakan bukan gagal. Kalo menurut saya gini, wajar. Dia itu kan daerah otonom baru, yang katakanlah baru berjalan berapa tahun. Masa langsung dievaluasi? Nilainya dari 10 aspek. Yah *klenger* mba.. orang *sing tua ngeklek* aja masih banyak kekurangan yaa..

D : iya..

E : itu, disitu kita harus menyadari, kita evaluasi itu bukan untuk menghukum atau menghakimi. Tidak. Tapi untuk pembinaan terhadap apa yang kurang dalam 10 aspek ini. gitu loh.. makanya ada permendagri 55 tentang pembinaan daerah otonom baru.

D : itu tahun berapa pak?

E : 2011. Nanti saya kasih satu sekaligus bisa mengetahui.

D : iya pak. Kalau daerah otonom baru yang jadi lokus saya sih pak Bandung Barat.

E : waah apalagi Bandung Barat.. (terkejut)

D : kenapa tuh pak?

E : sama, itu kan Bandung Barat sama kota Tangerang sama. Itu Bandung Barat lebih parah karena dia hanya mencakup luas wilayah, rentang kendali, ya kan? Dan kalau melihat persentasi keuangan jauh.. yah jadi, kalau di Bandung Barat sebagian kewenangan Bupati itu diserahkan kepada camat.

D : oh, jadi ada pelimpahan gitu.

E : iya. Itu yang bikin kayaknya eeh Bandung Barat lebih cepat karena kalo di Tangsel urusan lebih banyak diurus di walikota. Nah itu aja. Dan itu eeh kenapa seperti itu? Karena daerah induknya sudah membudayakan bahwa ehh sebagian kewenangan bupati itu diserahkan ke kecamatan. Sehingga mendekatkan pelayanan kan. Dia di kecamatan selesai, tidak perlu sampai kabupaten. Itu aja sebenarnya, sehingga keliatan bagus gitu loh.

D : terima kasih pak

E : terima kasih juga dek, sudah dukunungi. Salam buat pak Roy yaah..

LAMPIRAN 4

Verbatim wawancara dengan Ibu Ely, Kepala bagian UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Tanggal : 21 Februari 2012
 Pukul : 12.09 – 12.15 WIB
 Tempat : Dinas Perindagkop Kab Bandung Barat

Keterangan : D (Dede Indrawati, Peneliti)
 E (Ely, Informan)

E : kalo lembaga perbankan mah sekarang kan ada program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Itu kan pelaku usaha langsung berhubungan dengan perbankan. Ya gitu kan... trus kita hanya memberi tahu lah bahwa perbankan ini loh yang ada bunganya segini segini.. silakan mereka mengakses langsung. Trus untuk tahun sekarang hmmm ada KPR (Kredit Perusahaan Rakyat), itu khusus untuk BPD.

D : Lembaga apa saja yang menyediakan modal bu?

E : Apa Kalo di Jawa Barat itu Bank Jabar yah, soalnya bunganya kecil.

D : mm.. jadi kalo Bank lebih prefer Bank daerah ya bu

E : iyah.

D : kemudian bu, dari bagian UMKM ini memfasilitasi dan mengarahkan UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat gitu bu:

E : iyah iyah, mengarahkan dia. Mengarahkan begini, kita ngasih mm ini loh kita ngasih sosialisasi kepada mereka, gitu kan.. ada program dari pemerintah, ini KCR yah yang bunganya sedikit. Cuma kan perbankan banyak nih yang mengucurkan dana untuk usaha mikro kecil. Nah itu kan terserah mereka nantinya larinya kemana. Kita hanya memfasilitasi untuk memberitahukan bahwa emm ada bantuan modalnya dalam artian kredit dengan bunga murah. Gitu aja.

D : oh gitu..

E : iya, mereka beraksi sendiri. Kami hanya memberikan informasi aja. Gitu..

D : kemudian bu, untuk pengembangan UMKM sendiri itu gimana bu disini? Kan banyak usaha kecil misalnya kerajinan, pertanian kan banyak disini.

E : yah pengembangan mereka gitu untuk lebih berkembang? Ya kita dari pemerintah sendiri kita kan eeh mereka kan diberikan pelatihan-pelatihan kaya gitu yah. Pelatihan-pelatihan kewirausahaannya, eeh apah ya kewirausahaan dan kita memfasilitasi untuk kerajinan makanan, kita kan ada pameran nih, promosi produk, nah mereka dari situ gitu. Untuk mengembangkan gitu kan..

D : untuk mengenalkan juga gitu ya..

E : memperkenalkan produk (penegasan). Alhamdulillah dari pameran itu kalo produknya bagus kan bisa berkembang.

D : itu, istilahnya juga untuk mengenalkan produk ke pasar ya bu ya?

E : iyah,

D : itu dimana aja bu emm maksudnya merambah daerah mana? Pameran Bandung Barat saja atau..?

E : Ngga, lokal bisa Bandung Barat, provinsi, baru ke tingkat nasional.

D : berarti sejauh ini pasar UMKM Kabupaten Bandung Barat sudah berada pada tingkat nasional ya bu ya.. kalau intrnasional?

E: Internasional ada sih, beberapa. Ada juga loh pelaku usaha yang sudah bagus. Dia udah bisa keluar gitu kayak ke Malaysia, ada.

D : oh gitu. Terima kasih bu atas waktunya

E : iya neng, sama-sama.

LAMPIRAN 5

Hasil wawancara dengan Pak Asep Khoswara, Kepala seksi dinas perindustrian

Tanggal : 21 Februari 2012
 Pukul : 09.40 – 10.15 WIB
 Tempat : Dinas Perindagkop Kab Bandung Barat

Keterangan : D (Dede Indrawati, Peneliti)
 A (Asep, Informan)

D : bagaimana struktur industri yang ada di kab bandung barat berdasarkan skala usaha?

A : yang dinamakan industri itu ada tiga. Ada yang disebut tanda daftar industri (TDI) investasi dari Rp. 5.000.000 - Rp. 200.000.000. kedua adalah ijin usaha industri untuk investasi dari Rp. 200.000.000 - Rp. 10.000.000.000. adapun di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang diperkenankan dikelola oleh Kabupaten Bandung Barat perijinannya adalah usaha industri dibawah Rp. 10.000.000.000. ada ijin usaha tetap yang dikeluarkan oleh kementerian perindustrian berdasarkan Kepmen no. 41 tahun 2010, namanya IUP. Kemudian yang dikelola oleh provinsi adalah PMA dan PMDN. Provinsi memiliki kewenangan mengelola investasi kurang dari 10 Milyar PMA dan atau PMDN melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi. Kalau di kab/kota menangani TDI dan IUI yang investasinya dibawah 10 M. di Bandung barat sendiri ada industri agro, aneka industri, logam dan elektro.

D : Bagaimana persebaran industri tersebut?

A : terbagi dalam 16 kecamatan. Kab. Bandung Barat belum memiliki kawasan industri, kawasan berikat. Masih menunggu rencana tata ruang dan tata wilayah kab. Bandung Barat. mudah-mudahan rencana kedepan Kab. Bandung Barat akan ada kawasan industri di daerah Cikalong dan Cipendeuy.

D : apakah ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau lembaga bukan pemerintahan lain terkait dengan industri?

A : (berdehem) kalau kiat gini. Pemerintah itu satu kesatuan. Misal: ada investor yang ingin mendirikan pabrik. Yang luas tanahnya dibawah 1000 m dia tidak usah mempunyai ijin pemanfaatan tanah. Hanya dikategorikan ijin hak guna bangunan, itu kerjasamanya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalaupun nanti ada industri yang luas tanahnya lebih dari 1000m si pengusaha wajib mempunyai ijin pemanfaatan tanah (IPT). Proses ijin pemanfaatan tanah itu satu harus ada kajian dulu dari Bappeda, nanti Bappeda menjelaskan kepada pengusaha bahwa lahan tersebut layak atau tidak untuk bangunan pabrik. Setelah ada telaahan dari Bappeda baru dirapatkan dalam tim yang terdiri dari Bappeda, hukum, industri, lingkungan hidup, disnaker, dan dinas lain. Kemudian dimusyawarahkan dan diambil keputusan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diberikan ijin. Setelah memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut bisa lolos memperoleh ijin pemanfaatan tanah. Setelah itu si pengusaha diwajibkan memproses usahanya ke bagian lingkungan hidup. Untuk perusahaan kecil ada SSPL kalau yang menengah dan besar ada UKL UPL atau amdal, jadi SSPL/plpl/amdal. Setelah kajian lingkungan hidup selesai, tahap selanjutnya adalah ke ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan (Ho) termasuk juga ijin gangguan dari warga sekitarnya. Setelah ijin prinsip semua terpenuhi, selanjutnya ke ijin operasional lainnya seperti Tanda Daftar Perusahaan, ijin usaha perdagangan,

baru boleh beroperasi. Jadi tahapannya adalah IPT, PLPL, IMB, HO, ijin operasional, IUI, TDP, dan SIUP.

D : itu dari segi internal SKPD ya. Kalau pengawasan dari masyarakat atau lembaga non pemerintah dalam bidang industri seperti apa?

A : jadi begini, di Kabupaten Bandung Barat itu ada dua asosiasi. Yang pertama adalah Apindo atau asosiasi pengusaha Indonesia kab. Bandung Barat. yang kedua adalah Kadin atau kamar dagang industri. Kalau untuk ormas atau LSM sifatnya temporer dan selama ini bertindak kalau ada gejolak dengan pengusaha yang bersangkutan. Kalau dengan pemerintah sejauh ini tidak ada kaitan dan kerjasama. Berbeda dengan Kadin dan Apindo yang bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah kab. Bandung Barat.

D: bagaimana penggunaan teknologi di industri?

A : ehem.., jadi gini mba, setiap proses pemeriksaan itu dipersyaratkan dalam proses ijin usaha industri itu pertama yang dilihat bahan bakunya, karyawannya, mesinnya. Makanya disebut industri karena ada mesinnya. Mesin-mesin yang dipergunakan oleh perusahaan yaa.. kita lihat dulu penggunaan teknologi untuk apa.

A: apakah ada peraturan terkait penggunaan teknologi dalam industri?

A : Untuk penilaian mesin yang digunakan oleh industri terdapat kajian tersendiri di dinas lingkungan hidup apakah mesin tersebut berbahaya atau tidak. Karena proses pembuatan PPL UPL diserahkan ke konsultan biasanya dari ITB dan Unpad. Mesin-mesin tersebut harus diuji kelayakan. Nanti mba Tanya ke orang dinas lingkungan hidup.

D: bagi bapak selaku PNS, ada tidak komitmen dan perhatian kepala daerah terhadap dunia usaha maupun industri yang ada di Kab. Bandung Barat?

A : Ehem.., selama ini justru lebih konsen terhadap perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional, baik yang PMA dan PMDN. Mereka justru dengan keadaan Bandung Barat ini lebih merasa diperhatikan untuk segala layanan perijinan. Dulu kan harus mengurus di Soreang, sekarang kan lebih dekat. Dari segi pelayanan lebih cepat. Karena kita sudah punya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 ya yang tentang perijinan industri.

D : saya bisa lihat peraturan tadi pak?

A : oh.., itu masih PerGub.

D : oh iyaa.. kalau ini sih pak, emm usaha pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi usaha yang kondusif tadi kan dari segi pengusaha ya pak, kalau dari segi masyarakat dan pekerjanya sendiri itu bagaimana pak?

A : mba harusnya Tanya sama orang ekonomi atau disnaker. Tapi okelah saya jawab. Oke, jadi gini, kita kan lebih kepada ijin pemanfaatan tanah, saya sering dengar bagian ekonomi pembangunan, bagian tenaga kerja, itu mensyaratkan khusus eemm untuk SDM yang ada di wilayah itu harus lebih dari 60%, untuk tenaga misalnya adm atau apa. Kalau untuk tenaga SDM yang tidak ada di daerah, bolehlah dikasih sama orang-orang luar. Jadi, Kab Bandung Barat ini justru lebih banyak mengoptimalkan SDM yang ada di wilayah KBB. Misalnya pabriknya di Batujajar, maka SDMnya diutamakan orang Batujajar, itu dengan kepala disnakernya.

D : oh gitu. Eh iya pak, saya lihat di RPJMD Kab. Bandung Barat itu kontribusi terbesar PDRB itu dari sektor industri.

A : Iya

D: eeh..itu kenapa bisa seperti itu? Padahal setahu saya potensi pertanian justru yang paling besar di Kab. Bandung Barat.

A : jadi gini mba, kalau di kita itu memang untuk proses pendapatan ke kas Negara, bidang industri itu tidak ada biayanya. Yang ada biayanya itu nanti dari pajak ijin gangguan, dari pajak misalkan ijin pembuatan bangunan, nah untuk ijin usaha industri ini tidak ada biayanya. Mungkin dari sektor-sektor yang lain ada pajak air bawah tanah, listriknya, itu kan masuk sama dengan kas yang diproyeksikan oleh perusahaan tersebut. Jadi kemungkinan bukan dari ijin industrinya, dari ijin gangguannya.

D : oh gitu. Kalau yang saya tangkap juga bisa dari segi tenaga kerjanya pak.

A : Oh iya, itu benar. Kita juga lebih konsen karena tenaga kerjanya, SDM yang dipakai perusahaan otomatis lebih merata ada pengakuan. Lebih merasa diperhatikan. Lebih merasa mewakili daerahnya gitu. Jadi tidak harus.. misalnya kepengurusan kartu kuning untuk kerja lebih dekat. Terus kita menjaga wilayahnya juga Alhamdulillah di kabupaten seluruh Indonesia kabupaten Bandung Barat ini lebih tertib. Coba lihat Cimahi, sedikit-sedikit demo, Bekasi juga ya. Kab Bandung Barat ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain karena campur tangan si aparaturnya bukannya sombong, yah lebih memperhatikan kalau ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Seperti pembentukan UMR, kita itu paling besar loh seJawa Barat. yah kalo dibandingkan sama Jakarta sih memang dibawah. Tapi mba ya lebih besar kalau dibandingkan dengan Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung.

D : kemudian, berarti istilahnya masyarakat sudah siap dengan daerah ini mekar kemudian siap membangun daerah. karena istilahnya ketika daerah ini mekar daerah ini telah siap sendiri untuk mandiri.

A : Yak, aku lihat begitu.

D : oke, terima kasih banyak ya Pak atas jawaban yang telah Bapak berikan.

A : Iya mba, sama-sama.